



KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NOMOR: 56/KEP/B1/2019

TENTANG

PERJANJIAN KINERJA PROGRAM KEPENDUDUKAN, KELUARGA
BERENCANA, DAN PEMBANGUNAN KELUARGA TAHUN 2019

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk tercapainya sasaran pembangunan kependudukan dan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, perlu dilakukan Perjanjian Kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala tentang Perjanjian Kinerja Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
4. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11);
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
6. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja BKKBN sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 273/PER/B4/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala BKKBN Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja BKKBN;

7. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
8. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 199/PER/B1/2016 tentang Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2015-2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PERJANJIAN KINERJA PROGRAM KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA, DAN PEMBANGUNAN KELUARGA TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Perjanjian Kinerja Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga Tahun 2019, yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut PK Program KKBPK 2019 adalah dokumen perjanjian kinerja yang dalam pelaksanaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).

KEDUA : Pihak yang menyusun PK Program KKBPK 2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri atas:

- a. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN);
- b. Unit Kerja Eselon I BKKBN;
- c. Unit Kerja Eselon II di lingkungan BKKBN; dan
- d. Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

- KETIGA : PK Program KKBPK 2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri dari sasaran kinerja, indikator kinerja dan target kinerja sebagai alat ukur prestasi kerja dalam pelaksanaan Program KKBPK, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam pelaksanaan Program KKBPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah dan mitra kerja terkait lainnya.
- KELIMA : Dalam pelaksanaan Program KKBPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, BKKBN melakukan pembinaan, bimbingan, dan fasilitasi dalam tercapainya sasaran kinerja, indikator kinerja dan target kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Pihak yang menyusun PK Program KKBPK 2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, melaporkan hasil pelaksanaan kinerja kepada Kepala BKKBN setiap bulannya sesuai dengan tata cara pencatatan dan pelaporan yang berlaku.
- KETUJUH : Laporan hasil pelaksanaan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM, sebagai evaluasi capaian PK Program KKBPK 2019 pada forum Rapat Pengendalian Program yang dilaksanakan setiap bulan.
- KEDELAPAN : Hasil evaluasi capaian PK Program KKBPK 2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH digunakan sebagai masukan percepatan pencapaian kinerja serta penentuan penghargaan dan hukuman dalam pelaksanaan Program KKBPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal, 18 September 2019



KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL,


HASTO WARDOYO



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hasto Wardoyo

Jabatan : Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Surabaya, 16 September 2019
Badan Kependudukan dan
Keluarga Berencana Nasional.
Kepala,

Hasto Wardoyo



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)	1 Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) per WUS (15-49 tahun)	2,28
2	Meningkatnya prevalensi kontrasepsi (CPR) modern	2 Persentase pemakaian kontrasepsi (modern contraceptive prevalence rate/CPR)	61,3
3	Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	3 Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	9,91
4	Meningkatnya peserta KB Aktif yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	4 Persentase peserta KB aktif (PA) MKJP	23,5
5	Menurunnya Tingkat Putus Pakai Kontrasepsi	5 Tingkat putus pakai kontrasepsi (%)	24,6

No	Program	Anggaran
1	Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga	Rp 1.182.695.889.000
2	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Rp 2.466.512.841.000
3	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BKKBN	Rp 13.245.071.000
4	Program Pelatihan, penelitian dan Pengembangan serta Kerjasama Internasional BKKBN	Rp 129.157.928.000
Total Anggaran		Rp 3.791.611.729.000

Surabaya, 16 September 2019
Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional,

Hasto Wardoyo



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nofrijal
Jabatan : Sekretaris Utama

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Hasto Wardoyo
Jabatan : Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Surabaya, 16 September 2019

Pihak Pertama,

Hasto Wardoyo

Nofrijal



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
SEKRETARIAT UTAMA**

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersedianya Dukungan Manajemen dalam Rangka Penyelenggaraan Program KKBPK	1 Jumlah produk hukum dan kebijakan yang dapat dipergunakan sebagai dasar penguatan pelaksanaan program pengendalian penduduk dan KB	1
		2 Tingkat opini laporan keuangan oleh BPK	WTP
		3 Jumlah dokumen perencanaan Program dan Anggaran yang mengacu pada pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah, penganggaran terpadu dan berbasis kinerja	5
		4 Persentase terlaksananya pengembangan karir Aparatur Sipil Negara (ASN) yang kompetensinya sesuai dengan standar (sesuai roadmap)	63% pengembangan SDM
		5 Indeks kepuasan pelayanan administrasi perkantoran, kerumahtanggaan, dan pemeliharaan sarana prasarana perkantoran	4 dari skala 1-4
		6 Jumlah Dukungan manajemen pengelolaan program Kependudukan, KB serta Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga di Provinsi	34 prov
	Terwujudnya dukungan manajemen dalam penyelenggaraan program KKBPK	1 Tersedianya landasan hukum dan kebijakan yang sinergi dan harmonis antara pembangunan bidang kependudukan-KB dan bidang pembangunan lainnya	Peraturan perundangan terkait dengan perkembangan program
		2 Persentase unit kerja yang melakukan tata kelola keuangan dan BMN yang memenuhi standar kepatutan	100%
		3 Persentase unit kerja BKKBN yang melakukan perencanaan program dan anggaran yang sesuai dengan pendekatan perencanaan pembangunan nasional	100%
		4 Persentase pemetaan ASN BKKBN yang sesuai dengan standar kompetensi	100%
		5 Persentase pelayanan kerumahtanggaan & protokol, administrasi umum dan pengelolaan sarana & prasarana yang sesuai dengan standar	100%

No	Kegiatan	Anggaran
1	Penyediaan dan sinkronisasi Landasan hukum dan kebijakan kependudukan dan KB, serta pengelolaan organisasi dan tatalaksana	Rp 6.396.970.000
2	Pengelolaan Keuangan dan BMN	Rp 9.500.000.000
3	Penguatan perencanaan Program dan Anggaran	Rp 10.285.000.000
4	Pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur	Rp 13.491.640.000
5	Pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran dan kerumahtanggaan yang cepat dan tepat (termasuk Gaji, Uang Makan dan Remunerasi, serta cakupan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran)	Rp 118.812.014.000
Total Anggaran		Rp 158.485.624.000

Kepala Badan Kependudukan
Dan Keluarga Berencana Nasional,



Hasto Wardoyo

Surabaya, 16 September 2019
Sekretaris Utama,



Nofrijal



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agus Sukiswo
Jabatan : Inspektur Utama

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Hasto Wardoyo
Jabatan : Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Surabaya, 16 September 2019
Pihak Pertama,

Hasto Wardoyo

Agus Sukiswo



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
INSPEKTORAT UTAMA**

No	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Program KKBPK	1 Persentase Temuan Penyimpangan Strategis Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Program KKBPK oleh eksternal audit	0 % (dari satker yang diaudit eksternal)
		2 Jumlah pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur di satker Perwakilan BKKBN provinsi	34 prov
2	Meningkatnya efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas pemanfaatan anggaran	1 Persentase penurunan temuan eksternal	45%
		2 Persentase Unit Kerja Yang Menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	95%
		3 Persentase Satuan Kerja Mewujudkan Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi	95%

No	Kegiatan	Anggaran
1	Peningkatan akuntabilitas pengelolaan program KKBPK wilayah I	Rp 3.009.000.000
2	Peningkatan akuntabilitas pengelolaan program KKBPK wilayah II	Rp 3.536.000.000
3	Peningkatan akuntabilitas pengelolaan program KKBPK wilayah III	Rp 3.772.000.000
Total Anggaran		Rp 10.317.000.000

Kepala Badan Kependudukan
Dan Keluarga Berencana Nasional,

Surabaya, 16 September 2019
Inspektur Utama,

Hasto Wardoyo

Agus Sukiswo



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dwi Listyawardani
Jabatan : Plt. Deputi Bidang Pengendalian Penduduk

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Hasto Wardoyo
Jabatan : Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Surabaya, 16 September 2019
Pihak Pertama,

Hasto Wardoyo

Dwi Listyawardani



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK**

No	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga diseluruh tingkatan wilayah	1. Persentase masyarakat yang mengetahui tentang isu kependudukan	50
2	Terimplementasikannya Kebijakan Pengendalian Penduduk dalam Perencanaan Pembangunan	1. Jumlah Pemda yang memasukkan indikator program KKBPK ke dalam RKPD	34 provinsi; 300 Kab/Kota (54% dari 547 Kab/Kota); 40% K/L

No	Kegiatan	Anggaran
1	Perencanaan Pengendalian Penduduk	Rp 3.656.080.000
2	Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk	Rp 2.779.320.000
3	Kerjasama Pendidikan kependudukan	Rp 2.789.440.000
4	Analisis Dampak Kependudukan	Rp 2.944.000.000
Total Anggaran		Rp 12.168.840.000

Kepala Badan Kependudukan
Dan Keluarga Berencana Nasional,

Surabaya, 16 September 2019
Plt. Deputi Bidang Pengendalian Penduduk,

Hasto Wardoyo

Dwi Listyawardani



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dwi Listyawardani
Jabatan : Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Hasto Wardoyo
Jabatan : Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Hasto Wardoyo

Surabaya, 16 September 2019

Pihak Pertama,

Dwi Listyawardani



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DEPUTI BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI

No	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga diseluruh tingkatan wilayah	1. Jumlah peserta KB baru /PB (juta)	7,33
2	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Pelayanan KB dan KR	1. Jumlah PA Tambahan 2. Persentase Peningkatan Kesertaan ber-KB di Daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan Terluar (DTPK)	744.000 60,0%

No	Kegiatan	Anggaran
1	Peningkatan pembinaan kesertaan ber-KB jalur pemerintah	Rp 34.322.003.000
2	Pembinaan standarisasi kapasitas tenaga kesehatan pelayanan KBKR	Rp 3.698.200.000
3	Peningkatan Kesertaan KB di wilayah dan sasaran khusus	Rp 4.043.208.000
4	Peningkatan Kualitas Kesehatan Reproduksi	Rp 3.202.520.000
Total Anggaran		Rp 45.265.931.000

Kepala Badan Kependudukan
Dan Keluarga Berencana Nasional,

Surabaya, 16 September 2019
Deputi Bidang Keluarga Berencana
dan Kesehatan Reproduksi,

Hasto Wardoyo

Dwi Listyawardani



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Yani

Jabatan : Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Hasto Wardoyo

Jabatan : Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Surabaya, 16 September 2019

Pihak Pertama,

Hasto Wardoyo

M. Yani



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DEPUTI BIDANG KELUARGA SEJAHTERA DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA

No	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga diseluruh tingkatan wilayah	1. ASFR 15-19 Tahun	38 per 1000 perempuan usia 15-19 tahun
		2. Persentase keluarga yang memiliki pemahaman dan kesadaran tentang fungsi keluarga	50
		3. Indeks Pengetahuan remaja tentang Generasi Berencana	52
2	Meningkatnya Ketahanan Keluarga guna mewujudkan Keluarga Berkualitas	1. Persentase Keluarga Pra Sejahtera (Pra KS)	15,0%
		2. Persentase remaja perempuan 15-19 tahun yang menjadi Ibu dan atau sedang hamil anak pertama	9,00%
		3. Median Usia Kawin Pertama Perempuan	21,0

No	Kegiatan	Anggaran
1	Pembinaan Keluarga Balita dan Anak	Rp 3.726.700.000
2	Pembinaan Ketahanan Remaja	Rp 6.250.000.000
3	Pembinaan Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan	Rp 3.917.600.000
4	Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Rp 5.282.436.000
Total Anggaran		Rp 19.176.736.000

Kepala Badan Kependudukan
Dan Keluarga Berencana Nasional,

Surabaya, 16 September 2019
Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan
Pemberdayaan Keluarga,

Hasto Wardoyo

M. Yani



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Yani

Jabatan : Plt. Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Hasto Wardoyo

Jabatan : Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Surabaya, 16 September 2019

Pihak Pertama,

Hasto Wardoyo

M. Yani



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DEPUTI BIDANG ADVOKASI, PENGGERAKAN DAN INFORMASI

No	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga diseluruh tingkatan wilayah	1. Jumlah Ketersediaan data dan informasi keluarga (pendataan keluarga) yang akurat dan tepat waktu	1
2	Meningkatnya Penghayatan Norma Keluarga Kecil	1. Persentase wanita usia subur yang mengadopsi norma anak ideal	70%
		2. Persentase remaja yang mengadopsi norma Usia Kawin ideal	72%
		3. Persentase potensial demand	13,2%
		4. Persentase Pemanfaatan data untuk perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan	60%

No	Kegiatan	Anggaran
1	Peningkatan Advokasi dan KIE Program Kependudukan, KB, dan pembangunan keluarga	Rp 80.923.400.000
2	Peningkatan kemitraan dengan stakeholder dan mitra kerja	Rp 4.074.000.000
3	Peningkatan Pembinaan Lini Lapangan	Rp 4.850.000.000
4	Penyediaan data dan informasi program KKBPK	Rp 6.887.000.000
5	Penyediaan Teknologi, Informasi dan Dokumentasi program KKBPK	Rp 17.460.000.000
Total Anggaran		Rp 114.194.400.000

Kepala Badan Kependudukan
Dan Keluarga Berencana Nasional,

Surabaya, 16 September 2019
Plt. Deputi Bidang Advokasi,
Penggerakan dan Informasi,

Hasto Wardoyo

M. Yani



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Rizal Martua Damanik

Jabatan : Deputy Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Hasto Wardoyo

Jabatan : Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Surabaya, 16 September 2019

Pihak Pertama,

Hasto Wardoyo

Muhammad Rizal Martua Damanik



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DEPUTI BIDANG PELATIHAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

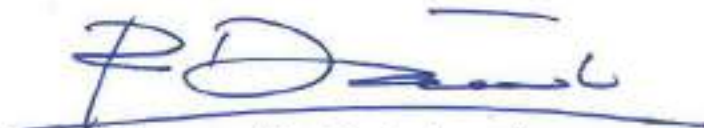
No	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur Penyelenggara Program, Kerjasama Internasional serta Penelitian dan Pengembangan program KKBPK	1 Persentase peningkatan kualitas SDM Aparatur dan tenaga fungsional	100% SDM Aparatur
		2 Peningkatan Jumlah Lembaga Diklat yang terakreditasi	6
		3 Peningkatan kuantitas kerjasama bilateral dan multilateral, lembaga penelitian dan perguruan tinggi dalam dan luar negeri di bidang KKBPK	3
		4 Indeks Kepuasan hasil diklat nasional dan internasional, penelitian dan pengembangan KB, KS dan Kependudukan	3,4 (dari skala 1-4)
		5 Jumlah pelaksanaan kegiatan pelatihan, penelitian dan pengembangan di Provinsi	34 prov
2	Meningkatnya kualitas pelatihan dan pemanfaatan hasil penelitian untuk penentu kebijakan	1 Persentase pemanfaatan hasil penelitian dalam penentuan kebijakan program KKBPK	87
		2 Persentase tenaga program nasional yang terlatih	80%
		3 Jumlah negara pengirim peserta program pelatihan internasional	21
		4 Persentase pegawai yang telah terpenuhi haknya mengikuti pelatihan kompetensi	62%
		5 Jumlah Balatbang dan UPT, Balai Diklat yang Terakreditasi	6

No	Kegiatan	Anggaran
1	Peningkatan pendidikan dan pelatihan Bidang Kependudukan, KB serta Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Rp 22.881.960.000
2	Pengembangan Pelatihan dan Kerjasama Internasional bidang Kependudukan dan KB	Rp 9.769.981.000
3	Peningkatan penelitian dan pengembangan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Rp 6.120.000.000
4	Peningkatan penelitian dan pengembangan Kependudukan	Rp 6.120.000.000
Total Anggaran		Rp 44.891.941.000

Kepala Badan Kependudukan
Dan Keluarga Berencana Nasional,


Hasto Wardoyo

Surabaya, 16 September 2019
Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian dan
Pengembangan,


Muhammad Rizal Martua Damanik



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sahidal Kastri
Jabatan : Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Aceh

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Hasto Wardoyo
Jabatan : Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Hasto Wardoyo

Surabaya, 16 September 2019
Pihak Pertama,

Sahidal Kastri



PERWAKILAN BKKBN PROVINSI ACEH

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019
A INDIKATOR SASARAN STRATEGIS				
1	Menurunnya angka kelahiran total (TFR)	1	Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) per WUS (15-49 tahun)	2,57
2	Meningkatnya prevalensi kontrasepsi modern (mCPR)	2	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (modern contraceptive prevalence rate/mCPR)	50,88
3	Menurunnya tingkat putus pakai kontrasepsi	3	Persentase penurunan angka ketidakberlangsungan pemakaian (tingkat putus pakai) kontrasepsi	24,60
4	Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmetneed)	4	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	13,74
5	Meningkatnya peserta KB Aktif yang menggunakan MKJP	5	Persentase Peserta KB Aktif MKJP	16,69
6	Meningkatnya peserta KB Aktif tambahan	6	Jumlah Peserta KB Aktif tambahan (Additional User)	6.151
B INDIKATOR KINERJA RENSTRA				
Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga				
7	Terlaksananya Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga diseluruh tingkatan wilayah			
Pengendalian Penduduk Provinsi				
		7	Jumlah cakupan sinkronisasi (penyerasian) kebijakan pembangunan daerah dengan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk diseluruh tingkatan wilayah	100% (23 Kab/Kota)
		8	Persentase Kab/Kota yang mengimplementasikan kebijakan dan strategi pengendalian penduduk (Grand Design, Profil/parameter dan Proyeksi Penduduk)	100,00
		9	Jumlah Kabupaten/Kota yang memanfaatkan Analisis Dampak Kependudukan sebagai pendukung kebijakan Pembangunan berwawasan kependudukan	95
		10	Jumlah pembinaan implementasi pendidikan kependudukan di Tk. Provinsi dan Kabupaten/Kota (formal, non formal, informal)	3 Model (terdiri dari 1 formal, 1 non formal, 1 informal)
		11	Jumlah Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi Bidang Pengendalian Penduduk	1
Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Provinsi				
		12	Cakupan pembinaan kesetaraan ber-KB dan peningkatan kualitas pelayanan KB yang sesuai dengan standarisasi pelayanan KB diseluruh tingkatan wilayah	100,00
		13	Jumlah pergerakan pelayanan KB MKJP	3,037
		14	Jumlah pergerakan pelayanan KB dan KR di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan terluar (DTPK), wilayah miskin perkotaan dan sasaran khusus	3 freth/kab
		15	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	85,00
		16	Persentase Faskes yang melakukan promosi dan konseling Kesehatan dan hak-hak Reproduksi di Provinsi dan Kab/Kota	85,00
		17	Jumlah Pembinaan, Monitoring, evaluasi dan Fasilitasi kegiatan Bidang KBKR di Kabupaten dan Kota	1
Ketahanan Keluarga dan Pemberdayaan Keluarga Provinsi				
		18	Pembinaan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga diseluruh tingkatan wilayah	1 Provinsi dan 23 Kab/Kota
		19	Jumlah pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi kebijakan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (Pembangunan Keluarga) diseluruh tingkatan wilayah	1 Provinsi dan 23 Kab/Kota
		20	Persentase Kabupaten/Kota yang mengembangkan kegiatan BKB Holistic Integrative	100,00

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019
		21	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pembinaan Genre (PIK-R/M dan BKR)	100,00
		22	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan pembinaan BKL	100,00
		23	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan pembinaan PEK dan pembentukan kelompok UPPKS	100,00
		24	Jumlah Pembinaan, Monitoring, evaluasi dan Fasilitasi kegiatan Bidang KSPK	1
Advokasi, Penggerakan dan Informasi Provinsi				
		25	Persentase Stakeholders/mitra kerja dan masyarakat diseluruh tingkatan wilayah yang mendapat Pembinaan Advokasi dan KIE program KKBPK	80,90
		26	Jumlah Pembinaan dan sosialisasi kebijakan, strategi dan materi advokasi dan KIE pembangunan KKBPK	1
		27	Jumlah Penayangan informasi KKBPK melalui berbagai media cetak dan elektronik, media luar ruang dan seni dan budaya/tradisional	5 Media
		28	Jumlah Pembinaan mekanisme operasional dalam penguatan pelayanan dasar masyarakat	23
		29	Jumlah wilayah yang mendapatkan dukungan pendampingan kemitraan dalam pembangunan KKB diseluruh tingkatan wilayah	1 Provinsi dan 23 Kab/Kota
		30	Persentase kesertaan stakeholder dan mitra kerja dalam implementasi program KKBPK	100,00
		31	Pengelolaan Data dan informasi program KKBPK di Provinsi	2
		32	Jumlah pengelolaan data dan informasi program KKBPK di provinsi	1
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya				
8	Terselenggaranya Dukungan Manajemen dalam pengelolaan Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Provinsi			
Dukungan Kegiatan Manajemen/Sekretariat Provinsi				
		33	Dukungan Manajemen di Provinsi (termasuk gaji/001 dan pemeliharaan rutin/002)	13 bulan 1 Provinsi
		34	Persentase ketepatan Pembayaran Gaji dan uang makan Pegawai (Perwakilan BKKBN Provinsi)	100,00
		35	Jumlah penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran	12
		36	Jumlah penyelenggaraan Manajemen di Provinsi (Keuangan dan BMN, Perencanaan, Kepegawaian, Umum, dan Ortala)	12
		37	Persentase pengadaan sarana prasarana sesuai Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK)	100,00
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur				
9	Terwujudnya akuntabilitas pelaksanaan pengawasan lainnya di provinsi			
V. Pengawasan Provinsi				
		38	Jumlah pelaksanaan pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparaturnya di provinsi	1
		39	Jumlah peningkatan pelaksanaan pengawasan lainnya dan penerapan ZI WBK	1
Program Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan serta Kerjasama Internasional				
10	Terselenggaranya kegiatan pelatihan, penelitian dan pengembangan di Provinsi			
VI. Pelatihan Pengembangan Provinsi				
		40	Jumlah SDM provinsi (SDM Aparatur dan tenaga Fungsional, termasuk Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana -PLKB/PKB) yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan kapasitas	305
		41	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan SDM (SDM Aparatur dan tenaga Fungsional)	1
VII. Penelitian dan Pengembangan Provinsi				
		42	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan program KKBPK di Provinsi yang dimanfaatkan	3 Dokumen penelitian (KKBPK dan RPJMN) / Prov
		43	Jumlah hasil-hasil penelitian dan pengembangan program KKBPK (KKB) yang dimanfaatkan	3

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019
C PROYEK PRIORITAS NASIONAL (PRO PN)				
11	Tersedianya Alokasi di Fasilitas Kesehatan	44	Pemenuhan Ketersediaan Alokasi di Fasilitas	566
12	Tertaksananya promosi dan konseling kesehatan reproduksi melalui Kelompok Kegiatan	45	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi melalui Kelompok Kegiatan	1.671
13	Meningkatnya pengetahuan keluarga yang memiliki Baduta tentang 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	46	Keluarga yang Memiliki Baduta Terpapar 1000 HPK	25.500
14	Meningkatnya pengetahuan Remaja Putri sebagai calon ibu tentang edukasi Kespro dan Gizi melalui peran Pusat Informasi Konseling (PIK) Remaja dan Bina Ketahanan Remaja (BKR)	47	Penguatan Peran PIK Remaja dan BKR dalam Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu	878
D INDIKATOR STRATEGIS DI LUAR RENSTRA				
15	Terlaksananya penetapan BMN berdasarkan status penggunaannya	48	Persentase BMN yang telah ditetapkan status penggunaannya	100,00
16	Meningkatnya akuntabilitas kinerja program dan anggaran	49	Level maturitas penilaian mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3,0 (Level 1-5)
17	Meningkatnya pengelolaan Kampung KB melalui Kelompok Kerja (POKJA) Kampung KB	50	Persentase Kampung KB yang telah memiliki Kelompok Kerja (POKJA) Kampung KB	65,00
18	Terbentuknya Kampung KB Percontohan Tingkat Kabupaten dan Kota	51	Jumlah Kampung KB Percontohan Tingkat Kabupaten dan Kota	23
19	Terlaksananya Pembinaan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Komprehensif di Kecamatan oleh Kabupaten dan Kota	52	Persentase Kabupaten dan Kota yang melaksanakan Pembinaan PPKS secara Komprehensif di Kecamatan	50,00
20	Terdapatnya Kepala Keluarga (KK) dalam Pendataan Keluarga	53	Persentase Kepala Keluarga (KK) terdapat dalam Pendataan Keluarga	93,00
21	Meningkatnya cakupan potensi Fasilitas dan Poktan yang terdaftar dalam database SIGA	54	Persentase cakupan potensi Fasilitas dan Poktan yang terdaftar dalam database SIGA	50,00
22	Meningkatnya kualitas SDM Aparatur sesuai dengan kompetensinya	55	Persentase peta kompetensi PNS	60,00
		56	Tingkat internalisasi budaya kerja CETAK TEGAS yang dimiliki oleh PNS di BKKBN Provinsi	3,0 (Skala 1-5)

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN/BIDANG/OUTPUT	ANGGARAN (Rp)
1	Pengelolaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga Provinsi Aceh	1. Pengendalian Penduduk Provinsi	1.431.997.000
		2. Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Provinsi	1.993.562.000
		3. Ketahanan Keluarga dan Pemberdayaan Keluarga Provinsi	2.162.490.000
		4. Advokasi, Penggerakan dan Informasi Provinsi	7.415.207.000
		5. Dukungan Kegiatan Manajemen/Sekretariat Provinsi	64.804.616.000
		6. Pengawasan Provinsi	60.025.000
		7. Pelatihan Pengembangan Provinsi	1.643.039.000
		8. Penelitian dan Pengembangan Provinsi	1.385.969.000
2	Proyek Prioritas Nasional	9. Pemenuhan Ketersediaan Alokasi di Fasilitas	3.101.430.000
		10. Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi melalui Kelompok Kegiatan	141.250.000
		11. Keluarga yang Memiliki Baduta Terpapar 1000 HPK	1.265.000.000
		12. Penguatan Peran PIK Remaja dan BKR dalam Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu	2.964.375.000
		TOTAL ANGGARAN	167.968.981.000

Kepala Badan Kependudukan
Dan Keluarga Berencana Nasional,



Hasto Wardoyo

Surabaya, 16 September 2019
Kepala Perwakilan BKKBN
Provinsi Aceh,



Sahidul Katri



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Temazaro Zega
Jabatan : Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Hasto Wardoyo
Jabatan : Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Hasto Wardoyo

Surabaya, 16 September 2019

Pihak Pertama,

Temazaro Zega



PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SUMATERA UTARA

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019
A INDIKATOR SASARAN STRATEGIS				
1	Menurunnya angka kelahiran total (TFR)	1	Angka kelahiran total (total fertility rate/ TFR) per WUS (15-49 tahun)	2,76
2	Meningkatnya prevalensi kontrasepsi modern (mCPR)	2	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (modern contraceptive prevalence rate/mCPR)	46,87
3	Menurunnya tingkat putus pakai kontrasepsi	3	Persentase penurunan angka ketidakberlangsungan pemakaian (tingkat putus pakai) kontrasepsi	24,60
4	Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmetneed)	4	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	14,14
5	Meningkatnya peserta KB Aktif yang menggunakan MKJP	5	Persentase Peserta KB Aktif MKJP	40,20
6	Meningkatnya peserta KB Aktif tambahan	6	Jumlah Peserta KB Aktif tambahan (Additional User)	16.416
B INDIKATOR KINERJA RENSTRA				
Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga				
7	Terlaksananya Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga diseluruh tingkatan wilayah			
Pengendalian Penduduk Provinsi				
		7	Jumlah cakupan sinkronisasi (penyerasian) kebijakan pembangunan daerah dengan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk diseluruh tingkatan wilayah	100% (33 Kab/Kota)
		8	Persentase Kab/Kota yang mengimplementasikan kebijakan dan strategi pengendalian penduduk (Grand Design, Profil/parameter dan Proyeksi Penduduk)	100,00
		9	Jumlah Kabupaten/Kota yang memanfaatkan Analisis Dampak Kependudukan sebagai pendukung kebijakan Pembangunan berwawasan kependudukan	174
		10	Jumlah pembinaan implementasi pendidikan kependudukan di Tk. Provinsi dan Kabupaten/Kota (formal, non formal, informal)	3 Model (terdiri dari 1 formal, 1 non formal, 1 informal)
		11	Jumlah Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi Bidang Pengendalian Penduduk	1
Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Provinsi				
		12	Cakupan pembinaan kesetaraan ber-KB dan peningkatan kualitas pelayanan KB yang sesuai dengan standarisasi pelayanan KB diseluruh tingkatan wilayah	100,00
		13	Jumlah pergerakan pelayanan KB MKJP	14,046
		14	Jumlah pergerakan pelayanan KB dan KR di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan terluar (DTPK), wilayah miskin perkotaan dan sasaran khusus	3 frek/th/kab
		15	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	65,00
		16	Persentase Faskes yang melakukan promosi dan konseling Kesehatan dan hak-hak Reproduksi di Provinsi dan Kab/Kota	65,00
		17	Jumlah Pembinaan, Monitoring, evaluasi dan Fasilitasi kegiatan Bidang KBKR di Kabupaten dan Kota	1
Ketahanan Keluarga dan Pemberdayaan Keluarga Provinsi				
		18	Pembinaan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga diseluruh tingkatan wilayah	1 Provinsi dan 33 Kab/Kota
		19	Jumlah pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi kebijakan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (Pembangunan Keluarga) diseluruh tingkatan wilayah	1 Provinsi dan 33 Kab/Kota
		20	Persentase Kabupaten/Kota yang mengembangkan kegiatan BKB Holistic Integrative	100,00

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019
		21	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pembinaan Genre (PIK-RM dan BKR)	100,00
		22	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan pembinaan BKL	100,00
		23	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan pembinaan PEK dan pembentukan kelompok UPPKS	100,00
		24	Jumlah Pembinaan, Monitoring, evaluasi dan Fasilitasi kegiatan Bidang KSPK	1
Advokasi, Penggerakan dan Informasi Provinsi				
		25	Persentase Stakeholders/mitra kerja dan masyarakat di seluruh tingkatan wilayah yang mendapat Pembinaan Advokasi dan KIE program KKBPK	80,00
		26	Jumlah Pembinaan dan sosialisasi kebijakan, strategi dan materi advokasi dan KIE pembangunan KKBPK	1
		27	Jumlah Penayangan informasi KKBPK melalui berbagai media cetak dan elektronik, media luar ruang dan seni dan budaya/tradisional	5 Media
		28	Jumlah Pembinaan mekanisme operasional dalam penguatan pelayanan dasar masyarakat	33
		29	Jumlah wilayah yang mendapatkan dukungan pendampingan kemitraan dalam pembangunan KKB di seluruh tingkatan wilayah	1 Provinsi dan 33 Kab/Kota
		30	Persentase kesertaan stakeholder dan mitra kerja dalam implementasi program KKBPK	100,00
		31	Pengelolaan Data dan informasi program KKBPK di Provinsi	2
		32	Jumlah pengelolaan data dan informasi program KKBPK di provinsi	1
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya				
8	Terselenggaranya Dukungan Manajemen dalam pengelolaan Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Provinsi			
Dukungan Kegiatan Manajemen/Sekretariat Provinsi				
		33	Dukungan Manajemen di Provinsi (termasuk gaji/001 dan pemeliharaan rutin/002)	13 bulan 1 Provinsi
		34	Persentase ketepatan Pembayaran Gaji dan uang makan Pegawai (Perwakilan BKKBN Provinsi)	100,00
		35	Jumlah penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran	12
		36	Jumlah penyelenggaraan Manajemen di Provinsi (Keuangan dan BMN, Perencanaan, Kepegawaian, Umum, dan Ortala)	12
		37	Persentase pengadaan sarana prasarana sesuai Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK)	100,00
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur				
9	Terwujudnya akuntabilitas pelaksanaan pengawasan lainnya di provinsi			
V. Pengawasan Provinsi				
		38	Jumlah pelaksanaan pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparat di provinsi	1
		39	Jumlah peningkatan pelaksanaan pengawasan lainnya dan penerapan Zi WBK	1
Program Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan serta Kerjasama Internasional				
10	Terselenggaranya kegiatan pelatihan, penelitian dan pengembangan di Provinsi			
VI. Pelatihan Pengembangan Provinsi				
		40	Jumlah SDM provinsi (SDM Aparatur dan tenaga Fungsional, termasuk Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana - PLKB/PKB) yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan kapasitas	457
		41	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan SDM (SDM Aparatur dan tenaga Fungsional)	1
VII. Penelitian dan Pengembangan Provinsi				
		42	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan program KKBPK di Provinsi yang dimanfaatkan	3 Dokumen penelitian (KKBPK dan RPJMN) / Prov
		43	Jumlah hasil-hasil penelitian dan pengembangan program KKBPK (IKB) yang dimanfaatkan	3

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019
C PROYEK PRIORITAS NASIONAL (PRO PN)				
11	Tersedianya Alokasi Fasilitas Kesehatan	44	Pemenuhan Ketersediaan Alokasi di Fasilitas	1.157
12	Tersedianya promosi dan konseling kesehatan reproduksi melalui Kelompok Kegiatan	45	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi melalui Kelompok Kegiatan	2.539
13	Meningkatnya pengetahuan keluarga yang memiliki Baduta tertinggal 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	46	Keluarga yang Memiliki Baduta Terpapar 1000 HPK	71.058
14	Meningkatnya pengetahuan Remaja Putri sebagai calon ibu tentang edukasi Kespro dan Gizi melalui peran Pusat Informasi Konseling (PIK) Remaja dan Bina Ketahanan Remaja (BKR)	47	Penguatan Peran PIK Remaja dan BKR dalam Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu	1.734
D INDIKATOR STRATEGIS DI LUAR RENSTRA				
15	Tersedianya penetapan BMN berdasarkan status penggunaannya	48	Persentase BMN yang telah ditetapkan status penggunaannya	100,00
16	Meningkatnya akuntabilitas kinerja program dan anggaran	49	Level maturitas penilaian mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3,0 (Level 1-5)
17	Meningkatnya pengelolaan Kampung KB melalui Kelompok Kerja (POKJA) Kampung KB	50	Persentase Kampung KB yang telah memiliki Kelompok Kerja (POKJA) Kampung KB	65,00
18	Terbentuknya Kampung KB Percontohan Tingkat Kabupaten dan Kota	51	Jumlah Kampung KB Percontohan Tingkat Kabupaten dan Kota	33
19	Tersedianya Pembinaan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Komprehensif di Kecamatan oleh Kabupaten dan Kota	52	Persentase Kabupaten dan Kota yang melaksanakan Pembinaan PPKS secara Komprehensif di Kecamatan	50,00
20	Tersedianya Kepala Keluarga (KK) dalam Pendataan Keluarga	53	Persentase Kepala Keluarga (KK) terdata dalam Pendataan Keluarga	95,00
21	Meningkatnya cakupan potensi Fasilitas dan Pektan yang terregistrasi dalam database SIGA	54	Persentase cakupan potensi Fasilitas dan Pektan yang terregistrasi dalam database SIGA	50,00
22	Meningkatnya kualitas SDM Aparatur sesuai dengan kompetensinya	55	Persentase peta kompetensi PNS	60,00
		56	Tingkat internalisasi budaya kerja CETAK TEGAS yang dimiliki oleh PNS di BKKBN Provinsi	3,0 (Skala 1-5)

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN/BIDANG/OUTPUT	ANGGARAN (Rp)
1	Pengelolaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga Provinsi Sumatera Utara	1 Pengendalian Penduduk Provinsi	1.632.568.000
		2 Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Provinsi	4.692.272.000
		3 Ketahanan Keluarga dan Pemberdayaan Keluarga Provinsi	4.485.490.000
		4 Advokasi, Penggerakan dan Informasi Provinsi	14.295.941.000
		5 Dukungan Kegiatan Manajemen/Sekretariat Provinsi	127.310.814.000
		6 Pengawasan Provinsi	137.619.000
		7 Pelatihan Pengembangan Provinsi	2.353.112.000
		8 Penelitian dan Pengembangan Provinsi	1.768.389.000
2	Proyek Prioritas Nasional	9 Pemenuhan Ketersediaan Alokasi di Fasilitas	12.181.774.000
		10 Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi melalui Kelompok Kegiatan	173.750.000
		11 Keluarga yang Memiliki Baduta Terpapar 1000 HPK	1.320.000.000
		12 Penguatan Peran PIK Remaja dan BKR dalam Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu	2.675.807.000
		TOTAL ANGGARAN	173.437.426.000

Kepala Badan Kependudukan
Dan Keluarga Berencana Nasional,



Hasto Wardoyo

Surabaya, 16 September 2019
Kepala Perwakilan BKKBN
Provinsi Sumatera Utara,



Temazaro Zega



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. Syahrudin
Jabatan : Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Hasto Wardoyo
Jabatan : Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Surabaya, 16 September 2019

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Hasto Wardoyo

H. Syahrudin



PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SUMATERA BARAT

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019
A. INDIKATOR SASARAN STRATEGIS				
1	Menurunnya angka kelahiran total (TFR)	1	Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) per WUS (15-49 tahun)	2,38
2	Meningkatnya prevalensi kontrasepsi modern (mCPR)	2	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (modern contraceptive prevalence rate/mCPR)	64,26
3	Menurunnya tingkat putus pakai kontrasepsi	3	Persentase penurunan angka ketidakberlangsungan pemakaian (tingkat putus pakai) kontrasepsi	24,60
4	Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet need)	4	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	11,75
5	Meningkatnya peserta KB Aktif yang menggunakan MKJP	5	Persentase Peserta KB Aktif MKJP	27,41
6	Meningkatnya peserta KB Aktif tambahan	6	Jumlah Peserta KB Aktif tambahan (Additional User)	7.439
B. INDIKATOR KINERJA RENSTRA				
Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga				
7	Tertaksananya Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga diseluruh tingkatan wilayah			
Pengendalian Penduduk Provinsi				
	7	Jumlah cakupan sinkronisasi (penyerasian) kebijakan pembangunan daerah dengan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk diseluruh tingkatan wilayah	100% (19 Kab/Kota)	
	8	Persentase Kab/Kota yang mengimplementasikan kebijakan dan strategi pengendalian penduduk (Grand Design, Profil/parameter dan Proyeksi Penduduk)	100,00	
	9	Jumlah Kabupaten/Kota yang memanfaatkan Analisis Dampak Kependudukan sebagai pendukung kebijakan Pembangunan berwawasan kependudukan	56	
	10	Jumlah pembinaan implementasi pendidikan kependudukan di Tk. Provinsi dan Kabupaten/Kota (formal, non formal, informal)	3 Model (terdiri dari 1 formal, 1 non formal, 1 informal)	
	11	Jumlah Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi Bidang Pengendalian Penduduk	1	
Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Provinsi				
	12	Cakupan pembinaan kesetaraan ber-KB dan peningkatan kualitas pelayanan KB yang sesuai dengan standarisasi pelayanan KB diseluruh tingkatan wilayah	100,00	
	13	Jumlah penggerakan pelayanan KB MKJP	7,028	
	14	Jumlah penggerakan pelayanan KB dan KR di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan terluar (DTPK), wilayah makin perkotaan dan sasaran khusus	3 frek/th/kab	
	15	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	85,00	
	16	Persentase Faskes yang melakukan promosi dan konseling Kesehatan dan hak-hak Reproduksi di Provinsi dan Kab/Kota	85,00	
	17	Jumlah Pembinaan, Monitoring, evaluasi dan Fasitiasi kegiatan Bidang KBKR di Kabupaten dan Kota	1	
Ketahanan Keluarga dan Pemberdayaan Keluarga Provinsi				
	18	Pembinaan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga diseluruh tingkatan wilayah	1 Provinsi dan 19 Kab/Kota	
	19	Jumlah pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi kebijakan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (Pembangunan Keluarga) diseluruh tingkatan wilayah	1 Provinsi dan 19 Kab/Kota	
	20	Persentase Kabupaten/Kota yang mengembangkan kegiatan BKB Holistic Integrative	100,00	

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019
		21	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pembinaan Genre (PK-R/M dan BKR)	100,00
		22	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan pembinaan BKL	100,00
		23	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan pembinaan PEK dan pembentukan kelompok UPPKS	100,00
		24	Jumlah Pembinaan, Monitoring, evaluasi dan Fasilitasi kegiatan Bidang KSPK	1
Advokasi, Penggerakan dan Informasi Provinsi				
		25	Persentase Stakeholders/mitra kerja dan masyarakat di seluruh tingkatan wilayah yang mendapat Pembinaan Advokasi dan KIE program KKBPK	80,00
		26	Jumlah Pembinaan dan sosialisasi kebijakan, strategi dan materi advokasi dan KIE pembangunan KKBPK	1
		27	Jumlah Penayangan informasi KKBPK melalui berbagai media cetak dan elektronik, media luar ruang dan seni dan budaya/tradisional	5 Meda
		28	Jumlah Pembinaan mekanisme operasional dalam penguatan pelayanan dasar masyarakat	19
		29	Jumlah wilayah yang mendapatkan dukungan pendampingan kemitraan dalam pembangunan KKB di seluruh tingkatan wilayah	1 Provinsi dan 19 Kab/Kota
		30	Persentase kesertaan stakeholder dan mitra kerja dalam implementasi program KKBPK	100,00
		31	Pengelolaan Data dan informasi program KKBPK di Provinsi	2
		32	Jumlah pengelolaan data dan informasi program KKBPK di provinsi	1
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya				
8	Terselenggaranya Dukungan Manajemen dalam pengelolaan Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Provinsi			
Dukungan Kegiatan Manajemen/Sekretariat Provinsi				
		33	Dukungan Manajemen di Provinsi (termasuk gaji/001 dan pemeliharaan rutin/002)	13 bulan 1 Provinsi
		34	Persentase ketepatan Pembayaran Gaji dan uang makan Pegawai (Perwakilan BKKBN Provinsi)	100,00
		35	Jumlah penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran	12
		36	Jumlah penyelenggaraan Manajemen di Provinsi (Keuangan dan BMN, Perencanaan, Kepegawaian, Umum, dan Ortala)	12
		37	Persentase pengadaan sarana prasarana sesuai Standar Baring dan Standar Kebutuhan (SBSK)	100,00
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur				
9	Terwujudnya akuntabilitas pelaksanaan pengawasan lainnya di provinsi			
V Pengawasan Provinsi				
		38	Jumlah pelaksanaan pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparat di provinsi	1
		39	Jumlah peningkatan pelaksanaan pengawasan lainnya dan penerapan ZI WBK	1
Program Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan serta Kerjasama Internasional				
10	Terselenggaranya kegiatan pelatihan, penelitian dan pengembangan di Provinsi			
VI Pelatihan Pengembangan Provinsi				
		40	Jumlah SDM provinsi (SDM Aparatur dan tenaga Fungsional, termasuk Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana -PLKB/PKB) yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan kapasitas	233
		41	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan SDM (SDM Aparatur dan tenaga Fungsional)	1
VII Penelitian dan Pengembangan Provinsi				
		42	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan program KKBPK di Provinsi yang dimanfaatkan	3 Dokumen penelitian (KKBPK dan RPJMN) / Prov
		43	Jumlah hasil-hasil penelitian dan pengembangan program KKBPK (KKB) yang dimanfaatkan	3

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019
C PROYEK PRIORITAS NASIONAL (PRO PN)				
11	Tersedianya Alokasi di Fasilitas Kesehatan	44	Pemenuhan Ketersediaan Alokasi di Fasilitas	441
12	Terlaksananya promosi dan konseling kesehatan reproduksi melalui Kelompok Kegiatan	45	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi melalui Kelompok Kegiatan	963
13	Meningkatnya pengetahuan keluarga yang memiliki Baduta tentang 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	46	Keluarga yang Memiliki Baduta Terpapar 1000 HPK	37.992
14	Meningkatnya pengetahuan Remaja Putri sebagai calon ibu tentang edukasi Kespro dan Gizi melalui peran Pusat Informasi Konseling (PIK) Remaja dan Bina Kelahiran Remaja (BKR)	47	Penguatan Peran PIK Remaja dan BKR dalam Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu	605
D INDIKATOR STRATEGIS DI LUAR RENSTRA				
15	Terlaksananya penyalangan BMN berdasarkan status penggunaannya	48	Persentase BMN yang telah ditetapkan status penggunaannya	100,00
16	Meningkatnya akuntabilitas kinerja program dan anggaran	49	Level maturitas penilaian mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3,0 (Level 1-5)
17	Meningkatnya pengelolaan Kampung KB melalui Kelompok Kerja (POKJA) Kampung KB	50	Persentase Kampung KB yang telah memiliki Kelompok Kerja (POKJA) Kampung KB	65,00
18	Terbentuknya Kampung KB Percontohan Tingkat Kabupaten dan Kota	51	Jumlah Kampung KB Percontohan Tingkat Kabupaten dan Kota	19
19	Terlaksananya Pembinaan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Komprehensif di Kecamatan oleh Kabupaten dan Kota	52	Persentase Kabupaten dan Kota yang melaksanakan Pembinaan PPKS secara Komprehensif di Kecamatan	60,00
20	Terdapatnya Kepala Keluarga (KK) dalam Pendaftaran Keluarga	53	Persentase Kepala Keluarga (KK) terdapat dalam Pendaftaran Keluarga	100,00
21	Meningkatnya cakupan potensi Faskes dan Poktan yang teregister dalam database SIGA	54	Persentase cakupan potensi Faskes dan Poktan yang teregister dalam database SIGA	60,00
22	Meningkatnya kualitas SDM Aparatur sesuai dengan kompetensinya	55	Persentase peta kompetensi PNS	60,00
		56	Tingkat internalisasi budaya kerja CETAK TEGAS yang dimiliki oleh PNS di BKKBN Provinsi	3,0 (Skala 1-5)

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN/BIDANG/OUTPUT	ANGGARAN (Rp)
1	Pengelolaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga Provinsi Sumatera Barat	1. Pengendalian Penduduk Provinsi	1.578.111.000
		2. Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Provinsi	2.738.082.000
		3. Ketahanan Keluarga dan Pemberdayaan Keluarga Provinsi	3.927.480.000
		4. Advokasi, Penggerakan dan Informasi Provinsi	10.685.143.000
		5. Dukungan Kegiatan Manajemen/Sekretariat Provinsi	61.390.136.000
		6. Pengawasan Provinsi	63.999.000
		7. Pelatihan Pengembangan Provinsi	1.375.650.000
		8. Penelitian dan Pengembangan Provinsi	1.206.648.000
2	Proyek Prioritas Nasional	9. Pemenuhan Ketersediaan Alokasi di Fasilitas	8.327.174.000
		10. Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi melalui Kelompok Kegiatan	133.000.000
		11. Keluarga yang Memiliki Baduta Terpapar 1000 HPK	1.140.000.000
		12. Penguatan Peran PIK Remaja dan BKR dalam Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu	1.622.909.000
		TOTAL ANGGARAN	94.388.242.000

Kepala Badan Kependudukan
Dan Keluarga Berencana Nasional,

Surabaya, 16 September 2019
Kepala Perwakilan BKKBN
Provinsi Sumatera Barat,



Hasto Wardoyo



H. Syahrudin



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agus Putro Proklamasi
Jabatan : Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Riau

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Hasto Wardoyo
Jabatan : Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Hasto Wardoyo

Surabaya, 16 September 2019

Pihak Pertama,

Agus Putro Proklamasi



PERWAKILAN BKKBN PROVINSI RIAU

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019
A INDIKATOR SASARAN STRATEGIS				
1	Menurunnya angka kelahiran total (TFR)	1	Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) per WUS (15-48 tahun)	2,76
2	Meningkatnya prevelensi kontrasepsi modern (mCPR)	2	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (modern contraceptive prevalence rate/mCPR)	54,67
3	Menurunnya tingkat putus pakai kontrasepsi	3	Persentase penurunan angka ketidakberlangsungan pemakaian (tingkat putus pakai) kontrasepsi	24,60
4	Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmetneed)	4	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	12,94
5	Meningkatnya peserta KB Aktif yang menggunakan MKJP	5	Persentase Peserta KB Aktif MKJP	16,47
6	Meningkatnya peserta KB Aktif tambahan	6	Jumlah Peserta KB Aktif tambahan (Additional User)	10.529
B INDIKATOR KINERJA RENSTRA				
Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga				
7	Terlaksananya Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga diseluruh tngkatan wilayah			
Pengendalian Penduduk Provinsi				
		7	Jumlah cakupan sinkronisasi (penyerasian) kebijakan pembangunan daerah dengan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk diseluruh tingkatan wilayah	100% (12 Kab/Kota)
		8	Persentase Kab/Kota yang mengimplementasikan kebijakan dan strategi pengendalian penduduk (Grand Design, Profil/parameter dan Proyeksi Penduduk)	100,00
		9	Jumlah Kabupaten/Kota yang memanfaatkan Analisis Dampak Kependudukan sebagai pendukung kebijakan Pembangunan berwawasan kependudukan	64
		10	Jumlah pembinaan implementasi pendidikan kependudukan di Tk. Provinsi dan Kabupaten/Kota (formal, non formal, informal)	3 Model (terdiri dari 1 formal, 1 non formal, 1 informal)
		11	Jumlah Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi Bidang Pengendalian Penduduk	1
Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Provinsi				
		12	Cakupan pembinaan kesetaraan ber-KB dan peningkatan kualitas pelayanan KB yang sesuai dengan standarisasi pelayanan KB diseluruh tingkatan wilayah	100,00
		13	Jumlah penggerakan pelayanan KB MKJP	7.718
		14	Jumlah penggerakan pelayanan KB dan KR di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan terluar (DTPK), wilayah miskin perkotaan dan sasaran khusus	3 frek/th/kab
		15	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tngkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	85,00
		16	Persentase Faskes yang melakukan promosi dan konseling Kesehatan dan hak-hak Reproduksi di Provinsi dan Kab/Kota	85,00
		17	Jumlah Pembinaan, Monitoring, evaluasi dan Fasilitasi kegiatan Bidang KBKR di Kabupaten dan Kota	1
Kelahanan Keluarga dan Pemberdayaan Keluarga Provinsi				
		18	Pembinaan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga diseluruh tingkatan wilayah	1 Provinsi dan 12 Kab/Kota
		19	Jumlah pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi kebijakan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (Pembangunan Keluarga) diseluruh tingkatan wilayah	1 Provinsi dan 12 Kab/Kota
		20	Persentase Kabupaten/Kota yang mengembangkan kegiatan BKB Holistic Integrative	100,00

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019
		21	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pembinaan Genre (PK-R/M dan BKR)	100,00
		22	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan pembinaan BKL	100,00
		23	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan pembinaan PEK dan pembentukan kelompok UPPKS	100,00
		24	Jumlah Pembinaan, Monitoring, evaluasi dan Fasilitasi kegiatan Bidang KSPK	1
Advokasi, Penggerakan dan Informasi Provinsi				
		25	Persentase Stakeholders/mitra kerja dan masyarakat diseluruh lingkatan wilayah yang mendapat Pembinaan Advokasi dan KIE program KKBPK	80,00
		26	Jumlah Pembinaan dan sosialisasi kebijakan, strategi dan materi advokasi dan KIE pembangunan KKBPK	1
		27	Jumlah Penayangan Informasi KKBPK melalui berbagai media cetak dan elektronik, media luar ruang dan seni dan budaya/tradisional	5 Media
		28	Jumlah Pembinaan mekanisme operasional dalam penguatan pelayanan dasar masyarakat	12
		29	Jumlah wilayah yang mendapatkan dukungan pendampingan kemitraan dalam pembangunan KKB diseluruh lingkatan wilayah	1 Provinsi dan 12 Kab/Kota
		30	Persentase kesiapan stakeholder dan mitra kerja dalam implementasi program KKBPK	100,00
		31	Pengelolaan Data dan informasi program KKBPK di Provinsi	2
		32	Jumlah pengelolaan data dan informasi program KKBPK di provinsi	1
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya				
B	Terselenggaranya Dukungan Manajemen dalam pengelolaan Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Provinsi			
Dukungan Kegiatan Manajemen/Sekretariat Provinsi				
		33	Dukungan Manajemen di Provinsi (termasuk gaji/001 dan pemeliharaan rutin/002)	13 bulan 1 Provinsi
		34	Persentase ketepatan Pembayaran Gaji dan uang makan Pegawai (Perwakilan BKKBN Provinsi)	100,00
		35	Jumlah penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran	12
		36	Jumlah penyelenggaraan Manajemen di Provinsi (Keuangan dan BMN, Perencanaan, Kepegawaian, Umum, dan Ortala)	12
		37	Persentase pengadaan sarana prasarana sesuai Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK)	100,00
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur				
B	Terwujudnya akuntabilitas pelaksanaan pengawasan lainnya di provinsi			
V Pengawasan Provinsi				
		38	Jumlah pelaksanaan pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparaturnya di provinsi	1
		39	Jumlah peningkatan pelaksanaan pengawasan lainnya dan penerapan ZI WBK	1
Program Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan serta Kerjasama Internasional				
10	Terselenggaranya kegiatan pelatihan, penelitian dan pengembangan di Provinsi			
VI Pelatihan Pengembangan Provinsi				
		40	Jumlah SDM provinsi (SDM Aparatur dan tenaga Fungsional, termasuk Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana -PUKB/PKB) yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan kapasitas	130
		41	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan SDM (SDM Aparatur dan tenaga Fungsional)	1
VII Penelitian dan Pengembangan Provinsi				
		42	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan program KKBPK di Provinsi yang dimanfaatkan	3 Dokumen penelitian (KKBPK dan RPJMN)/Prov
		43	Jumlah hasil-hasil penelitian dan pengembangan program KKBPK (KKB) yang dimanfaatkan	3

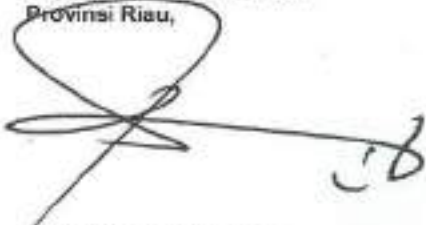
NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019
C PROYEK PRIORITAS NASIONAL (PRO PN)				
11	Tersedianya Alokasi di Fasilitas Kesehatan	44	Pemenuhan Ketersediaan Alokasi di Fasilitas	478
12	Terlaksananya promosi dan konseling kesehatan reproduksi melalui Kelompok Kegiatan	45	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi melalui Kelompok Kegiatan	632
13	Meningkatnya pengetahuan keluarga yang memiliki Baduta tentang 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	46	Keluarga yang Memiliki Baduta Terpapar 1000 HPK	29.943
14	Meningkatnya pengetahuan Remaja Putri sebagai calon ibu tentang edukasi Kespro dan Gizi melalui peran Pusat Informasi Konseling (PIK) Remaja dan Bina Ketahanan Remaja (BKR)	47	Penguatan Peran PIK Remaja dan BKR dalam Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu	809
D INDIKATOR STRATEGIS DI LUAR RENSTRA				
15	Terlaksananya penetapan BMN berdasarkan status penggunaannya	48	Persentase BMN yang telah ditetapkan status penggunaannya	100,00
16	Meningkatnya akuntabilitas kinerja program dan anggaran	49	Level maturitas penilaian mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3,0 (Level 1-5)
17	Meningkatnya pengelolaan Kampung KB melalui Kelompok Kerja (POKJA) Kampung KB	50	Persentase Kampung KB yang telah memiliki Kelompok Kerja (POKJA) Kampung KB	65,00
18	Terbentuknya Kampung KB Percontohan Tingkat Kabupaten dan Kota	51	Jumlah Kampung KB Percontohan Tingkat Kabupaten dan Kota	12
19	Terlaksananya Pembinaan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Komprehensif di Kecamatan oleh Kabupaten dan Kota	52	Persentase Kabupaten dan Kota yang melaksanakan Pembinaan PPKS secara Komprehensif di Kecamatan	50,00
20	Terdatanya Kepala Keluarga (KK) dalam Pendataan Keluarga	53	Persentase Kepala Keluarga (KK) terdata dalam Pendataan Keluarga	60,00
21	Meningkatnya cakupan potensi Fasilitas dan Pektan yang terregistrasi dalam database SIGA	54	Persentase cakupan potensi Fasilitas dan Pektan yang terregistrasi dalam database SIGA	50,00
22	Meningkatnya kualitas SDM Aparatur sesuai dengan kompetensinya	55	Persentase peta kompetensi PNS	60,00
		56	Tingkat internalisasi budaya kerja CETAK TEGAS yang dimiliki oleh PNS di BKKBN Provinsi	3,0 (Skala 1-5)

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN/BIDANG/OUTPUT	ANGGARAN (Rp)
1	Pengelolaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga Provinsi Riau	1 Pengendalian Penduduk Provinsi	765.769.000
		2 Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Provinsi	2.471.052.000
		3 Ketahanan Keluarga dan Pemberdayaan Keluarga Provinsi	2.007.740.000
		4 Advokasi, Penggerakan dan Informasi Provinsi	6.487.101.000
		5 Dukungan Kegiatan Manajemen/Sekretariat Provinsi	43.531.305.000
		6 Pengawasan Provinsi	95.162.000
		7 Pelatihan Pengembangan Provinsi	940.653.000
		8 Penelitian dan Pengembangan Provinsi	823.819.000
2	Proyek Prioritas Nasional	9 Pemenuhan Ketersediaan Alokasi di Fasilitas	4.112.116.000
		10 Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi melalui Kelompok Kegiatan	108.500.000
		11 Keluarga yang Memiliki Baduta Terpapar 1000 HPK	720.000.000
		12 Penguatan Peran PIK Remaja dan BKR dalam Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu	1.490.000.000
		TOTAL ANGGARAN	63.563.279.000

Kepala Badan Kependudukan
Dan Keluarga Berencana Nasional,


Hasto Wardoyo

Surabaya, 16 September 2019
Kepala Perwakilan BKKBN
Provinsi Riau,


Agus Putro Proklamasi



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mediheryanto
Jabatan : Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Riau

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Hasto Wardoyo
Jabatan : Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Hasto Wardoyo

Surabaya, 16 September 2019
Pihak Pertama,

Mediheryanto



PERWAKILAN BKKBN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019
A. INDIKATOR SASARAN STRATEGIS				
1	Menurunnya angka kelahiran total (TFR)	1	Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) per WUS (15-49 tahun)	2,27
2	Meningkatnya prevalensi kontrasepsi modern (mCPR)	2	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (modern contraceptive prevalence rate/mCPR)	52,05
3	Menurunnya tingkat putus pakai kontrasepsi	3	Persentase penurunan angka ketidakberlangsungan pemakaian (tingkat putus pakai) kontrasepsi	24,60
4	Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmetneed)	4	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	11,35
5	Meningkatnya peserta KB Aktif yang menggunakan MKJP	5	Persentase Peserta KB Aktif MKJP	23,01
6	Meningkatnya peserta KB Aktif tambahan	6	Jumlah Peserta KB Aktif tambahan (Additional User)	3.093
B. INDIKATOR KINERJA RENSTRA				
Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga				
7	Terlaksananya Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga diseluruh tingkatan wilayah			
Pengendalian Penduduk Provinsi				
		7	Jumlah cakupan sinkronisasi (penyerasian) kebijakan pembangunan daerah dengan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk diseluruh tingkatan wilayah	100% (7 Kab/Kota)
		8	Persentase Kab/Kota yang mengimplementasikan kebijakan dan strategi pengendalian penduduk (Grand Design, Profil/parameter dan Proyeksi Penduduk)	100,00
		9	Jumlah Kabupaten/Kota yang memanfaatkan Analisis Dampak Kependudukan sebagai pendukung kebijakan Pembangunan berwawasan kependudukan	25
		10	Jumlah pembinaan implementasi pendidikan kependudukan di Tk. Provinsi dan Kabupaten/Kota (formal, non formal, informal)	3 Model (terdiri dari 1 formal, 1 non formal, 1 informal)
		11	Jumlah Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi Bidang Pengendalian Penduduk	1
Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Provinsi				
		12	Cakupan pembinaan kesetaraan ber-KB dan peningkatan kualitas pelayanan KB yang sesuai dengan standarisasi pelayanan KB diseluruh tingkatan wilayah	100,00
		13	Jumlah penggerakan pelayanan KB MKJP	2.170
		14	Jumlah penggerakan pelayanan KB dan KR di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan terluar (DTPK) wilayah miskin perkotaan dan sasaran khusus	3 frek/tah/kab
		15	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	85,00
		16	Persentase Faskes yang melakukan promosi dan konseling Kesehatan dan hak-hak Reproduksi di Provinsi dan Kab/Kota	85,00
		17	Jumlah Pembinaan, Monitoring, evaluasi dan Fasilitasi kegiatan Bidang KBKR di Kabupaten dan Kota	1
Ketahanan Keluarga dan Pemberdayaan Keluarga Provinsi				
		18	Pembinaan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga diseluruh tingkatan wilayah	1 Provinsi dan 7 Kab/Kota
		19	Jumlah pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi kebijakan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (Pembangunan Keluarga) diseluruh tingkatan wilayah	1 Provinsi dan 7 Kab/Kota
		20	Persentase Kabupaten/Kota yang mengembangkan kegiatan BKB Holistic Integrative	100,00

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019
		21	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pembinaan Genre (PK-R/M dan BKR)	100,00
		22	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan pembinaan BKL	100,00
		23	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan pembinaan PEK dan pembentukan kelompok UPPKS	100,00
		24	Jumlah Pembinaan, Monitoring, evaluasi dan Fasilitasi kegiatan Bidang KSPK	1
Advokasi, Penggerakan dan Informasi Provinsi				
		25	Persentase Stakeholders/mitra kerja dan masyarakat diseluruh tingkatan wilayah yang mendapat Pembinaan Advokasi dan KIE program KKBPK	80,00
		26	Jumlah Pembinaan dan sosialisasi kebijakan, strategi dan materi advokasi dan KIE pembangunan KKBPK	1
		27	Jumlah Penyangan informasi KKBPK melalui berbagai media cetak dan elektronik, media luar ruang dan seni dan budaya/tradisional	5 Media
		28	Jumlah Pembinaan mekanisme operasional dalam penguatan pelayanan dasar masyarakat	7
		29	Jumlah wilayah yang mendapatkan dukungan pendampingan kemitraan dalam pembangunan KKB diseluruh tingkatan wilayah	1 Provinsi dan 7 Kab/Kota
		30	Persentase kesertaan stakeholder dan mitra kerja dalam implementasi program KKBPK	100,00
		31	Pengelolaan Data dan Informasi program KKBPK di Provinsi	2
		32	Jumlah pengelolaan data dan informasi program KKBPK di provinsi	1
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya				
8	Terselenggaranya Dukungan Manajemen dalam pengelolaan Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Provinsi			
Dukungan Kegiatan Manajemen/Sekretariat Provinsi				
		33	Dukungan Manajemen di Provinsi (termasuk gaji/001 dan pemeliharaan rutin/002)	13 bulan 1 Provinsi
		34	Persentase ketepatan Pembayaran Gaji dan uang makan Pegawai (Penwakilan BKKBN Provinsi)	100,00
		35	Jumlah penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran	12
		36	Jumlah penyelenggaraan Manajemen di Provinsi (Keuangan dan BMN, Perencanaan, Kepegawaian, Umum, dan Ortala)	12
		37	Persentase pengadaan sarana prasarana sesuai Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK)	100,00
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur				
9	Terwujudnya akuntabilitas pelaksanaan pengawasan lainnya di provinsi			
V Pengawasan Provinsi				
		38	Jumlah pelaksanaan pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparat di provinsi	1
		39	Jumlah peningkatan pelaksanaan pengawasan lainnya dan penerapan ZI WBK	1
Program Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan serta Kerjasama Internasional				
10	Terselenggaranya kegiatan pelatihan, penelitian dan pengembangan di Provinsi			
VI Pelatihan Pengembangan Provinsi				
		40	Jumlah SDM provinsi (SDM Aparatur dan tenaga Fungsional, termasuk Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana -PLKB/PKB) yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan kapasitas	71
		41	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan SDM (SDM Aparatur dan tenaga Fungsional)	1
VII Penelitian dan Pengembangan Provinsi				
		42	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan program KKBPK di Provinsi yang dimanfaatkan	3 Dokumen penelitian (KKBPK dan RPJMN) / Prov
		43	Jumlah hasil-hasil penelitian dan pengembangan program KKBPK (KKB) yang dimanfaatkan	3

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019
C PROYEK PRIORITAS NASIONAL (PRO PN)				
11	Tersedianya Alokasi di Fasilitas Kesehatan	44	Pemenuhan Ketersediaan Alokasi di Fasilitas	164
12	Terlaksanannya promosi dan konseling kesehatan reproduksi melalui Kelompok Kegiatan	45	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi melalui Kelompok Kegiatan	324
13	Meningkatnya pengetahuan keluarga yang memiliki Baduta tentang 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	46	Keluarga yang Memiliki Baduta Terpapar 1000 HPK	2.918
14	Meningkatnya pengetahuan Remaja Putri sebagai calon ibu tentang edukasi Kespro dan Gizi melalui peran Pusat Informasi Konseling (PIK) Remaja dan Bina Ketahanan Remaja (BKR)	47	Penguatan Peran PIK Remaja dan BKR dalam Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu	236
D INDIKATOR STRATEGIS DI LUAR RENSTRA				
15	Terlaksanannya penetapan BMN berdasarkan status penggunaannya	48	Persentase BMN yang telah ditetapkan status penggunaannya	100,00
16	Meningkatnya akuntabilitas kinerja program dan anggaran	49	Level maturitas penilaian mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3,0 (Level 1-5)
17	Meningkatnya pengkayaan Kampung KB melalui Kelompok Kerja (POKJA) Kampung KB	50	Persentase Kampung KB yang telah memiliki Kelompok Kerja (POKJA) Kampung KB	65,00
18	Terbentuknya Kampung KB Percontohan Tingkat Kabupaten dan Kota	51	Jumlah Kampung KB Percontohan Tingkat Kabupaten dan Kota	7
19	Terlaksanannya Pembinaan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Komprehensif di Kecamatan oleh Kabupaten dan Kota	52	Persentase Kabupaten dan Kota yang melaksanakan Pembinaan PPKS secara Komprehensif di Kecamatan	60,00
20	Terdapatnya Kepala Keluarga (KK) dalam Pendaftaran Keluarga	53	Persentase Kepala Keluarga (KK) terdaftar dalam Pendaftaran Keluarga	100,00
21	Meningkatnya cakupan potensi Faskes dan Poktan yang terdaftar dalam database SIGA	54	Persentase cakupan potensi Fasilitas Kesehatan dan Poktan yang terdaftar dalam database SIGA	50,00
22	Meningkatnya kualitas SDM Aparatur sesuai dengan kompetensinya	55	Persentase peta kompetensi PNS	60,00
		56	Tingkat internalisasi budaya kerja CETAK TEGAS yang dimiliki oleh PNS di BKKBN Provinsi	3,0 (Skala 1-5)

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN/BIDANG/OUTPUT	ANGGARAN (Rp)
1	Pengelolaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga Provinsi Kepulauan Riau	1. Pengendalian Penduduk Provinsi	798.940.000
		2. Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Provinsi	1.475.962.000
		3. Ketahanan Keluarga dan Pemberdayaan Keluarga Provinsi	1.226.340.000
		4. Advokasi, Penggerakan dan Informasi Provinsi	3.943.666.000
		5. Dukungan Kegiatan Manajemen/Sekretariat Provinsi	12.119.411.000
		6. Pengawasan Provinsi	88.000.000
		7. Pelatihan Pengembangan Provinsi	703.848.000
		8. Penelitian dan Pengembangan Provinsi	720.712.000
2	Proyek Prioritas Nasional	9. Pemenuhan Ketersediaan Alokasi di Fasilitas	1.409.911.000
		10. Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi melalui Kelompok Kegiatan	119.000.000
		11. Keluarga yang Memiliki Baduta Terpapar 1000 HPK	525.000.000
		12. Penguatan Peran PIK Remaja dan BKR dalam Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu	1.285.178.000
		TOTAL ANGGARAN	24.414.968.000

Kepala Badan Kependudukan
Dan Keluarga Berencana Nasional,



Hasto Wardoyo

Surabaya, 16 September 2019
Kepala Perwakilan BKKBN
Provinsi Kepulauan Riau,



Medha Yanto



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Busmar Edisyaf
Jabatan : Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Hasto Wardoyo
Jabatan : Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Surabaya, 16 September 2019

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Hasto Wardoyo

Busmar Edisyaf



PERWAKILAN BKKBN PROVINSI BENGKULU

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019
A. INDIKATOR SASARAN STRATEGIS				
1	Menurunnya angka kelahiran total (TFR)	1	Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) per WUS (15-49 tahun)	2,27
2	Meningkatnya prevalensi kontrasepsi modern (mCPR)	2	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (modern contraceptive prevalence rate/mCPR)	65,67
3	Menurunnya tingkat putus pakai kontrasepsi	3	Persentase penurunan angka ketidakberlangsungan pemakaian (tingkat putus pakai) kontrasepsi	24,00
4	Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmetneed)	4	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	5,99
5	Meningkatnya peserta KB Aktif yang menggunakan MKJP	5	Persentase Peserta KB Aktif MKJP	25,21
6	Meningkatnya peserta KB Aktif tambahan	6	Jumlah Peserta KB Aktif tambahan (Additional User)	2.151
B. INDIKATOR KINERJA RENSTRA				
Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga				
7	Terlaksananya Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga diseluruh tingkatan wilayah			
Pengendalian Penduduk Provinsi				
		7	Jumlah cakupan sinkronisasi (penyeragaman) kebijakan pembangunan daerah dengan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk diseluruh tingkatan wilayah	100% (10 Kab/Kota)
		8	Persentase Kab/Kota yang mengimplementasikan kebijakan dan strategi pengendalian penduduk (Grand Design, Profil/parameter dan Proyeksi Penduduk)	100,00
		9	Jumlah Kabupaten/Kota yang memanfaatkan Analisis Dampak Kependudukan sebagai pendukung kebijakan Pembangunan berwawasan kependudukan	66
		10	Jumlah pembinaan implementasi pendidikan kependudukan di Tk. Provinsi dan Kabupaten/Kota (formal, non formal, informal)	3 Model (terdiri dari 1 formal, 1 non formal, 1 informal)
		11	Jumlah Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi Bidang Pengendalian Penduduk	1
Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Provinsi				
		12	Cakupan pembinaan kesetaraan ber-KB dan peningkatan kualitas pelayanan KB yang sesuai dengan standarisasi pelayanan KB diseluruh tingkatan wilayah	100,00
		13	Jumlah pergerakan pelayanan KB MKJP	3,628
		14	Jumlah pergerakan pelayanan KB dan KR di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan terluar (DTPK), wilayah miskin perkotaan dan sasaran khusus	3 fak/th/kab
		15	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	65,00
		16	Persentase Faskes yang melakukan promosi dan konseling Kesehatan dan hak-hak Reproduksi di Provinsi dan Kab/Kota	65,00
		17	Jumlah Pembinaan, Monitoring, evaluasi dan Fasilitasi kegiatan Bidang KBKR di Kabupaten dan Kota	1
Ketahanan Keluarga dan Pemberdayaan Keluarga Provinsi				
		18	Pembinaan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga diseluruh tingkatan wilayah	1 Provinsi dan 10 Kab/Kota
		19	Jumlah pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi kebijakan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (Pembangunan Keluarga) diseluruh tingkatan wilayah	1 Provinsi dan 10 Kab/Kota
		20	Persentase Kabupaten/Kota yang mengembangkan kegiatan BKB Holistic Integrative	100,00

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019
		21	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pembinaan Genre (PK-R/M dan BKR)	100,00
		22	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan pembinaan BKL	100,00
		23	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan pembinaan PEK dan pembentukan kelompok UPPKS	100,00
		24	Jumlah Pembinaan, Monitoring, evaluasi dan Fasilitasi kegiatan Bidang KSPK	1
Advokasi, Penggerakan dan Informasi Provinsi				
		25	Persentase Stakeholders/mitra kerja dan masyarakat diseluruh tingkatan wilayah yang mendapat Pembinaan Advokasi dan KIE program KKBPK	80,00
		26	Jumlah Pembinaan dan sosialisasi kebijakan, strategi dan materi advokasi dan KIE pembangunan KKBPK	1
		27	Jumlah Penayangan informasi KKBPK melalui berbagai media cetak dan elektronik, media luar ruang dan seni dan budaya/tradisional	5 Media
		28	Jumlah Pembinaan mekanisme operasional dalam penguatan pelayanan dasar masyarakat	10
		29	Jumlah wilayah yang mendapatkan dukungan pendampingan kemitraan dalam pembangunan KKB diseluruh tingkatan wilayah	1 Provinsi dan 10 Kab/Kota
		30	Persentase kesertaan stakeholder dan mitra kerja dalam implementasi program KKBPK	100,00
		31	Pengelolaan Data dan Informasi program KKBPK di Provinsi	2
		32	Jumlah pengelolaan data dan informasi program KKBPK di provinsi	1
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya				
8	Terselenggaranya Dukungan Manajemen dalam pengelolaan Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Provinsi			
Dukungan Kegiatan Manajemen/Sekretariat Provinsi				
		33	Dukungan Manajemen di Provinsi (termasuk gaji/001 dan pemeliharaan rutin/002)	13 bulan 1 Provinsi
		34	Persentase ketepatan Pembayaran Gaji dan uang makan Pegawai (Perwakilan BKKBN Provinsi)	100,00
		35	Jumlah penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran	12
		36	Jumlah penyelenggaraan Manajemen di Provinsi (Keuangan dan BMN, Perencanaan, Kepegawaian, Umum, dan Ortala)	12
		37	Persentase pengadaan sarana prasarana sesuai Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK)	100,00
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur				
9	Terwujudnya akuntabilitas pelaksanaan pengawasan lainnya di provinsi			
V Pengawasan Provinsi				
		38	Jumlah pelaksanaan pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparat di provinsi	1
		39	Jumlah peningkatan pelaksanaan pengawasan lainnya dan penerapan Zi WSK	1
Program Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan serta Kerjasama Internasional				
10	Terselenggaranya kegiatan pelatihan, penelitian dan pengembangan di Provinsi			
VI Pelatihan Pengembangan Provinsi				
		40	Jumlah SDM provinsi (SDM Aparatur dan tenaga Fungsional, termasuk Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana -PLKB/PKB) yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan kapasitas	146
		41	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan SDM (SDM Aparatur dan tenaga Fungsional)	1
VII Penelitian dan Pengembangan Provinsi				
		42	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan program KKBPK di Provinsi yang dimanfaatkan	3 Dokumen penelitian (KKBPK dan RPJMN) / Prov
		43	Jumlah hasil-hasil penelitian dan pengembangan program KKBPK (KKB) yang dimanfaatkan	3

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019
C PROYEK PRIORITAS NASIONAL (PRO PN)				
11	Tersedianya Alokasi di Fasilitas Kesehatan	44	Pemenuhan Ketersediaan Alokasi di Fasilitas	208
12	Tertaksananya promosi dan konseling kesehatan reproduksi melalui Kelompok Kegiatan	45	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi melalui Kelompok Kegiatan	580
13	Meningkatnya pengetahuan keluarga yang memiliki Baduta tentang 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	46	Keluarga yang Memiliki Baduta Terpapar 1000 HPK	11.660
14	Meningkatnya pengetahuan Remaja Putri sebagai calon ibu tentang edukasi Kespro dan Gizi melalui peran Pusat Informasi Konseling (PIK) Remaja dan Bina Ketahanan Remaja (BKR)	47	Penguatan Peran PIK Remaja dan BKR dalam Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu	479
D INDIKATOR STRATEGIS DI LUAR RENSTRA				
15	Tertaksananya penetapan BMN berdasarkan status penggunaannya	48	Persentase BMN yang telah ditetapkan status penggunaannya	100,00
16	Meningkatnya akuntabilitas kinerja program dan anggaran	49	Level maturitas penilaian mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3,0 (Level 1-5)
17	Meningkatnya pengelolaan Kampung KB melalui Kelompok Kerja (POKJA) Kampung KB	50	Persentase Kampung KB yang telah memiliki Kelompok Kerja (POKJA) Kampung KB	65,00
18	Terbentuknya Kampung KB Percontohan Tingkat Kabupaten dan Kota	51	Jumlah Kampung KB Percontohan Tingkat Kabupaten dan Kota	10
19	Tertaksananya Pembinaan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Komprehensif di Kecamatan oleh Kabupaten dan Kota	52	Persentase Kabupaten dan Kota yang melaksanakan Pembinaan PPKS secara Komprehensif di Kecamatan	50,00
20	Terdapatnya Kepala Keluarga (KK) dalam Pendataan Keluarga	53	Persentase Kepala Keluarga (KK) terdata dalam Pendataan Keluarga	100,00
21	Meningkatnya cakupan potensi Fasilitas dan Poktan yang teregister dalam database SIGA	54	Persentase cakupan potensi Fasilitas dan Poktan yang teregister dalam database SIGA	50,00
22	Meningkatnya kualitas SDM Aparatur sesuai dengan kompetensinya	55	Persentase peta kompetensi PNS	60,00
		56	Tingkat internalisasi budaya kerja CETAK TEGAS yang dimiliki oleh PNS di BKKBN Provinsi	3,0 (Skala 1-5)

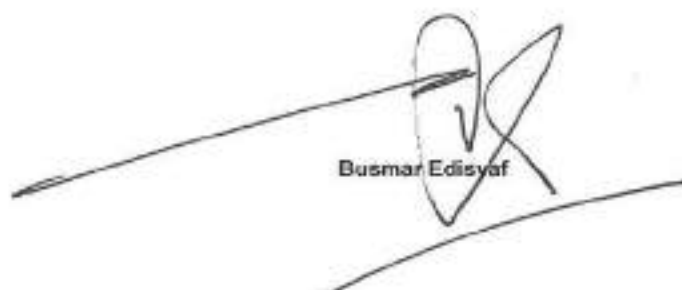
NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN/IBIDANG/OUTPUT	ANGGARAN (Rp)
1	Pengelolaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga Provinsi Bengkulu	1 Pengendalian Penduduk Provinsi	1.113.455.000
		2 Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Provinsi	1.454.552.000
		3 Ketahanan Keluarga dan Pemberdayaan Keluarga Provinsi	1.958.240.000
		4 Advokasi, Penggerakan dan Informasi Provinsi	6.170.470.000
		5 Dukungan Kegiatan Manajemen/Sekretariat Provinsi	51.713.085.000
		6 Pengawasan Provinsi	60.000.000
		7 Pelatihan Pengembangan Provinsi	1.004.871.000
		8 Penelitian dan Pengembangan Provinsi	1.003.737.000
2	Proyek Prioritas Nasional	9 Pemenuhan Ketersediaan Alokasi di Fasilitas	6.830.115.000
		10 Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi melalui Kelompok Kegiatan	116.500.000
		11 Keluarga yang Memiliki Baduta Terpapar 1000 HPK	800.000.000
		12 Penguatan Peran PIK Remaja dan BKR dalam Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu	1.461.567.000
		TOTAL ANGGARAN	73.487.563.000

Kepala Badan Kependudukan
Dan Keluarga Berencana Nasional,

Surabaya, 16 September 2019
Kepala Perwakilan BKKBN
Provinsi Bengkulu,



Haeto Wardoyo



Busmar Edisyaf



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mukhtar Bakti
Jabatan : Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Hasto Wardoyo
Jabatan : Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Hasto Wardoyo

Surabaya, 16 September 2019

Pihak Pertama,

Mukhtar Bakti



PERWAKILAN BKKBN PROVINSI JAMBI

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019
A. INDIKATOR SASARAN STRATEGIS				
1	Menurunnya angka kelahiran total (TFR)	1	Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) per WUS (15-49 tahun)	2,27
2	Meningkatnya prevalensi kontrasepsi modern (mCPR)	2	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (modern contraceptive prevalence rate/mCPR)	60,60
3	Menurunnya tingkat putus pakai kontrasepsi	3	Persentase penurunan angka ketidakeberlangsungan pemakaian (tingkat putus pakai) kontrasepsi	24,60
4	Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet need)	4	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	7,91
5	Meningkatnya peserta KB Aktif yang menggunakan MKJP	5	Persentase Peserta KB Aktif MKJP	18,44
6	Meningkatnya peserta KB Aktif tambahan	6	Jumlah Peserta KB Aktif tambahan (Additional User)	3.796
B. INDIKATOR KINERJA RENSTRA				
Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga				
7	Tertaksananya Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga diseluruh tingkatan wilayah			
Pengendalian Penduduk Provinsi				
		7	Jumlah cakupan sinkronisasi (penyerasan) kebijakan pembangunan daerah dengan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk diseluruh tingkatan wilayah	100% (11 Kab/Kota)
		8	Persentase Kab/Kota yang mengimplementasikan kebijakan dan strategi pengendalian penduduk (Grand Design, Profil/parameter dan Proyeksi Penduduk)	100,00
		9	Jumlah Kabupaten/Kota yang memanfaatkan Analisa Dampak Kependudukan sebagai pendukung kebijakan Pembangunan berwawasan kependudukan	43
		10	Jumlah pembinaan implementasi pendidikan kependudukan di Tk. Provinsi dan Kabupaten/Kota (formal, non formal, informal)	3 Model (terdiri dari 1 formal, 1 non formal, 1 informal)
		11	Jumlah Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi Bidang Pengendalian Penduduk	1
Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Provinsi				
		12	Cakupan pembinaan kesetaraan ber-KB dan peningkatan kualitas pelayanan KB yang sesuai dengan standarisasi pelayanan KB diseluruh tingkatan wilayah	100,00
		13	Jumlah pergerakan pelayanan KB MKJP	4,542
		14	Jumlah pergerakan pelayanan KB dan KR di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan terluar (DTPK), wilayah miskin perkotaan dan sasaran khusus	3 frek/th/kab
		15	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	85,00
		16	Persentase Faskes yang melakukan promosi dan konseling Kesehatan dan hak-hak Reproduksi di Provinsi dan Kab/Kota	85,00
		17	Jumlah Pembinaan, Monitoring, evaluasi dan Fasilitasi kegiatan Bidang KBKR di Kabupaten dan Kota	1
Kelahiran Keluarga dan Pemberdayaan Keluarga Provinsi				
		18	Pembinaan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga diseluruh tingkatan wilayah	1 Provinsi dan 11 Kab/Kota
		19	Jumlah pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi kebijakan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (Pembangunan Keluarga) diseluruh tingkatan wilayah	1 Provinsi dan 11 Kab/Kota
		20	Persentase Kabupaten/Kota yang mengembangkan kegiatan BKB Holistic Integrative	100,00

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019
		21	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pembinaan Genre (PK-R/M dan BKR)	100,00
		22	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan pembinaan BKL	100,00
		23	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan pembinaan PEK dan pembentukan kelompok UPPKS	100,00
		24	Jumlah Pembinaan, Monitoring, evaluasi dan Fasilitasi kegiatan Bidang KSPK	1
Advokasi, Penggerakan dan Informasi Provinsi				
		25	Persentase Stakeholders/mitra kerja dan masyarakat diseluruh tingkatan wilayah yang mendapat Pembinaan Advokasi dan KIE program KKBPK	80,00
		26	Jumlah Pembinaan dan sosialisasi kebijakan, strategi dan materi advokasi dan KIE pembangunan KKBPK	1
		27	Jumlah Penayangan informasi KKBPK melalui berbagai media cetak dan elektronik, media luar ruang dan seni dan budaya/tradisional	5 Media
		28	Jumlah Pembinaan mekanisme operasional dalam pengujian pelayanan dasar masyarakat	11
		29	Jumlah wilayah yang mendapatkan dukungan pendampingan kemitraan dalam pembangunan KKB diseluruh tingkatan wilayah	1 Provinsi dan 11 Kab/Kota
		30	Persentase kesertaan stakeholder dan mitra kerja dalam implementasi program KKBPK	100,00
		31	Pengelolaan Data dan informasi program KKBPK di Provinsi	2
		32	Jumlah pengelolaan data dan informasi program KKBPK di provinsi	1
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya				
8	Terselenggaranya Dukungan Manajemen dalam pengelolaan Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Provinsi			
Dukungan Kegiatan Manajemen/Sekretariat Provinsi				
		33	Dukungan Manajemen di Provinsi (termasuk gaji/001 dan pemeliharaan rutin/002)	13 bulan 1 Provinsi
		34	Persentase ketepatan Pembayaran Gaji dan uang makan Pegawai (Perwakilan BKKBN Provinsi)	100,00
		35	Jumlah penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran	12
		36	Jumlah penyelenggaraan Manajemen di Provinsi (Keuangan dan BMN, Perencanaan, Kepegawaian, Umum, dan Ortala)	12
		37	Persentase pengadaan sarana prasarana sesuai Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SRBK)	100,00
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur				
9	Terwujudnya akuntabilitas pelaksanaan pengawasan lainnya di provinsi			
V Pengawasan Provinsi				
		38	Jumlah pelaksanaan pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparaturnya di provinsi	1
		39	Jumlah peningkatan pelaksanaan pengawasan lainnya dan penerapan Zi WBK	1
Program Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan serta Kerjasama Internasional				
10	Terselenggaranya kegiatan pelatihan, penelitian dan pengembangan di Provinsi			
VI Pelatihan Pengembangan Provinsi				
		40	Jumlah SDM provinsi (SDM Aparatur dan tenaga Fungsional, termasuk Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana -PLKB/PKB) yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan kapasitas	171
		41	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan SDM (SDM Aparatur dan tenaga Fungsional)	1
VII Penelitian dan Pengembangan Provinsi				
		42	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan program KKBPK di Provinsi yang dimanfaatkan	3 Dokumen penelitian (KKBPK dan RPJMN) / Prov
		43	Jumlah hasil-hasil penelitian dan pengembangan program KKBPK (KKB) yang dimanfaatkan	3

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019
C PROYEK PRIORITAS NASIONAL (PRO PN)				
11	Tersedianya Alokasi di Fasilitas Kesehatan	44	Pemenuhan Ketersediaan Alokasi di Fasilitas	304
12	Terlaksananya promosi dan konseling kesehatan reproduksi melalui Kelompok Kegiatan	45	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi melalui Kelompok Kegiatan	888
13	Meningkatnya pengetahuan keluarga yang memiliki Baduta tentang 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	46	Keluarga yang Memiliki Baduta Terpapar 1000 HPK	15.869
14	Meningkatnya pengetahuan Remaja Putri sebagai calon ibu tentang edukasi Kespro dan Gizi melalui peran Pusat Informasi Konseling (PIK) Remaja dan Bina Ketahanan Remaja (BKR)	47	Penguatan Peran PIK Remaja dan BKR dalam Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu	810
D INDIKATOR STRATEGIS DI LUAR RENSTRA				
15	Terlaksananya penelapan BMN berdasarkan status penggunaannya	48	Persentase BMN yang telah ditetapkan status penggunaannya	100,00
16	Meningkatnya akuntabilitas kinerja program dan anggaran	49	Level maturitas penilaian mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3,0 (Level 1-5)
17	Meningkatnya pengelolaan Kampung KB melalui Kelompok Kerja (POKJA) Kampung KB	50	Persentase Kampung KB yang telah memiliki Kelompok Kerja (POKJA) Kampung KB	66,00
18	Terbentuknya Kampung KB Percontohan Tingkat Kabupaten dan Kota	51	Jumlah Kampung KB Percontohan Tingkat Kabupaten dan Kota	11
19	Terlaksananya Pembinaan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Komprehensif di Kecamatan oleh Kabupaten dan Kota	52	Persentase Kabupaten dan Kota yang melaksanakan Pembinaan PPKS secara Komprehensif di Kecamatan	50,00
20	Terdapatnya Kepala Keluarga (KK) dalam Pendataan Keluarga	53	Persentase Kepala Keluarga (KK) terdata dalam Pendataan Keluarga	100,00
21	Meningkatnya cakupan potensi Fasilitas dan Poktan yang teregister dalam database SIGA	54	Persentase cakupan potensi Fasilitas dan Poktan yang teregister dalam database SIGA	50,00
22	Meningkatnya kualitas SDM Aparatur sesuai dengan kompetensinya	55	Persentase penguasaan kompetensi PNS	60,00
		56	Tingkat internalisasi budaya kerja CETAK TEGAS yang dimiliki oleh PNS di BKKBN Provinsi	3,0 (Skala 1-5)

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN/BIDANG/OUTPUT	ANGGARAN (Rp)
1	Pengelolaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga Provinsi Jambi	1. Pengendalian Penduduk Provinsi	1.084.712.000
		2. Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Provinsi	1.693.242.000
		3. Ketahanan Keluarga dan Pemberdayaan Keluarga Provinsi	2.817.490.000
		4. Advokasi, Penggerakan dan Informasi Provinsi	8.038.503.000
		5. Dukungan Kegiatan Manajemen/Sekretariat Provinsi	66.416.204.000
		6. Pengawasan Provinsi	60.025.000
		7. Pelatihan Pengembangan Provinsi	1.113.498.000
		8. Penelitian dan Pengembangan Provinsi	767.638.000
2	Proyek Prioritas Nasional	9. Pemenuhan Ketersediaan Alokasi di Fasilitas	7.598.324.000
		10. Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi melalui Kelompok Kegiatan	105.000.000
		11. Keluarga yang Memiliki Baduta Terpapar 1000 HPK	660.000.000
		12. Penguatan Peran PIK Remaja dan BKR dalam Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu	1.464.668.000
		TOTAL ANGGARAN	84.839.592.000

Kepala Badan Kependudukan
Dan Keluarga Berencana Nasional,

Surabaya, 16 September 2019
Kepala Perwakilan BKKBN
Provinsi Jambi,


Hasto Wardoyo


Mukhtar Bakti



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Waspi
Jabatan : Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Hasto Wardoyo
Jabatan : Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Surabaya, 16 September 2019

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Hasto Wardoyo

Waspi



PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SUMATERA SELATAN

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019
A. INDIKATOR SASARAN STRATEGIS				
1	Menurunnya angka kelahiran total (TFR)	1	Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) per WUS (15-49 tahun)	2,48
2	Meningkatnya prevalensi kontrasepsi modern (mCPR)	2	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (modern contraceptive prevalence rate/mCPR)	66,86
3	Menurunnya tingkat putus pakai kontrasepsi	3	Persentase penurunan angka ketidakberlangsungan pemakaian (tingkat putus pakai) kontrasepsi	24,80
4	Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet need)	4	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	8,07
5	Meningkatnya peserta KB Aktif yang menggunakan MKJP	5	Persentase Peserta KB Aktif MKJP	25,84
6	Meningkatnya peserta KB Aktif tambahan	6	Jumlah Peserta KB Aktif tambahan (Additional User)	9.627
B. INDIKATOR KINERJA RENSTRA				
Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga				
7	Terlaksananya Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga diseluruh tingkatan wilayah			
Pengendalian Penduduk Provinsi				
		7	Jumlah cakupan sinkronisasi (penyerasian) kebijakan pembangunan daerah dengan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk diseluruh tingkatan wilayah	100% (17 Kab/Kota)
		8	Persentase Kab/Kota yang mengimplementasikan kebijakan dan strategi pengendalian penduduk (Grand Design, Profil/parameter dan Proyeksi Penduduk)	100,00
		9	Jumlah Kabupaten/Kota yang memanfaatkan Analisis Dampak Kependudukan sebagai pendukung kebijakan Pembangunan berwawasan kependudukan	53
		10	Jumlah pembinaan implementasi pendidikan kependudukan di Tk. Provinsi dan Kabupaten/Kota (formal, non formal, informal)	3 Model (terdiri dari 1 formal, 1 non formal, 1 informal)
		11	Jumlah Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi Bidang Pengendalian Penduduk	1
Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Provinsi				
		12	Cakupan pembinaan kesetaraan ber-KB dan peningkatan kualitas pelayanan KB yang sesuai dengan standarisasi pelayanan KB diseluruh tingkatan wilayah	100,00
		13	Jumlah penggerakan pelayanan KB MKJP	14.730
		14	Jumlah penggerakan pelayanan KB dan KR di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan terluar (DTPK), wilayah miskin perkotaan dan sasaran khusus	3 frek/tn/kab
		15	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	85,00
		16	Persentase Faskes yang melakukan promosi dan konseling Kesehatan dan hak-hak Reproduksi di Provinsi dan Kab/Kota	85,00
		17	Jumlah Pembinaan, Monitoring, evaluasi dan Fasilitasi kegiatan Bidang KBKR di Kabupaten dan Kota	1
Ketahanan Keluarga dan Pemberdayaan Keluarga Provinsi				
		18	Pembinaan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga diseluruh tingkatan wilayah	1 Provinsi dan 17 Kab/Kota
		19	Jumlah pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi kebijakan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (Pembangunan Keluarga) diseluruh tingkatan wilayah	1 Provinsi dan 17 Kab/Kota
		20	Persentase Kabupaten/Kota yang mengembangkan kegiatan BKB Holistic Integrative	100,00

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019
		21	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pembinaan Genre (PIK-R/M dan BKR)	100,00
		22	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan pembinaan BKL	100,00
		23	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan pembinaan PEK dan pembentukan kelompok UPPKS	100,00
		24	Jumlah Pembinaan, Monitoring, evaluasi dan Fasilitas kegiatan Bidang KSPK	1
Advokasi, Penggerakan dan Informasi Provinsi				
		25	Persentase Stakeholders/mitra kerja dan masyarakat diseluruh tingkatan wilayah yang mendapat Pembinaan Advokasi dan KIE program KKBPK	80,00
		26	Jumlah Pembinaan dan sosialisasi kebijakan, strategi dan materi advokasi dan KIE pembangunan KKBPK	1
		27	Jumlah Penayangan informasi KKBPK melalui berbagai media cetak dan elektronik, media luar ruang dan seni dan budaya/tradisional	5 Media
		28	Jumlah Pembinaan mekanisme operasional dalam penguatan pelayanan dasar masyarakat	17
		29	Jumlah wilayah yang mendapatkan dukungan pendampingan kemitraan dalam pembangunan KKB diseluruh tingkatan wilayah	1 Provinsi dan 17 Kab/Kota
		30	Persentase kesertaan stakeholder dan mitra kerja dalam implementasi program KKBPK	100,00
		31	Pengelolaan Data dan informasi program KKBPK di Provinsi	2
		32	Jumlah pengelolaan data dan informasi program KKBPK di provinsi	1
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya				
8	Terselenggaranya Dukungan Manajemen dalam pengelolaan Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Provinsi			
Dukungan Kegiatan Manajemen/Sekretariat Provinsi				
		33	Dukungan Manajemen di Provinsi (termasuk gaji/001 dan pemeliharaan rutin/002)	13 bulan 1 Provinsi
		34	Persentase ketepatan Pembayaran Gaji dan uang makan Pegawai (Perwakilan BKKBN Provinsi)	100,00
		35	Jumlah penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran	12
		36	Jumlah penyelenggaraan Manajemen di Provinsi (Keuangan dan BMN, Perencanaan, Kepegawaian, Umum, dan Ortolat)	12
		37	Persentase pengadaan sarana prasarana sesuai Standar Bering dan Standar Kebutuhan (SBKS)	100,00
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur				
9	Terwujudnya akuntabilitas pelaksanaan pengawasan lainnya di provinsi			
V Pengawasan Provinsi				
		38	Jumlah pelaksanaan pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparat di provinsi	1
		39	Jumlah peningkatan pelaksanaan pengawasan lainnya dan penerapan ZI WBK	1
Program Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan serta Kerjasama Internasional				
10	Terselenggaranya kegiatan pelatihan, penelitian dan pengembangan di Provinsi			
VI Pelatihan Pengembangan Provinsi				
		40	Jumlah SDM provinsi (SDM Aparatur dan tenaga Fungsional, termasuk Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana -PLKB/PKB) yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan kapasitas	240
		41	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan SDM (SDM Aparatur dan tenaga Fungsional)	1
VII Penelitian dan Pengembangan Provinsi				
		42	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan program KKBPK di Provinsi yang dimanfaatkan	3 Dokumen penelitian (KKBPK dan RPJMN) / Prov
		43	Jumlah hasil-hasil penelitian dan pengembangan program KKBPK (KKB) yang dimanfaatkan	3

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019
C PROYEK PRIORITAS NASIONAL (PRO PN)				
11	Tersedianya Alokasi di Fasilitas Kesehatan	44	Pemenuhan Ketersediaan Alokasi di Fasilitas	654
12	Tertaksananya promosi dan konseling kesehatan reproduksi melalui Kelompok Kegiatan	45	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi melalui Kelompok Kegiatan	2.178
13	Meningkatnya pengetahuan keluarga yang memiliki Baduta tertang 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	46	Keluarga yang Memiliki Baduta Terpapar 1000 HPK	37.604
14	Meningkatnya pengetahuan Remaja Putri sebagai calon ibu tentang edukasi Kespro dan Gizi melalui peran Pusat Informasi Konseling (PIK) Remaja dan Bina Ketahanan Remaja (BKR)	47	Penguatan Peran PIK Remaja dan BKR dalam Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu	1.191
D INDIKATOR STRATEGIS DI LUAR RENSTRA				
15	Terlaksananya penetapan BMN berdasarkan status penggunaannya	48	Persentase BMN yang telah ditetapkan status penggunaannya	100,00
16	Meningkatnya akuntabilitas kinerja program dan anggaran	49	Level maturitas penilaian mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3,0 (Level 1-5)
17	Meningkatnya pengelolaan Kampung KB melalui Kelompok Kerja (POKJA) Kampung KB	50	Persentase Kampung KB yang telah memiliki Kelompok Kerja (POKJA) Kampung KB	85,00
18	Terbentuknya Kampung KB Percontohan Tingkat Kabupaten dan Kota	51	Jumlah Kampung KB Percontohan Tingkat Kabupaten dan Kota	17
19	Terlaksananya Pembinaan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Komprehensif di Kecamatan oleh Kabupaten dan Kota	52	Persentase Kabupaten dan Kota yang melaksanakan Pembinaan PPKS secara Komprehensif di Kecamatan	50,00
20	Terdatanya Kepala Keluarga (KK) dalam Pendataan Keluarga	53	Persentase Kepala Keluarga (KK) terdata dalam Pendataan Keluarga	88,00
21	Meningkatnya cakupan potensi Faskes dan Poktan yang teregister dalam database SIGA	54	Persentase cakupan potensi Faskes dan Poktan yang teregister dalam database SIGA	50,00
22	Meningkatnya kualitas SDM Aparatur sesuai dengan kompetensinya	55	Persentase peta kompetensi PNS	50,00
		56	Tingkat internalisasi budaya kerja CETAK TEGAS yang dimiliki oleh PNS di BKKBN Provinsi	3,0 (Skala 1-5)

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN/URIDANG/OUTPUT	ANGGARAN (Rp)
1	Pengelolaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga Provinsi Sumatera Selatan	1 Pengendalian Penduduk Provinsi	1.428.511.000
		2 Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Provinsi	3.807.462.000
		3 Ketahanan Keluarga dan Pemberdayaan Keluarga Provinsi	2.159.990.000
		4 Advokasi, Penggerakan dan Informasi Provinsi	8.019.342.000
		5 Dukungan Kegiatan Manajemen/Sekretariat Provinsi	75.927.048.000
		6 Pengawasan Provinsi	131.783.000
		7 Pelatihan Pengembangan Provinsi	1.396.805.000
		8 Penelitian dan Pengembangan Provinsi	1.248.829.000
2	Proyek Prioritas Nasional	9 Pemenuhan Ketersediaan Alokasi di Fasilitas	24.514.877.000
		10 Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi melalui Kelompok Kegiatan	134.500.000
		11 Keluarga yang Memiliki Baduta Terpapar 1000 HPK	935.000.000
		12 Penguatan Peran PIK Remaja dan BKR dalam Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu	1.892.628.000
		TOTAL ANGGARAN	121.594.755.000

Kepala Badan Kependudukan
Dan Keluarga Berencana Nasional,

Surabaya, 16 September 2019
Kepala Perwakilan BKKBN
Provinsi Sumatera Selatan,


Hasto Wardoyo


Waspi



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Etna Estelita
Jabatan : Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Hasto Wardoyo
Jabatan : Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Surabaya, 16 September 2019
Pihak Pertama,

Hasto Wardoyo

Etna Estelita



PERWAKILAN BKKBN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019
A. INDIKATOR SASARAN STRATEGIS				
1	Menurunnya angka kelahiran total (TFR)	1	Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) per WUS (15-49 tahun)	2,27
2	Meningkatnya prevalensi kontrasepsi modern (mCPR)	2	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (modern contraceptive prevalence rate/mCPR)	66,75
3	Menurunnya tingkat putus pakai kontrasepsi	3	Persentase penurunan angka ketidakberlangsungan pemakaian (tingkat putus pakai) kontrasepsi	24,60
4	Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet need)	4	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	7,03
5	Meningkatnya peserta KB Aktif yang menggunakan MKJP	5	Persentase Peserta KB Aktif MKJP	19,23
6	Meningkatnya peserta KB Aktif tambahan	6	Jumlah Peserta KB Aktif tambahan (Additional User)	1.852
B. INDIKATOR KINERJA RENSTRA				
Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga				
7	Teraksennanya Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga diseluruh tingkatan wilayah			
Pengendalian Penduduk Provinsi				
		7	Jumlah cakupan sinkronisasi (penyerasian) kebijakan pembangunan daerah dengan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk diseluruh tingkatan wilayah	100% (7 Kab/Kota)
		8	Persentase Kab/Kota yang mengimplementasikan kebijakan dan strategi pengendalian penduduk (Grand Design, Profil/parameter dan Proyeksi Penduduk)	100,00
		9	Jumlah Kabupaten/Kota yang memanfaatkan Analisis Dampak Kependudukan sebagai pendukung kebijakan Pembangunan berwawasan kependudukan	21
		10	Jumlah pembinaan implementasi pendidikan kependudukan di Tk. Provinsi dan Kabupaten/Kota (formal, non formal, informal)	3 Model (terdiri dari 1 formal, 1 non formal, 1 informal)
		11	Jumlah Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi Bidang Pengendalian Penduduk	1
Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Provinsi				
		12	Cakupan pembinaan kesehatan ber-KB dan peningkatan kualitas pelayanan KB yang sesuai dengan standarisasi pelayanan KB diseluruh tingkatan wilayah	100,00
		13	Jumlah penggerak pelayanan KB MKJP	1.847
		14	Jumlah pergerakan pelayanan KB dan KR di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan terluar (DTPK), wilayah miskin perkotaan dan sasaran khusus	3 fak/lt/kab
		15	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	85,00
		16	Persentase Faskes yang melakukan promosi dan konseling Kesehatan dan hak-hak Reproduksi di Provinsi dan Kab/Kota	85,00
		17	Jumlah Pembinaan, Monitoring, evaluasi dan Fasilitasi kegiatan Bidang KBKR di Kabupaten dan Kota	1
Ketahanan Keluarga dan Pemberdayaan Keluarga Provinsi				
		18	Pembinaan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga diseluruh tingkatan wilayah	1 Provinsi dan 7 Kab/Kota
		19	Jumlah pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi kebijakan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (Pembangunan Keluarga) diseluruh tingkatan wilayah	1 Provinsi dan 7 Kab/Kota
		20	Persentase Kabupaten/Kota yang mengembangkan kegiatan BKB Holistic Integrative	100,00

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019
C PROYEK PRIORITAS NASIONAL (PRO PN)				
11	Tersedianya Alokasi di Fasilitas Kesehatan	44	Pemenuhan Ketersediaan Alokasi di Fasilitas	87
12	Terlaksananya promosi dan konseling kesehatan reproduksi melalui Kelompok Kegiatan	45	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi melalui Kelompok Kegiatan	203
13	Meningkatnya pengetahuan keluarga yang memiliki Bidan tentang 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	46	Keluarga yang Memiliki Bidan Terpapar 1000 HPK	15.442
14	Meningkatnya pengetahuan Remaja Putri sebagai calon ibu tentang edukasi Kespro dan Gizi melalui peran Pusat Informasi Konseling (PIK) Remaja dan Bina Ketahanan Remaja (BKR)	47	Penguatan Peran PIK Remaja dan BKR dalam Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu	290
D INDIKATOR STRATEGIS DI LUAR RENSTRA				
15	Terlaksananya penetapan BMN berdasarkan status penggunaannya	48	Persentase BMN yang telah ditetapkan status penggunaannya	100,00
16	Meningkatnya skuntabilitas kinerja program dan anggaran	49	Level maturitas penilaian mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3,0 (Level 1-5)
17	Meningkatnya pengelolaan Kampung KB melalui Kelompok Kerja (POKJA) Kampung KB	50	Persentase Kampung KB yang telah memiliki Kelompok Kerja (POKJA) Kampung KB	65,00
18	Terbentuknya Kampung KB Percontohan Tingkat Kabupaten dan Kota	51	Jumlah Kampung KB Percontohan Tingkat Kabupaten dan Kota	7
19	Terlaksananya Pembinaan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Komprehensif di Kecamatan oleh Kabupaten dan Kota	52	Persentase Kabupaten dan Kota yang melaksanakan Pembinaan PPKS secara Komprehensif di Kecamatan	50,00
20	Terdatanya Kepala Keluarga (KK) dalam Pendataan Keluarga	53	Persentase Kepala Keluarga (KK) terdata dalam Pendataan Keluarga	94,00
21	Meningkatnya cakupan potensi Fasilitas dan Poktan yang teregister dalam database SIGA	54	Persentase cakupan potensi Fasilitas dan Poktan yang teregister dalam database SIGA	50,00
22	Meningkatnya kualitas SDM Aparatur sesuai dengan kompetensinya	55	Persentase pola kompetensi PNS	60,00
		56	Tingkat internalisasi budaya kerja CETAK TEGAS yang dimiliki oleh PNS di BKKBN Provinsi	3,0 (Skala 1-5)

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN/SIDANG/OUTPUT	ANGGARAN (Rp)
1	Pengelolaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga Provinsi Bangka Belitung	1 Pengendalian Penduduk Provinsi	798.940.000
		2 Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Provinsi	1.123.192.000
		3 Ketahanan Keluarga dan Pemberdayaan Keluarga Provinsi	1.205.890.000
		4 Advokasi, Penggerakan dan Informasi Provinsi	3.815.233.000
		5 Dukungan Kegiatan Manajemen/Sekretariat Provinsi	16.583.414.000
		6 Pengawasan Provinsi	58.000.000
		7 Pelatihan Pengembangan Provinsi	658.693.000
		8 Penilaian dan Pengembangan Provinsi	770.100.000
2	Proyek Prioritas Nasional	9 Pemenuhan Ketersediaan Alokasi di Fasilitas	2.035.035.000
		10 Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi melalui Kelompok Kegiatan	115.500.000
		11 Keluarga yang Memiliki Bidan Terpapar 1000 HPK	525.000.000
		12 Penguatan Peran PIK Remaja dan BKR dalam Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu	1.266.409.000
		TOTAL ANGGARAN	28.975.509.000

Kepala Badan Kependudukan
Dan Keluarga Berencana Nasional,

Surabaya, 16 September 2019
Kepala Perwakilan BKKBN
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,



Hasto Wardoyo



Etna Estelita

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019
		21	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pembinaan Genre (PIK-R/M dan BKR)	100,00
		22	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan pembinaan BKL	100,00
		23	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan pembinaan PEK dan pembentukan kelompok UPPKS	100,00
		24	Jumlah Pembinaan, Monitoring, evaluasi dan Fasilitas kegiatan Bidang KSPK	1
Advokasi, Penggerakan dan Informasi Provinsi				
		25	Persentase Stakeholders/mitra kerja dan masyarakat diseluruh lingkaran wilayah yang mendapat Pembinaan Advokasi dan KIE program KKBPK	80,00
		26	Jumlah Pembinaan dan sosialisasi kebijakan, strategi dan materi advokasi dan KIE pembangunan KKBPK	1
		27	Jumlah Penayangan informasi KKBPK melalui berbagai media cetak dan elektronik, media luar ruang dan seni dan budaya/tradisional	5 Media
		28	Jumlah Pembinaan mekanisme operasional dalam penguatan pelayanan dasar masyarakat	7
		29	Jumlah wilayah yang mendapatkan dukungan pendampingan kemitraan dalam pembangunan KKB diseluruh lingkaran wilayah	1 Provinsi dan 7 Kab/Kota
		30	Persentase kesertaan stakeholder dan mitra kerja dalam implementasi program KKBPK	100,00
		31	Pengelolaan Data dan informasi program KKBPK di Provinsi	2
		32	Jumlah pengelolaan data dan informasi program KKBPK di provinsi	1
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya				
8	Terselenggaranya Dukungan Manajemen dalam pengelolaan Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Provinsi			
Dukungan Kegiatan Manajemen/Sekretariat Provinsi				
		33	Dukungan Manajemen di Provinsi (termasuk gaji/001 dan pemeliharaan rutin/002)	13 bulan 1 Provinsi
		34	Persentase ketepatan Pembayaran Gaji dan uang makan Pegawai (Penwekian BKKBN Provinsi)	100,00
		35	Jumlah penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran	12
		36	Jumlah penyelenggaraan Manajemen di Provinsi (Keuangan dan BMN, Perencanaan, Kepegawaian, Umum, dan Orala)	12
		37	Persentase pengadaan sarana prasarana sesuai Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK)	100,00
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur				
9	Terwujudnya akuntabilitas pelaksanaan pengawasan lainnya di provinsi			
V Pengawasan Provinsi				
		38	Jumlah pelaksanaan pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparat di provinsi	1
		39	Jumlah peningkatan pelaksanaan pengawasan lainnya dan penerapan ZI WBK	1
Program Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan serta Kerjasama Internasional				
10	Terselenggaranya kegiatan pelatihan, penelitian dan pengembangan di Provinsi			
VI Pelatihan Pengembangan Provinsi				
		40	Jumlah SDM provinsi (SDM Aparatur dan tenaga Fungsional, termasuk Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana -PLKBPKB) yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan kapasitas	83
		41	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan SDM (SDM Aparatur dan tenaga Fungsional)	1
VII Penelitian dan Pengembangan Provinsi				
		42	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan program KKBPK di Provinsi yang dimanfaatkan	3 Dokumen penelitian (KKBPK dan RPJMN) / Prov
		43	Jumlah hasil-hasil penelitian dan pengembangan program KKBPK (KKB) yang dimanfaatkan	3



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Uliantina Meiti
Jabatan : Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Hasto Wardoyo
Jabatan : Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Hasto Wardoyo

Surabaya, 16 September 2019

Pihak Pertama,

Uliantina Meiti



PERWAKILAN BKKBN PROVINSI LAMPUNG

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019
A INDIKATOR SASARAN STRATEGIS				
1	Menurunnya angka kelahiran total (TFR)	1	Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) per WUS (15-49 tahun)	2,27
2	Meningkatnya prevalensi kontrasepsi modern (mCPR)	2	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (modern contraceptive prevalence rate/mCPR)	67,16
3	Menurunnya tingkat putus pakai kontrasepsi	3	Persentase penurunan angka ketidakberlangsungan pemakaian (tingkat putus pakai) kontrasepsi	24,60
4	Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmetneed)	4	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	9,27
5	Meningkatnya peserta KB Aktif yang menggunakan MKJP	5	Persentase Peserta KB Aktif MKJP	21,37
6	Meningkatnya peserta KB Aktif tambahan	6	Jumlah Peserta KB Aktif tambahan (Additional User)	10.942
B INDIKATOR KINERJA RENSTRA				
Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga				
7	Terlaksananya Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga diseluruh tingkatan wilayah			
Pengendalian Penduduk Provinsi				
		7	Jumlah cakupan sinkronisasi (penyerasian) kebijakan pembangunan daerah dengan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk diseluruh tingkatan wilayah	100% (15 Kab/Kota)
		8	Persentase Kab/Kota yang mengimplementasikan kebijakan dan strategi pengendalian penduduk (Grand Design, Profil/parameter dan Proyeksi Penduduk)	100,00
		9	Jumlah Kabupaten/Kota yang memanfaatkan Analisis Dampak Kependudukan sebagai pendukung kebijakan Pembangunan berwawasan kependudukan	95
		10	Jumlah pembinaan implementasi pendidikan kependudukan di Tk. Provinsi dan Kabupaten/Kota (formal, non formal, informal)	3 Model (terdiri dari 1 formal, 1 non formal, 1 informal)
		11	Jumlah Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi Bidang Pengendalian Penduduk	1
Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Provinsi				
		12	Cakupan pembinaan kesetiaan ber-KB dan peningkatan kualitas pelayanan KB yang sesuai dengan standarisasi pelayanan KB diseluruh tingkatan wilayah	100,00
		13	Jumlah pergerakan pelayanan KB MKJP	17.355
		14	Jumlah pergerakan pelayanan KB dan KR di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan terluar (DTPK), wilayah mistin perkotaan dan sasaran khusus	3 frek/th/kab
		15	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	85,00
		16	Persentase Faskes yang melakukan promosi dan konseling Kesehatan dan hak-hak Reproduksi di Provinsi dan Kab/Kota	85,00
		17	Jumlah Pembinaan, Monitoring, evaluasi dan Fasilitas kegiatan Bidang KBKR di Kabupaten dan Kota	1
Ketahanan Keluarga dan Pemberdayaan Keluarga Provinsi				
		18	Pembinaan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga diseluruh tingkatan wilayah	1 Provinsi dan 15 Kab/Kota
		19	Jumlah pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi kebijakan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (Pembangunan Keluarga) diseluruh tingkatan wilayah	1 Provinsi dan 15 Kab/Kota
		20	Persentase Kabupaten/Kota yang mengembangkan kegiatan BKB Holistic Integrative	100,00

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019
		21	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pembinaan Genre (PIK-R/M dan BKR)	100,00
		22	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan pembinaan BKL	100,00
		23	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan pembinaan PEK dan pembentukan kelompok UPPKS	100,00
		24	Jumlah Pembinaan, Monitoring, evaluasi dan Fasilitasi kegiatan Bidang KSPK	1
Advokasi, Penggerakan dan Informasi Provinsi				
		25	Persentase Stakeholders/mitra kerja dan masyarakat diseluruh tingkatan wilayah yang mendapat Pembinaan Advokasi dan KIE program KKBPK	80,00
		26	Jumlah Pembinaan dan sosialisasi kebijakan, strategi dan materi advokasi dan KIE pembangunan KKBPK	1
		27	Jumlah Penayangan informasi KKBPK melalui berbagai media cetak dan elektronik, media luar ruang dan seni dan budaya/tradisional	5 Media
		28	Jumlah Pembinaan mekanisme operasional dalam penguatan pelayanan dasar masyarakat	15
		29	Jumlah wilayah yang mendapatkan dukungan pendampingan semitrans dalam pembangunan KKB diseluruh tingkatan wilayah	1 Provinsi dan 15 Kab/Kota
		30	Persentase kesertaan stakeholder dan mitra kerja dalam implementasi program KKBPK	100,00
		31	Pengelolaan Data dan informasi program KKBPK di Provinsi	2
		32	Jumlah pengelolaan data dan informasi program KKBPK di provinsi	1
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya				
8	Terselenggaranya Dukungan Manajemen dalam pengelolaan Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Provinsi			
Dukungan Kegiatan Manajemen/Sekretariat Provinsi				
		33	Dukungan Manajemen di Provinsi (termasuk gaji/001 dan pemeliharaan rutin/002)	13 bulan 1 Provinsi
		34	Persentase ketepatan Pembayaran Gaji dan uang makan Pegawai (Perwakilan BKKBN Provinsi)	100,00
		35	Jumlah penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran	12
		36	Jumlah penyelenggaraan Manajemen di Provinsi (Keuangan dan BMN, Perencanaan, Kepegawaian, Umum, dan Orisla)	12
		37	Persentase pengadaan sarana prasarana sesuai Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK)	100,00
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur				
9	Terwujudnya akuntabilitas pelaksanaan pengawasan lainnya di provinsi			
V Pengawasan Provinsi				
		38	Jumlah pelaksanaan pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparaturnya di provinsi	1
		39	Jumlah peningkatan pelaksanaan pengawasan lainnya dan penerapan ZI WBK	1
Program Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan serta Kerjasama Internasional				
10	Terselenggaranya kegiatan pelatihan, penelitian dan pengembangan di Provinsi			
VI Pelatihan Pengembangan Provinsi				
		40	Jumlah SDM provinsi (SDM Aparatur dan tenaga Fungsional, termasuk Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana -PLKB/PKB) yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan kapasitas	251
		41	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan SDM (SDM Aparatur dan tenaga Fungsional)	1
VII Penelitian dan Pengembangan Provinsi				
		42	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan program KKBPK di Provinsi yang dimanfaatkan	3 Dokumen penelitian (KKBPK dan RPJMN) / Prov
		43	Jumlah hasil-hasil penelitian dan pengembangan program KKBPK (KKB) yang dimanfaatkan	3

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019
C PROYEK PRIORITAS NASIONAL (PRO PN)				
11	Tersedianya Alokasi di Fasilitas Kesehatan	44	Pemenuhan Ketersediaan Alokasi di Fasilitas	430
12	Tersedianya promosi dan konseling kesehatan reproduksi melalui Kelompok Kegiatan	45	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi melalui Kelompok Kegiatan	2.168
13	Meningkatnya pengetahuan keluarga yang memiliki Baduta tertang 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	46	Keluarga yang Memiliki Baduta Terpapar 1000 HPK	88.226
14	Meningkatnya pengetahuan Remaja Putri sebagai calon ibu tentang edukasi Kespro dan Gizi melalui peran Pusat Informasi Konseling (PIK) Remaja dan Bina Ketahanan Remaja (BKR)	47	Penguatan Peran PIK Remaja dan BKR dalam Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu	1.044
D INDIKATOR STRATEGIS DI LUAR RENSTRA				
15	Tersedianya penetapan BMN berdasarkan status penggunaannya	48	Persentase BMN yang telah ditetapkan status penggunaannya	100,00
16	Meningkatnya akuntabilitas kinerja program dan anggaran	49	Level maturitas penilaian mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3.0 (Level 1-5)
17	Meningkatnya pengelolaan Kampung KB melalui Kelompok Kerja (POKJA) Kampung KB	50	Persentase Kampung KB yang telah memiliki Kelompok Kerja (POKJA) Kampung KB	65,00
18	Terbentuknya Kampung KB Percontohan Tingkat Kabupaten dan Kota	51	Jumlah Kampung KB Percontohan Tingkat Kabupaten dan Kota	16
19	Tersedianya Pembinaan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Komprehensif di Kecamatan oleh Kabupaten dan Kota	52	Persentase Kabupaten dan Kota yang melaksanakan Pembinaan PPKS secara Komprehensif di Kecamatan	50,00
20	Terdapatnya Kepala Keluarga (KK) dalam Pendataan Keluarga	53	Persentase Kepala Keluarga (KK) terdapat dalam Pendataan Keluarga	88,00
21	Meningkatnya cakupan potensi Faskes dan Poktan yang terregistrasi dalam database SIGA	54	Persentase cakupan potensi Faskes dan Poktan yang terregistrasi dalam database SIGA	50,00
22	Meningkatnya kualitas SDM Aparatur sesuai dengan kompetensinya	55	Persentase pata kompetensi PNS	60,00
		56	Tingkat internalisasi budaya kerja CETAK TEGAS yang dimiliki oleh PNS di BKKBN Provinsi	3.0 (Skala 1-5)

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN/BIDANG/OUTPUT	ANGGARAN (Rp)
1	Pengelolaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga Provinsi Lampung	1 Pengendalian Penduduk Provinsi	1.290.197.000
		2 Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Provinsi	4.026.682.000
		3 Ketahanan Keluarga dan Pemberdayaan Keluarga Provinsi	2.945.490.000
		4 Advokasi, Penggerakan dan Informasi Provinsi	9.265.912.000
		5 Dukungan Kegiatan Manajemen/Sekretariat Provinsi	89.771.452.000
		6 Pengawasan Provinsi	68.810.000
		7 Pelatihan Pengembangan Provinsi	1.430.204.000
		8 Penelitian dan Pengembangan Provinsi	841.865.000
2	Proyek Prioritas Nasional	9 Pemenuhan Ketersediaan Alokasi di Fasilitas	66.817.303.000
		10 Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi melalui Kelompok Kegiatan	126.500.000
		11 Keluarga yang Memiliki Baduta Terpapar 1000 HPK	900.000.000
		12 Penguatan Peran PIK Remaja dan BKR dalam Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu	1.691.972.000
		TOTAL ANGGARAN	179.278.387.000

Kepala Badan Kependudukan
Dan Keluarga Berencana Nasional,

Surabaya, 16 September 2019
Kepala Perwakilan BKKBN
Provinsi Lampung,


Hasto Wardoyo


Ulentina Meli



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aan Jumhana Mulyana
Jabatan : Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Banten

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Hasto Wardoyo
Jabatan : Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Surabaya, 16 September 2019

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Hasto Wardoyo

Aan Jumhana Mulyana



PERWAKILAN BKKBN PROVINSI BANTEN

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019
A INDIKATOR SASARAN STRATEGIS				
1	Menurunnya angka kelahiran total (TFR)	1	Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) per WUS (15-49 tahun)	2,27
2	Meningkatnya prevalensi kontrasepsi modern (mCPR)	2	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (modern contraceptive prevalence rate/mCPR)	62,16
3	Menurunnya tingkat putus pakai kontrasepsi	3	Persentase penurunan angka ketidakberlangsungan pemakaian (tingkat putus pakai) kontrasepsi	24,60
4	Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmetneed)	4	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	10,15
5	Meningkatnya peserta KB Aktif yang menggunakan MKJP	5	Persentase Peserta KB Aktif MKJP	12,96
6	Meningkatnya peserta KB Aktif tambahan	6	Jumlah Peserta KB Aktif tambahan (Additional User)	13.513
B INDIKATOR KINERJA RENSTRA				
Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga				
7	Terlaksananya Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga diseluruh tingkatan wilayah			
Pengendalian Penduduk Provinsi				
	7	Jumlah cakupan sinkronisasi (penyeragaman) kebijakan pembangunan daerah dengan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk diseluruh tingkatan wilayah	100% (8 Kab/Kota)	
	8	Persentase Kab/Kota yang mengimplementasikan kebijakan dan strategi pengendalian penduduk (Grand Design, Profil/parameter dan Proyeksi Penduduk)	100,00	
	9	Jumlah Kabupaten/Kota yang memanfaatkan Analisis Dampak Kependudukan sebagai pendukung kebijakan Pembangunan berwawasan kependudukan	88	
	10	Jumlah pembinaan implementasi pendidikan kependudukan di Tk. Provinsi dan Kabupaten/Kota (formal, non formal, informal)	3 Model (terdiri dari 1 formal, 1 non formal, 1 informal)	
	11	Jumlah Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi Bidang Pengendalian Penduduk	1	
Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Provinsi				
	12	Cakupan pembinaan kesetaraan ber-KB dan peningkatan kualitas pelayanan KB yang sesuai dengan standarisasi pelayanan KB diseluruh tingkatan wilayah	100,00	
	13	Jumlah pergerakan pelayanan KB MKJP	13,177	
	14	Jumlah penggerak pelayanan KB dan KR di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan terluar (DTPK), wilayah miskin perkotaan dan sasaran khusus	3 freth/kab	
	15	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	85,00	
	16	Persentase Faskes yang melakukan promosi dan konseling Kesehatan dan hak-hak Reproduksi di Provinsi dan Kab/Kota	85,00	
	17	Jumlah Pembinaan, Monitoring, evaluasi dan Fasilitasi kegiatan Bidang KBKR di Kabupaten dan Kota	1	
Kelahanan Keluarga dan Pemberdayaan Keluarga Provinsi				
	18	Pembinaan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga diseluruh tingkatan wilayah	1 Provinsi dan 8 Kab/Kota	
	19	Jumlah pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi kebijakan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (Pembangunan Keluarga) diseluruh tingkatan wilayah	1 Provinsi dan 8 Kab/Kota	
	20	Persentase Kabupaten/Kota yang mengembangkan kegiatan BKB Holistic Integrative	100,00	

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019
		21	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pembinaan Genre (PK-R/M dan BKR)	100,00
		22	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan pembinaan BKL	100,00
		23	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan pembinaan PEK dan pembentukan kelompok UPPKS	100,00
		24	Jumlah Pembinaan, Monitoring, evaluasi dan Fasilitasi kegiatan Bidang KSPK	1
Advokasi, Penggerakan dan Informasi Provinsi				
		25	Persentase Stakeholders/mitra kerja dan masyarakat di seluruh tingkatan wilayah yang mendapat Pembinaan Advokasi dan KIE program KKBPK	80,00
		26	Jumlah Pembinaan dan sosialisasi kebijakan, strategi dan materi advokasi dan KIE pembangunan KKBPK	1
		27	Jumlah Penayangan informasi KKBPK melalui berbagai media cetak dan elektronik, media luar ruang dan seni dan budaya/tradisional	5 Media
		28	Jumlah Pembinaan mekanisme operasional dalam penguatan pelayanan dasar masyarakat	8
		29	Jumlah wilayah yang mendapatkan dukungan pendampingan kemitraan dalam pembangunan KKB di seluruh tingkatan wilayah	1 Provinsi dan 8 Kab/Kota
		30	Persentase kesertaan stakeholder dan mitra kerja dalam implementasi program KKBPK	100,00
		31	Pengelolaan Data dan informasi program KKBPK di Provinsi	2
		32	Jumlah pengelolaan data dan informasi program KKBPK di provinsi	1
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya				
8	Terseenggaranya Dukungan Manajemen dalam pengelolaan Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Provinsi			
Dukungan Kegiatan Manajemen/Sekretariat Provinsi				
		33	Dukungan Manajemen di Provinsi (termasuk gaji/001 dan pemeliharaan rutin/002)	13 bulan 1 Provinsi
		34	Persentase ketepatan Pembayaran Gaji dan uang makan Pegawai (Perwakilan BKKBN Provinsi)	100,00
		35	Jumlah penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran	12
		36	Jumlah penyelenggaraan Manajemen di Provinsi (Keuangan dan BMN, Perencanaan, Kepegawaian, Umum, dan Orfide)	12
		37	Persentase pengadaan sarana prasarana sesuai Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK)	100,00
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur				
9	Terwujudnya akuntabilitas pelaksanaan pengawasan lainnya di provinsi			
V Pengawasan Provinsi				
		38	Jumlah pelaksanaan pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur di provinsi	1
		39	Jumlah peningkatan pelaksanaan pengawasan lainnya dan penerapan Zi WBK	1
Program Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan serta Kerjasama Internasional				
10	Terdenggaranya kegiatan pelatihan, penelitian dan pengembangan di Provinsi			
VI Pelatihan Pengembangan Provinsi				
		40	Jumlah SDM provinsi (SDM Aparatur dan tenaga Fungsional, termasuk Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana -PLKB/PKB) yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan kapasitas	83
		41	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan SDM (SDM Aparatur dan tenaga Fungsional)	1
VII Penelitian dan Pengembangan Provinsi				
		42	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan program KKBPK di Provinsi yang dimanfaatkan	3 Dokumen penelitian (KKBPK dan RPJMN) / Prov
		43	Jumlah hasil-hasil penelitian dan pengembangan program KKBPK (KKB) yang dimanfaatkan	3

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019
C. PROYEK PRIORITAS NASIONAL (PRO PN)				
11	Tersedianya Alokasi di Fasilitas Kesehatan	44	Pemenuhan Ketersediaan Alokasi di Fasilitas	514
12	Terlaksananya promosi dan konseling kesehatan reproduksi melalui Kelompok Kegiatan	45	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi melalui Kelompok Kegiatan	1.096
13	Meningkatnya pengetahuan keluarga yang memiliki Bidan terlatih 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	46	Keluarga yang Memiliki Bidan Terlatih 1000 HPK	60.644
14	Meningkatnya pengetahuan Remaja Putri sebagai calon ibu tentang edukasi Kespro dan Gizi melalui peran Pusat Informasi Konseling (PIK) Remaja dan Bina Kemandirian Remaja (BKR)	47	Penguatan Peran PIK Remaja dan BKR dalam Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu	434
D. INDIKATOR STRATEGIS DI LUAR RENSTRA				
15	Terlaksananya penetapan BMN berdasarkan status penggunaannya	48	Persentase BMN yang telah ditetapkan status penggunaannya	100,00
16	Meningkatnya akuntabilitas kinerja program dan anggaran	49	Level maturitas penilaian mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3,0 (Level 1-5)
17	Meningkatnya pengelolaan Kampung KB melalui Kelompok Kerja (POKJA) Kampung KB	50	Persentase Kampung KB yang telah memiliki Kelompok Kerja (POKJA) Kampung KB	65,00
18	Terbentuknya Kampung KB Percontohan Tingkat Kabupaten dan Kota	51	Jumlah Kampung KB Percontohan Tingkat Kabupaten dan Kota	8
19	Terlaksananya Pembinaan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Komprehensif di Kecamatan oleh Kabupaten dan Kota	52	Persentase Kabupaten dan Kota yang melaksanakan Pembinaan PPKS secara Komprehensif di Kecamatan	50,00
20	Terdapatnya Kepala Keluarga (KK) dalam Pendataan Keluarga	53	Persentase Kepala Keluarga (KK) terdapat dalam Pendataan Keluarga	92,00
21	Meningkatnya cakupan potensi Faskes dan Pektan yang terregistrasi dalam database SIGA	54	Persentase cakupan potensi Faskes dan Pektan yang terregistrasi dalam database SIGA	50,00
22	Meningkatnya kualitas SDM Aparatur sesuai dengan kompetensinya	55	Persentase peta kompetensi PNS	60,00
		56	Tingkat internalisasi budaya kerja CETAK TEGAS yang dimiliki oleh PNS di BKKBN Provinsi	3,0 (Skala 1-5)

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN/BIDANG/OUTPUT	ANGGARAN (Rp)
1	Pengelolaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga Provinsi Banten	1. Pengendalian Penduduk Provinsi	1.055.112.000
		2. Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Provinsi	2.670.702.000
		3. Ketahanan Keluarga dan Pemberdayaan Keluarga Provinsi	4.622.340.000
		4. Advokasi, Penggerakan dan Informasi Provinsi	12.653.874.000
		5. Dukungan Kegiatan Manajemen/Sekretariat Provinsi	22.989.755.000
		6. Pengawasan Provinsi	60.000.000
		7. Pelatihan Pengembangan Provinsi	752.998.000
		8. Penelitian dan Pengembangan Provinsi	1.189.905.000
2	Proyek Prioritas Nasional	9. Pemenuhan Ketersediaan Alokasi di Fasilitas	18.445.951.000
		10. Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi melalui Kelompok Kegiatan	114.500.000
		11. Keluarga yang Memiliki Bidan Terlatih 1000 HPK	520.000.000
		12. Penguatan Peran PIK Remaja dan BKR dalam Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu	1.345.246.000
		TOTAL ANGGARAN	67.300.384.000

Kepala Badan Kependudukan
Dan Keluarga Berencana Nasional,

Surabaya, 16 September 2019
Kepala Perwakilan BKKBN
Provinsi Banten,


Hasto Wardoyo


Aan Jumhana Mulyana



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tuty Kusumawati
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian
Penduduk Provinsi DKI Jakarta

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Hasto Wardoyo
Jabatan : Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Surabaya, 16 September 2019

Pihak Pertama, *x*

Hasto Wardoyo

Tuty Kusumawati



DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PENGENDALIAN PENDUDUK PROVINSI DKI JAKARTA

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019
A INDIKATOR SASARAN STRATEGIS				
1	Menurunnya angka kelahiran total (TFR)	1	Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) per WUS (15-49 tahun)	2,18
2	Meningkatnya prevalensi kontrasepsi modern (mCPR)	2	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (modern contraceptive prevalence rate/mCPR)	55,48
3	Menurunnya tingkat putus pakai kontrasepsi	3	Persentase penurunan angka ketidakberlangsungan pemakaian (tingkat putus pakai) kontrasepsi	24,60
4	Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmetneed)	4	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	16,86
5	Meningkatnya peserta KB Aktif yang menggunakan MKJP	5	Persentase Peserta KB Aktif MKJP	31,31
6	Meningkatnya peserta KB Aktif tambahan	6	Jumlah Peserta KB Aktif tambahan (Additional User)	7.862
B INDIKATOR KINERJA RENSTRA				
Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga				
7	Terlaksananya Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga diseluruh tingkatan wilayah			
Pengendalian Penduduk Provinsi				
		7	Jumlah cakupan sinkronisasi (penyeragaman) kebijakan pembangunan daerah dengan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk diseluruh tingkatan wilayah	1
		8	Persentase Kab/Kota yang mengimplementasikan kebijakan dan strategi pengendalian penduduk (Grand Design, Profilparameter dan Proyeksi Penduduk)	100,00
		9	Jumlah Kabupaten/Kota yang memanfaatkan Analisis Dampak Kependudukan sebagai pendukung kebijakan Pembangunan berwawasan kependudukan	31
		10	Jumlah pembinaan implementasi pendidikan kependudukan di Tk. Provinsi dan Kabupaten/Kota (formal, non formal, informal)	3 Model (terdiri dari 1 formal, 1 non formal, 1 informal)
		11	Jumlah Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi Bidang Pengendalian Penduduk	1
Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Provinsi				
		12	Cakupan pembinaan kesetaraan ber-KB dan peningkatan kualitas pelayanan KB yang sesuai dengan standarisasi pelayanan KB diseluruh tingkatan wilayah	100,00
		13	Jumlah pergerakan pelayanan KB MKJP	13.794
		14	Jumlah pergerakan pelayanan KB dan KR di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan terluar (DTPK), wilayah miskin perkotaan dan sasaran khusus	3 frek/th/kab
		15	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	85,00
		16	Persentase Faskes yang melakukan promosi dan konseling Kesehatan dan hak-hak Reproduksi di Provinsi dan Kab/Kota	85,00
		17	Jumlah Pembinaan, Monitoring, evaluasi dan Fasilitasi kegiatan Bidang KBKR di Kabupaten dan Kota	1
Ketahanan Keluarga dan Pemberdayaan Keluarga Provinsi				
		18	Pembinaan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga diseluruh tingkatan wilayah	1 Provinsi dan 6 Kab/Kota
		19	Jumlah pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi kebijakan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (Pembangunan Keluarga) diseluruh tingkatan wilayah	1 Provinsi dan 6 Kab/Kota
		20	Persentase Kabupaten/Kota yang mengembangkan kegiatan BKB Holistic Integrative	100,00

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019
		21	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pembinaan Genre (FIK-R/M dan BKR)	100,00
		22	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan pembinaan BKL	100,00
		23	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan pembinaan PEK dan pembentukan kelompok UPPKS	100,00
		24	Jumlah Pembinaan, Monitoring, evaluasi dan Fasilitasi kegiatan Bidang KSPK	1
Advokasi, Penggerakan dan Informasi Provinsi				
		25	Persentase Stakeholders/mitra kerja dan masyarakat diseluruh tingkatan wilayah yang mendapat Pembinaan Advokasi dan KIE program KKBPK	80,00
		26	Jumlah Pembinaan dan sosialisasi kebijakan, strategi dan materi advokasi dan KIE pembangunan KKBPK	1
		27	Jumlah Penayangan Informasi KKBPK melalui berbagai media cetak dan elektronik, media luar ruang dan seni dan budaya/tradisional	5 Media
		28	Jumlah Pembinaan mekanisme operasional dalam pengujian pelayanan dasar masyarakat	6
		29	Jumlah wilayah yang mendapatkan dukungan pendampingan kemiripan dalam pembangunan KKB diseluruh tingkatan wilayah	1 Provinsi dan 6 Kab/Kota
		30	Persentase kesertasan stakeholder dan mitra kerja dalam implementasi program KKBPK	100,00
		31	Pengelolaan Data dan Informasi program KKBPK di Provinsi	2
		32	Jumlah pengelolaan data dan informasi program KKBPK di provinsi	1
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya				
8	Terselenggaranya Dukungan Manajemen dalam pengelolaan Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Provinsi			
Dukungan Kegiatan Manajemen/Sekretariat Provinsi				
		33	Dukungan Manajemen di Provinsi (termasuk gaji/001 dan pemeliharaan rutin/002)	
		34	Persentase ketepatan Pembayaran Gaji dan uang makan Pegawai (Perwakilan BKKBN Provinsi)	
		35	Jumlah penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran	
		36	Jumlah penyelenggaraan Manajemen di Provinsi (Keuangan dan BMN, Perencanaan, Kepegawaian, Umum, dan Ortala)	12
		37	Persentase pengadaan sarana prasarana sesuai Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK)	
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur				
9	Terwujudnya akuntabilitas pelaksanaan pengawasan lainnya di provinsi			
V Pengawasan Provinsi				
		38	Jumlah pelaksanaan pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur di provinsi	1
		39	Jumlah peningkatan pelaksanaan pengawasan lainnya dan penerapan ZI WBK	1
Program Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan serta Kerjasama Internasional				
10	Terselenggaranya kegiatan pelatihan, penelitian dan pengembangan di Provinsi			
VI Pelatihan Pengembangan Provinsi				
		40	Jumlah SDM provinsi (SDM Aparatur dan tenaga Fungsional, termasuk Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana -PLKB/PKB) yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan kapasitas	44
		41	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan SDM (SDM Aparatur dan tenaga Fungsional)	1
VII Penelitian dan Pengembangan Provinsi				
		42	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan program KKBPK di Provinsi yang dimanfaatkan	3 Dokumen penelitian (KKBPK dan RPJMN) / Prov
		43	Jumlah hasil-hasil penelitian dan pengembangan program KKBPK (KKB) yang dimanfaatkan	3

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019
C PROYEK PRIORITAS NASIONAL (PRO PN)				
11	Tersedianya Alokasi di Fasilitas Kesehatan	44	Pemenuhan Ketersediaan Alokasi di Fasilitas	529
12	Tersedianya promosi dan konseling kesehatan reproduksi melalui Kelompok Kegiatan	46	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi melalui Kelompok Kegiatan	1.161
13	Meningkatnya pengetahuan keluarga yang memiliki Bidan tentang 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	46	Keluarga yang Memiliki Bidan Terpapar 1000 HPK	683
14	Meningkatnya pengetahuan Remaja Putri sebagai calon ibu tentang edukasi Kespro dan Gizi melalui peran Pusat Informasi Konseling (PIK) Remaja dan Bina Ketahanan Remaja (BKR)	47	Penguatan Peran PIK Remaja dan BKR dalam Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu	333
D INDIKATOR STRATEGIS DI LUAR RENSTRA				
15	Tersedianya penetapan BMN berdasarkan status penggunaannya	48	Persentase BMN yang telah ditetapkan status penggunaannya	100,00
16	Meningkatnya akuntabilitas kinerja program dan anggaran	49	Level maturitas penilaian mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3.0 (Level 1-5)
17	Meningkatnya pengelolaan Kampung KB melalui Kelompok Kerja (POKJA) Kampung KB	50	Persentase Kampung KB yang telah memiliki Kelompok Kerja (POKJA) Kampung KB	65,00
18	Terbentuknya Kampung KB Percontohan Tingkat Kabupaten dan Kota	51	Jumlah Kampung KB Percontohan Tingkat Kabupaten dan Kota	6
19	Tersedianya Pembinaan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Komprehensif di Kecamatan oleh Kabupaten dan Kota	52	Persentase Kabupaten dan Kota yang melaksanakan Pembinaan PPKS secara Komprehensif di Kecamatan	50,00
20	Tersedianya Kepala Keluarga (KK) dalam Pendataan Keluarga	53	Persentase Kepala Keluarga (KK) terdapat dalam Pendataan Keluarga	90,00
21	Meningkatnya cakupan potensi Fasilitas dan Poktan yang terregistrasi dalam database SIGA	54	Persentase cakupan potensi Fasilitas dan Poktan yang terregistrasi dalam database SIGA	50,00
22	Meningkatnya kualitas SDM Aparatur sesuai dengan kompetensinya	55	Persentase peta kompetensi PNS	
		56	Tingkat internalisasi budaya kerja CETAK TEGAS yang dimiliki oleh PNS di BKKBN Provinsi	

NO	KEGIATAN	SUB-KEGIATAN/BIDANG/OUTPUT	ANGGARAN (Rp)
1	Pengelolaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga Provinsi DKI Jakarta	1. Pengendalian Penduduk Provinsi	611.512.000
		2. Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Provinsi	2.689.062.000
		3. Ketahanan Keluarga dan Pemberdayaan Keluarga Provinsi	1.617.424.000
		4. Advokasi, Penggerakan dan Informasi Provinsi	6.000.546.000
		5. Dukungan Kegiatan Manajemen/Sekretariat Provinsi	1.205.000.000
		6. Pengawasan Provinsi	40.000.000
		7. Pelatihan Pengembangan Provinsi	575.480.000
		8. Penelitian dan Pengembangan Provinsi	830.168.000
2	Proyek Prioritas Nasional	9. Pemenuhan Ketersediaan Alokasi di Fasilitas	
		10. Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi melalui Kelompok Kegiatan	102.500.000
		11. Keluarga yang Memiliki Bidan Terpapar 1000 HPK	360.000.000
		12. Penguatan Peran PIK Remaja dan BKR dalam Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu	1.116.637.000
		TOTAL ANGGARAN	15.448.329.000

Kepala Badan Kependudukan
Dan Keluarga Berencana Nasional,



Hasto Wardoyo

Surabaya, 16 September 2019
Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan
Anak Dan Pengendalian Penduduk,



Tuty Kusumawati



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sukaryo Teguh Santoso
Jabatan : Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Hasto Wardoyo
Jabatan : Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Hasto Wardoyo

Surabaya, 16 September 2019

Pihak Pertama,

Sukaryo Teguh Santoso



PERWAKILAN BKKBN PROVINSI JAWA BARAT

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019
A INDIKATOR SASARAN STRATEGIS				
1	Menurunnya angka kelahiran total (TFR)	1	Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) per WUS (15-49 tahun)	2,29
2	Meningkatnya prevalensi kontrasepsi modern (mCPR)	2	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (modern contraceptive prevalence rate/mCPR)	64,25
3	Menurunnya tingkat putus pakai kontrasepsi	3	Persentase penurunan angka ketidakberlangsungan pemakaian (tingkat putus pakai) kontrasepsi	24,60
4	Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmetneed)	4	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	10,15
5	Meningkatnya peserta KB Aktif yang menggunakan MKJP	5	Persentase Peserta KB Aktif MKJP	18,58
6	Meningkatnya peserta KB Aktif tambahan	6	Jumlah Peserta KB Aktif tambahan (Additional User)	50.049
B INDIKATOR KINERJA RENSTRA				
Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga				
7	Terlaksananya Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga diseluruh tingkatan wilayah			
Pengendalian Penduduk Provinsi				
		7	Jumlah selupan sinkronisasi (penyerasan) kebijakan pembangunan daerah dengan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk diseluruh tingkatan wilayah	100% (27 Kab/Kota)
		8	Persentase Kab/Kota yang mengimplementasikan kebijakan dan strategi pengendalian penduduk (Grand Design, Profil/parameter dan Proyeksi Penduduk)	100,00
		9	Jumlah Kabupaten/Kota yang memanfaatkan Analisis Dampak Kependudukan sebagai pendukung kebijakan Pembangunan berwawasan kependudukan	301
		10	Jumlah pembinaan implementasi pendidikan kependudukan di Tk. Provinsi dan Kabupaten/Kota (formal, non formal, informal)	3 Model (terdiri dari 1 formal, 1 non formal, 1 informal)
		11	Jumlah Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi Bidang Pengendalian Penduduk	1
Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Provinsi				
		12	Cakupan pembinaan kesertaan ber-KB dan peningkatan kualitas pelayanan KB yang sesuai dengan standarisasi pelayanan KB diseluruh tingkatan wilayah	100,00
		13	Jumlah penggerakan pelayanan KB MKJP	45,100
		14	Jumlah penggerakan pelayanan KB dan KR di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan terluar (DTPK), wilayah miskin perkotaan dan sasaran khusus	3 frek/th/kab
		15	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	85,00
		16	Persentase Faskes yang melakukan promosi dan konseling Kesehatan dan hak-hak Reproduksi di Provinsi dan Kab/Kota	85,00
		17	Jumlah Pembinaan, Monitoring, evaluasi dan Fasilitasi kegiatan Bidang KBKR di Kabupaten dan Kota	1
Ketahanan Keluarga dan Pemberdayaan Keluarga Provinsi				
		18	Pembinaan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga diseluruh tingkatan wilayah	1 Provinsi dan 27 Kab/Kota
		19	Jumlah pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi kebijakan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (Pembangunan Keluarga) diseluruh tingkatan wilayah	1 Provinsi dan 27 Kab/Kota
		20	Persentase Kabupaten/Kota yang mengembangkan kegiatan BKB Holistic Integrative	100,00

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019
		21	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pembinaan Genre (PIK, R/M dan BKR)	100,00
		22	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan pembinaan BKL	100,00
		23	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan pembinaan PEK dan pembentukan kelompok UPPKS	100,00
		24	Jumlah Pembinaan, Monitoring, evaluasi dan Fasilitas kegiatan Bidang KSPK	1
Advokasi, Penggerakan dan Informasi Provinsi				
		25	Persentase Stakeholders/mitra kerja dan masyarakat diseluruh tingkatan wilayah yang mendapat Pembinaan Advokasi dan KIE program KKBPK	80,00
		26	Jumlah Pembinaan dan sosialisasi kebijakan, strategi dan materi advokasi dan KIE pembangunan KKBPK	1
		27	Jumlah Penayangan informasi KKBPK melalui berbagai media cetak dan elektronik, media luar ruang dan seni dan budaya/tradisional	5 Media
		28	Jumlah Pembinaan mekanisme operasional dalam penguatan pelayanan dasar masyarakat	27
		29	Jumlah wilayah yang mendapatkan dukungan pendampingan kemitraan dalam pembangunan KKB diseluruh tingkatan wilayah	1 Provinsi dan 27 Kab/Kota
		30	Persentase kesertaan stakeholder dan mitra kerja dalam implementasi program KKBPK	100,00
		31	Pengelolaan Data dan informasi program KKBPK di Provinsi	2
		32	Jumlah pengelolaan data dan informasi program KKBPK di provinsi	1
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya				
8	Terselenggaranya Dukungan Manajemen dalam pengelolaan Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Provinsi			
Dukungan Kegiatan Manajemen/Sekretariat Provinsi				
		33	Dukungan Manajemen di Provinsi (termasuk gaji/001 dan pemeliharaan rutin/002)	13 bulan 1 Provinsi
		34	Persentase ketepatan Pembayaran Gaji dan uang makan Pegawai (Perwakilan BKKBK Provinsi)	100,00
		35	Jumlah penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran	12
		36	Jumlah penyelenggaraan Manajemen di Provinsi (Keuangan dan BMN, Perencanaan, Kepegawaian, Umum, dan Ortala)	12
		37	Persentase pengadaan sarana prasarana sesuai Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SSSK)	100,00
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur				
9	Terwujudnya akuntabilitas pelaksanaan pengawasan lainnya di provinsi			
V Pengawasan Provinsi				
		38	Jumlah pelaksanaan pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparaturnya di provinsi	1
		39	Jumlah peningkatan pelaksanaan pengawasan lainnya dan penerapan ZI WBK	1
Program Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan serta Kerjasama Internasional				
10	Terselenggaranya kegiatan pelatihan, penelitian dan pengembangan di Provinsi			
VI Pelatihan Pengembangan Provinsi				
		40	Jumlah SDM provinsi (SDM Aparatur dan tenaga Fungsional, termasuk Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana -PLKB/PKB) yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan kapasitas	581
		41	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan SDM (SDM Aparatur dan tenaga Fungsional)	1
VII Penelitian dan Pengembangan Provinsi				
		42	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan program KKBPK di Provinsi yang dimanfaatkan	3 Dokumen penelitian (KKBPK dan RPJMN) / Prov
		43	Jumlah hasil-hasil penelitian dan pengembangan program KKBPK (KKB) yang dimanfaatkan	3

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019
C PROYEK PRIORITAS NASIONAL (PRO PN)				
11	Tersedianya Alokasi di Fasilitas Kesehatan	44	Pemenuhan Ketersediaan Alokasi di Fasilitas	2.548
12	Terlaksananya promosi dan konseling kesehatan reproduksi melalui Kelompok Kegiatan	45	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi melalui Kelompok Kegiatan	9.768
13	Meningkatnya pengetahuan keluarga yang memiliki Bidan tentang 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	46	Keluarga yang Memiliki Bidan Terpapar 1000 HPK	1.061.095
14	Meningkatnya pengetahuan Remaja Putri sebagai calon ibu tentang edukasi Kaspro dan Gizi melalui peran Pusat Informasi Konseling (PIK) Remaja dan Bina Ketahanan Remaja (BKR)	47	Penguatan Peran PIK Remaja dan BKR dalam Edukasi Kaspro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu	5.063
D INDIKATOR STRATEGIS DI LUAR RENSTRA				
15	Terlaksananya penetapan BMN berdasarkan status penggunaannya	48	Persentase BMN yang telah ditetapkan status penggunaannya	100,00
16	Meningkatnya akuntabilitas kinerja program dan anggaran	49	Level maturitas penilaian mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3,0 (Level 1-5)
17	Meningkatnya pengelolaan Kampung KB melalui Kelompok Kerja (POKJA) Kampung KB	50	Persentase Kampung KB yang telah memiliki Kelompok Kerja (POKJA) Kampung KB	65,00
18	Terbentuknya Kampung KB Percontohan Tingkat Kabupaten dan Kota	51	Jumlah Kampung KB Percontohan Tingkat Kabupaten dan Kota	27
19	Terlaksananya Pembinaan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Komprehensif di Kecamatan oleh Kabupaten dan Kota	52	Persentase Kabupaten dan Kota yang melaksanakan Pembinaan PPKS secara Komprehensif di Kecamatan	50,00
20	Terdatanya Kepala Keluarga (KK) dalam Pendataan Keluarga	53	Persentase Kepala Keluarga (KK) terdata dalam Pendataan Keluarga	100,00
21	Meningkatnya cakupan potensi Fasilitas dan Poktan yang terdaftar dalam database SIGA	54	Persentase cakupan potensi Fasilitas dan Poktan yang terdaftar dalam database SIGA	50,00
22	Meningkatnya kualitas SDM Aparatur sesuai dengan kompetensinya	55	Persentase peta kompetensi PNS	60,00
		56	Tingkat internalisasi budaya kerja CETAK TERGAS yang dimiliki oleh PNS di BKKBN Provinsi	3,0 (Skala 1-6)

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN/BIDANG/OUTPUT	ANGGARAN (Rp)
1	Pengelolaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga Provinsi Jawa Barat	1. Pengendalian Penduduk Provinsi	2.207.653.000
		2. Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Provinsi	11.420.348.000
		3. Ketahanan Keluarga dan Pemberdayaan Keluarga Provinsi	10.544.140.000
		4. Advokasi, Penggerakan dan Informasi Provinsi	34.354.742.000
		5. Dukungan Kegiatan Manajemen/Sekretariat Provinsi	183.941.584.000
		6. Pengawasan Provinsi	168.364.000
		7. Pelatihan Pengembangan Provinsi	3.004.012.000
		8. Penelitian dan Pengembangan Provinsi	1.871.650.000
2	Proyek Prioritas Nasional	9. Pemenuhan Ketersediaan Alokasi di Fasilitas	62.641.368.000
		10. Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi melalui Kelompok Kegiatan	248.400.000
		11. Keluarga yang Memiliki Bidan Terpapar 1000 HPK	1.620.000.000
		12. Penguatan Peran PIK Remaja dan BKR dalam Edukasi Kaspro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu	2.814.626.000
		TOTAL ANGGARAN	324.928.788.000

Kepala Badan Kependudukan
Dan Keluarga Berencana Nasional,


Hasto Wardoyo

Surabaya, 16 September 2019
Kepala Perwakilan BKKBN
Provinsi Jawa Barat,


Sukaryo Teguh Santoso



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wagino
Jabatan : Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Hasto Wardoyo
Jabatan : Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Hasto Wardoyo

Surabaya, 16 September 2019

Pihak Pertama,

Wagino



PERWAKILAN BKKBN PROVINSI JAWA TENGAH

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019
A. INDIKATOR SASARAN STRATEGIS				
1	Menurunnya angka kelahiran total (TFR)	1	Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) per WUS (15-49 tahun)	2,28
2	Meningkatnya prevalensi kontrasepsi modern (mCPR)	2	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (modern contraceptive prevalence rate/mCPR)	64,25
3	Menurunnya tingkat putus pakai kontrasepsi	3	Persentase penurunan angka ketidakberlangsungan pemakaian (tingkat putus pakai) kontrasepsi	24,60
4	Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet need)	4	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	7,67
5	Meningkatnya peserta KB Aktif yang menggunakan MKJP	5	Persentase Peserta KB Aktif MKJP	29,04
6	Meningkatnya peserta KB Aktif tambahan	6	Jumlah Peserta KB Aktif tambahan (Additional User)	28.738
B. INDIKATOR KINERJA RENSTRA				
Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga				
7	Terlaksananya Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga diseluruh tingkatan wilayah			
Pengendalian Penduduk Provinsi				
		7	Jumlah cakupan sinkronisasi (penyerasian) kebijakan pembangunan daerah dengan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk diseluruh tingkatan wilayah	100% (35 Kab/Kota)
		8	Persentase Kab/Kota yang mengimplementasikan kebijakan dan strategi pengendalian penduduk (Grand Design, Profil/parameter dan Proyeksi Penduduk)	100,00
		9	Jumlah Kabupaten/Kota yang memanfaatkan Analisis Dampak Kependudukan sebagai pendukung kebijakan Pembangunan berwawasan kependudukan	332
		10	Jumlah pembinaan implementasi pendidikan kependudukan di Tk. Provinsi dan Kabupaten/Kota (formal, non formal, informal)	3 Model (terdiri dari 1 formal, 1 non formal, 1 informal)
		11	Jumlah Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi Bidang Pengendalian Penduduk	1
Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Provinsi				
		12	Cakupan pembinaan kecertaan ber-KB dan peningkatan kualitas pelayanan KB yang sesuai dengan standarisasi pelayanan KB diseluruh tingkatan wilayah	100,00
		13	Jumlah pergerakan pelayanan KB MKJP	38.726
		14	Jumlah pergerakan pelayanan KB dan KR di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan terluar (DTPK), wilayah miskin perkotaan dan sasaran khusus	3 frek/th/kab
		15	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	85,00
		16	Persentase Faskes yang melakukan promosi dan konseling Kesehatan dan hak-hak Reproduksi di Provinsi dan Kab/Kota	85,00
		17	Jumlah Pembinaan, Monitoring, evaluasi dan Fasilitasi kegiatan Bidang KBKR di Kabupaten dan Kota	1
Ketahanan Keluarga dan Pemberdayaan Keluarga Provinsi				
		18	Pembinaan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga diseluruh tingkatan wilayah	1 Provinsi dan 35 Kab/Kota
		19	Jumlah pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi kebijakan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (Pembangunan Keluarga) diseluruh tingkatan wilayah	1 Provinsi dan 35 Kab/Kota
		20	Persentase Kabupaten/Kota yang mengembangkan kegiatan BKB Holistic Integrative	100,00

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019
		21	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pembinaan Genre (PK-RM dan BKR)	100,00
		22	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan pembinaan BKL	100,00
		23	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan pembinaan PEK dan pembentukan kelompok UPPKS	100,00
		24	Jumlah Pembinaan, Monitoring, evaluasi dan Fasilitasi kegiatan Bidang KSPK	1
Advokasi, Penggerakan dan Informasi Provinsi				
		25	Persentase Stakeholders/mitra kerja dan masyarakat diseluruh lingkaran wilayah yang mendapat Pembinaan Advokasi dan KIE program KKBPK	80,00
		26	Jumlah Pembinaan dan sosialisasi kebijakan, strategi dan materi advokasi dan KIE pembangunan KKBPK	1
		27	Jumlah Penayangan informasi KKBPK melalui berbagai media cetak dan elektronik, media luar ruang dan seni dan budaya/tradisional	5 Media
		28	Jumlah Pembinaan mekanisme operasional dalam penguatan pelayanan dasar masyarakat	35
		29	Jumlah wilayah yang mendapatkan dukungan pendampingan kemitraan dalam pembangunan KKB diseluruh lingkaran wilayah	1 Provinsi dan 35 Kab/Kota
		30	Persentase kesertaan stakeholder dan mitra kerja dalam implementasi program KKBPK	100,00
		31	Pengelolaan Data dan Informasi program KKBPK di Provinsi	2
		32	Jumlah pengelolaan data dan informasi program KKBPK di provinsi	1
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya				
8	Terselenggaranya Dukungan Manajemen dalam pengelolaan Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Provinsi			
Dukungan Kegiatan Manajemen/Sekretariat Provinsi				
		33	Dukungan Manajemen di Provinsi (termasuk gaji/001 dan pemeliharaan rutin/002)	13 bulan 1 Provinsi
		34	Persentase ketepatan Pembayaran Gaji dan uang makan Pegawai (Penarikan BKKBN Provinsi)	100,00
		35	Jumlah penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran	12
		36	Jumlah penyelenggaraan Manajemen di Provinsi (Keuangan dan BMN, Perencanaan, Kepegawaian, Umum, dan Ortala)	12
		37	Persentase pengadaan sarana prasarana sesuai Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK)	100,00
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur				
9	Terwujudnya akuntabilitas pelaksanaan pengawasan lainnya di provinsi			
V Pengawasan Provinsi				
		38	Jumlah pelaksanaan pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur di provinsi	1
		39	Jumlah peningkatan pelaksanaan pengawasan lainnya dan penerapan ZI WBK	1
Program Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan serta Kerjasama Internasional				
10	Terselenggaranya kegiatan pelatihan, penelitian dan pengembangan di Provinsi			
VI Pelatihan Pengembangan Provinsi				
		40	Jumlah SDM provinsi (SDM Aparatur dan tenaga Fungsional, termasuk Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana -PLKB/PKB) yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan kapasitas	596
		41	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan SDM (SDM Aparatur dan tenaga Fungsional)	1
VII Penelitian dan Pengembangan Provinsi				
		42	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan program KKBPK di Provinsi yang dimanfaatkan	3 Dokumen penelitian (KKBPK dan RPJMN) / Prov
		43	Jumlah hasil-hasil penelitian dan pengembangan program KKBPK (KKB) yang dimanfaatkan	3

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019
C. PROYEK PRIORITAS NASIONAL (PRO PN)				
11	Tersedianya Alokasi di Fasilitas Kesehatan	44	Pemenuhan Ketersediaan Alokasi di Fasilitas	1.702
12	Tertindakannya promosi dan konseling kesehatan reproduksi melalui Kelompok Kegiatan	45	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi melalui Kelompok Kegiatan	18.021
13	Meningkatnya pengetahuan keluarga yang memiliki Baduta tertang 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	46	Keluarga yang Memiliki Baduta Terpapar 1000 HPK	445.547
14	Meningkatnya pengetahuan Remaja Putri sebagai calon ibu tentang edukasi Kespro dan Gizi melalui peran Pusat Informasi Konseling (PIK) Remaja dan Bina Ketahanan Remaja (BKR)	47	Penguatan Peran PIK Remaja dan BKR dalam Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu	3.318
D. INDIKATOR STRATEGIS DI LUAR RENSTRA				
15	Tertindakannya penetapan BMN berdasarkan status penggunaannya	48	Persentase BMN yang telah ditetapkan status penggunaannya	100,00
16	Meningkatnya akuntabilitas kinerja program dan anggaran	49	Level maturitas penilaian mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3,0 (Level 1-5)
17	Meningkatnya pengelolaan Kampung KB melalui Kelompok Kerja (POKJA) Kampung KB	50	Persentase Kampung KB yang telah memiliki Kelompok Kerja (POKJA) Kampung KB	65,00
18	Terbentuknya Kampung KB Percontohan Tingkat Kabupaten dan Kota	51	Jumlah Kampung KB Percontohan Tingkat Kabupaten dan Kota	36
19	Tertindakannya Pembinaan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Komprehensif di Kecamatan oleh Kabupaten dan Kota	52	Persentase Kabupaten dan Kota yang melaksanakan Pembinaan PPKS secara Komprehensif di Kecamatan	50,00
20	Terdapatnya Kepala Keluarga (KK) dalam Pendataan Keluarga	53	Persentase Kepala Keluarga (KK) terdata dalam Pendataan Keluarga	100,00
21	Meningkatnya cakupan potensi Fasilitas dan Poktan yang terregistrasi dalam database SIGA	54	Persentase cakupan potensi Fasilitas dan Poktan yang terregistrasi dalam database SIGA	50,00
22	Meningkatnya kualitas SDM Aparatur sesuai dengan kompetensinya	55	Persentase peta kompetensi PNS	60,00
		56	Tingkat internalisasi budaya kerja CETAK TEGAS yang dimiliki oleh PNS di BKKBN Provinsi	3,0 (Skala 1-5)

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN/BIDANG/OUTPUT	ANGGARAN (Rp)
1	Pengelolaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga Provinsi Jawa Tengah	1. Pengendalian Penduduk Provinsi	2.229.138.000
		2. Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Provinsi	9.578.369.000
		3. Ketahanan Keluarga dan Pemberdayaan Keluarga Provinsi	6.979.631.000
		4. Advokasi, Penggerakan dan Informasi Provinsi	25.420.030.000
		5. Dukungan Kegiatan Manajemen/Sekretariat Provinsi	256.244.650.000
		6. Pengawasan Provinsi	179.560.000
		7. Pelatihan Pengembangan Provinsi	3.017.904.000
		8. Penelitian dan Pengembangan Provinsi	2.075.061.000
2	Proyek Prioritas Nasional	9. Pemenuhan Ketersediaan Alokasi di Fasilitas	47.567.619.000
		10. Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi melalui Kelompok Kegiatan	235.000.000
		11. Keluarga yang Memiliki Baduta Terpapar 1000 HPK	1.682.500.000
		12. Penguatan Peran PIK Remaja dan BKR dalam Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu	3.054.733.000
		TOTAL ANGGARAN	358.238.795.010

Kepala Badan Kependudukan
Dan Keluarga Berencana Nasional,



Hasto Wardoyo

Surabaya, 16 September 2019
Kepala Perwakilan BKKBN
Provinsi Jawa Tengah,



Wugino



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rohdhiana Sumariati
Jabatan : Plt. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi D.I. Yogyakarta

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Hasto Wardoyo
Jabatan : Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Surabaya, 16 September 2019

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Hasto Wardoyo

Rohdhiana Sumariati



PERWAKILAN BKKBN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019
A. INDIKATOR SASARAN STRATEGIS				
1	Menurunnya angka kelahiran total (TFR)	1	Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) per WUS (15-49 tahun)	2,18
2	Meningkatnya prevalensi kontrasepsi modern (mCPR)	2	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (modern contraceptive prevalence rate/mCPR)	61,95
3	Menurunnya tingkat putus pakai kontrasepsi	3	Persentase penurunan angka ketidakberlanggungan pemakaian (tingkat putus pakai) kontrasepsi	24,60
4	Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmetneed)	4	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	8,23
5	Meningkatnya peserta KB Aktif yang menggunakan MKJP	5	Persentase Peserta KB Aktif MKJP	32,42
6	Meningkatnya peserta KB Aktif tambahan	6	Jumlah Peserta KB Aktif tambahan (Additional User)	3.767
B. INDIKATOR KINERJA RENSTRA				
Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga				
7	Teraksananya Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga diseluruh tingkatan wilayah			
Pengendalian Penduduk Provinsi				
		7	Jumlah cakupan sinkronisasi (penyerasian) kebijakan pembangunan daerah dengan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk diseluruh tingkatan wilayah	100% (5 Kab/Kota)
		8	Persentase Kab/Kota yang mengimplementasikan kebijakan dan strategi pengendalian penduduk (Grand Design, Profil/parameter dan Proyeksi Penduduk)	100,00
		9	Jumlah Kabupaten/Kota yang memerfestkan Analisis Dampak Kependudukan sebagai pendukung kebijakan Pembangunan berwawasan kependudukan	34
		10	Jumlah pembinaan implemtansi pendidikan kependudukan di Tk. Provinsi dan Kabupaten/Kota (formal, non formal, informal)	3 Model (terdiri dari 1 formal, 1 non formal, 1 informal)
		11	Jumlah Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi Bidang Pengendalian Penduduk	1
Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Provinsi				
		12	Cakupan pembinaan kesertaan ber-KB dan peningkatan kualitas pelayanan KB yang sesuai dengan standarisasi pelayanan KB diseluruh tingkatan wilayah	100,00
		13	Jumlah pergerakan pelayanan KB MKJP	4.352
		14	Jumlah pergerakan pelayanan KB dan KR di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan terluar (DTPK), wilayah miskin perkotaan dan sasaran khusus	3 frek/th/kab
		15	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	85,00
		16	Persentase Faskes yang melakukan promosi dan konseling Kesehatan dan hak-hak Reproduksi di Provinsi dan Kab/Kota	85,00
		17	Jumlah Pembinaan, Monitoring, evaluasi dan Fasilitas kegiatan Bidang KBKR di Kabupaten dan Kota	1
Ketahanan Keluarga dan Pemberdayaan Keluarga Provinsi				
		18	Pembinaan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga diseluruh tingkatan wilayah	1 Provinsi dan 5 Kab/Kota
		19	Jumlah pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi kebijakan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (Pembangunan Keluarga) diseluruh tingkatan wilayah	1 Provinsi dan 5 Kab/Kota
		20	Persentase Kabupaten/Kota yang mengembangkan kegiatan BKB Holistic Integrative	100,00

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019
		21	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pembinaan Genre (PK-R/M dan BKR)	100,00
		22	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan pembinaan BKL	100,00
		23	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan pembinaan PEK dan pembentukan kelompok UPPKS	100,00
		24	Jumlah Pembinaan, Monitoring, evaluasi dan Fasilitasi kegiatan Bidang KSPK	1
Advokasi, Penggerakan dan Informasi Provinsi				
		25	Persentase Stakeholders/mitra kerja dan masyarakat diseluruh tingkatan wilayah yang mendapat Pembinaan Advokasi dan KIE program KKBPK	80,00
		26	Jumlah Pembinaan dan sosialisasi kebijakan, strategi dan materi advokasi dan KIE pembangunan KKBPK	1
		27	Jumlah Penayangan Informasi KKBPK melalui berbagai media cetak dan elektronik, media luar ruang dan seni dan budaya/tradisional	5 Media
		28	Jumlah Pembinaan mekanisme operasional dalam pengujian pelayanan dasar masyarakat	5
		29	Jumlah wilayah yang mendapatkan dukungan pendampingan kemitraan dalam pembangunan KKB diseluruh tingkatan wilayah	1 Provinsi dan 5 Kab/Kota
		30	Persentase kesiapan stakeholder dan mitra kerja dalam implementasi program KKBPK	100,00
		31	Pengelolaan Data dan Informasi program KKBPK di Provinsi	2
		32	Jumlah pengelolaan data dan informasi program KKBPK di provinsi	1
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya				
8	Terselenggaranya Dukungan Manajemen dalam pengelolaan Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Provinsi			
Dukungan Kegiatan Manajemen/Sekretariat Provinsi				
		33	Dukungan Manajemen di Provinsi (termasuk gaji/001 dan pemeliharaan rutin/002)	13 bulan 1 Provinsi
		34	Persentase ketepatan Pembayaran Gaji dan uang makan Pegawai (Perwakilan BKKBN Provinsi)	100,00
		35	Jumlah penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran	12
		36	Jumlah penyelenggaraan Manajemen di Provinsi (Keuangan dan BMN, Perencanaan, Kepegawaian, Umum, dan Orfata)	12
		37	Persentase pengadaan sarana prasarana sesuai Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBK)	100,00
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur				
9	Terwujudnya akuntabilitas pelaksanaan pengawasan lainnya di provinsi			
V Pengawasan Provinsi				
		38	Jumlah pelaksanaan pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur di provinsi	1
		39	Jumlah peningkatan pelaksanaan pengawasan lainnya dan penerapan Zi WBK	1
Program Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan serta Kerjasama Internasional				
10	Terselenggaranya kegiatan pelatihan, penelitian dan pengembangan di Provinsi			
VI Pelatihan Pengembangan Provinsi				
		40	Jumlah SDM provinsi (SDM Aparatur dan tenaga Fungsional, termasuk Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana -PLKB/PKB) yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan kapasitas	98
		41	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan SDM (SDM Aparatur dan tenaga Fungsional)	1
VII Penelitian dan Pengembangan Provinsi				
		42	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan program KKBPK di Provinsi yang dimanfaatkan	3 Dokumen penelitian (KKBPK dan RPJMN) / Prov
		43	Jumlah hasil-hasil penelitian dan pengembangan program KKBPK (KKB) yang dimanfaatkan	3

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019
C PROYEK PRIORITAS NASIONAL (PRO PN)				
11	Tersedianya Alokasi di Fasilitas Kesehatan	44	Pemenuhan Ketersediaan Alokasi di Fasilitas	323
12	Terlaksananya promosi dan konseling kesehatan reproduksi melalui Kelompok Kegiatan	45	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi melalui Kelompok Kegiatan	1.859
13	Meningkatnya pengetahuan keluarga yang memiliki Baduta tertinggal 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	46	Keluarga yang Memiliki Baduta Terpapar 1000 HPK	35.435
14	Meningkatnya pengetahuan Remaja Putri sebagai calon ibu tentang edukasi Kespro dan Gizi melalui peran Pusat Informasi Konseling (PIK) Remaja dan Bina Kelahiran Remaja (BKR)	47	Penguatan Peran PIK Remaja dan BKR dalam Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu	418
D INDIKATOR STRATEGIS DI LUAR RENSTRA				
15	Terlaksananya penetapan BMN berdasarkan status penggunaannya	48	Persentase BMN yang telah ditetapkan status penggunaannya	100,00
16	Meningkatnya akuntabilitas kinerja program dan anggaran	49	Level maturitas penilaian mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3,4 (Level 1-5)
17	Meningkatnya pengelolaan Kampung KB melalui Kelompok Kerja (POKJA) Kampung KB	50	Persentase Kampung KB yang telah memiliki Kelompok Kerja (POKJA) Kampung KB	65,00
18	Terbentuknya Kampung KB Percontohan Tingkat Kabupaten dan Kota	51	Jumlah Kampung KB Percontohan Tingkat Kabupaten dan Kota	5
19	Terlaksananya Pembinaan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Komprehensif di Kecamatan oleh Kabupaten dan Kota	52	Persentase Kabupaten dan Kota yang melaksanakan Pembinaan PPKS secara Komprehensif di Kecamatan	50,00
20	Terdatanya Kepala Keluarga (KK) dalam Pendataan Keluarga	53	Persentase Kepala Keluarga (KK) terdata dalam Pendataan Keluarga	100,00
21	Meningkatnya cakupan potensi Fasilitas dan Poktan yang terregistrasi dalam database SIGA	54	Persentase cakupan potensi Fasilitas dan Poktan yang terregistrasi dalam database SIGA	50,00
22	Meningkatnya kualitas SDM Aparatur sesuai dengan kompetensinya	55	Persentase peta kompetensi PNS	60,00
		56	Tingkat internalisasi budaya kerja CETAK TEGAS yang dimiliki oleh PNS di BKKBN Provinsi	3,0 (Skala 1-5)

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN/BIDANG/OUTPUT	ANGGARAN (Rp)
1	Pengelolaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga Provinsi D.I. Yogyakarta	1. Pengendalian Penduduk Provinsi	791.257.000
		2. Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Provinsi	1.548.022.000
		3. Ketahanan Keluarga dan Pemberdayaan Keluarga Provinsi	1.230.740.000
		4. Advokasi, Penggerakan dan Informasi Provinsi	4.103.601.000
		5. Dukungan Kegiatan Manajemen/Sekretariat Provinsi	50.555.002.000
		6. Pengawasan Provinsi	135.064.000
		7. Pelatihan Pengembangan Provinsi	612.216.000
		8. Penelitian dan Pengembangan Provinsi	786.379.000
2	Proyek Prioritas Nasional	9. Pemenuhan Ketersediaan Alokasi di Fasilitas	1.214.963.000
		10. Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi melalui Kelompok Kegiatan	112.500.000
		11. Keluarga yang Memiliki Baduta Terpapar 1000 HPK	350.000.000
		12. Penguatan Peran PIK Remaja dan BKR dalam Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu	1.288.417.000
		TOTAL ANGGARAN	62.948.271.000

Kepala Badan Kependudukan
Dan Keluarga Berencana Nasional,


Hasto Wardoyo

Surabaya, 16 September 2019
Plt. Kepala Perwakilan BKKBN
Provinsi D.I. Yogyakarta,


Rohdiana Sumariati



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yenrizal Makmur
Jabatan : Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Hasto Wardoyo
Jabatan : Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Surabaya, 16 September 2019
Pihak Pertama,

Hasto Wardoyo

Yenrizal Makmur



PERWAKILAN BKKBN PROVINSI JAWA TIMUR

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019
A INDIKATOR SASARAN STRATEGIS				
1	Menurunnya angka kelahiran total (TFR)	1	Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) per WUS (15-49 tahun)	2,10
2	Meningkatnya prevalensi kontrasepsi modern (mCPR)	2	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (modern contraceptive prevalence rate/mCPR)	66,26
3	Menurunnya tingkat putus pakai kontrasepsi	3	Persentase penurunan angka ketidakberlangsungan pemakaian (tingkat putus pakai) kontrasepsi	24,60
4	Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmetneed)	4	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	7,43
5	Meningkatnya peserta KB Aktif yang menggunakan MKJP	5	Persentase Peserta KB Aktif MKJP	22,85
6	Meningkatnya peserta KB Aktif tambahan	6	Jumlah Peserta KB Aktif tambahan (Additional User)	33.861
B INDIKATOR KINERJA RENSTRA				
Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga				
7	Terlaksananya Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga diseluruh tingkatan wilayah			
Pengendalian Penduduk Provinsi				
		7	Jumlah cakupan sinkronisasi (penyerasian) kebijakan pembangunan daerah dengan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk diseluruh tingkatan wilayah	100% (38 Kab/Kota)
		8	Persentase Kab/Kota yang mengimplementasikan kebijakan dan strategi pengendalian penduduk (Grand Design, Profil/parameter dan Proyeksi Penduduk)	100,00
		9	Jumlah Kabupaten/Kota yang memanfaatkan Analisis Dampak Kependudukan sebagai pendukung kebijakan Pembangunan berwawasan kependudukan	262
		10	Jumlah pembinaan implementasi pendidikan kependudukan di Tk. Provinsi dan Kabupaten/Kota (formal, non formal, informal)	3 Model (terdiri dari 1 formal, 1 non formal, 1 informal)
		11	Jumlah Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi Bidang Pengendalian Penduduk	1
Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Provinsi				
		12	Cakupan pembinaan kesetiaan ber-KB dan peningkatan kualitas pelayanan KB yang sesuai dengan standarisasi pelayanan KB diseluruh tingkatan wilayah	100,00
		13	Jumlah pergerakan pelayanan KB MKJP	39.208
		14	Jumlah pergerakan pelayanan KB dan KR di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan terluar (DTPK), wilayah miskin perkotaan dan sasaran khusus	3 titik/th/kab
		15	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	65,00
		16	Persentase Faskes yang melakukan promosi dan konseling Kesehatan dan hak-hak Reproduksi di Provinsi dan Kab/Kota	65,00
		17	Jumlah Pembinaan, Monitoring, evaluasi dan Fasilitasi kegiatan Bidang KBKR di Kabupaten dan Kota	1
Ketahanan Keluarga dan Pemberdayaan Keluarga Provinsi				
		18	Pembinaan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga diseluruh tingkatan wilayah	1 Provinsi dan 38 Kab/Kota
		19	Jumlah pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi kebijakan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (Pembangunan Keluarga) diseluruh tingkatan wilayah	1 Provinsi dan 38 Kab/Kota
		20	Persentase Kabupaten/Kota yang mengembangkan kegiatan BKB Holistic Integrative	100,00

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019
		21	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pembinaan Genre (PIK-R/M dan BKR)	100,00
		22	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan pembinaan BKL	100,00
		23	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan pembinaan PEK dan pembentukan kelompok UPPKS	100,00
		24	Jumlah Pembinaan, Monitoring, evaluasi dan Fasilitasi kegiatan Bidang KSPK	1
Advokasi, Penggerakan dan Informasi Provinsi				
		25	Persentase Stakeholders/mitra kerja dan masyarakat diseluruh tingkatan wilayah yang mendapat Pembinaan Advokasi dan KIE program KKBPK	80,00
		26	Jumlah Pembinaan dan sosialisasi kebijakan, strategi dan materi advokasi dan KIE pembangunan KKBPK	1
		27	Jumlah Penayangan informasi KKBPK melalui berbagai media cetak dan elektronik, media luar ruang dan seni dan budaya/tradisional	5 Media
		28	Jumlah Pembinaan mekanisme operasional dalam penguatan pelayanan dasar masyarakat	38
		29	Jumlah wilayah yang mendapatkan dukungan pendampingan kemitraan dalam pembangunan KKB diseluruh tingkatan wilayah	1 Provinsi dan 38 Kab/Kota
		30	Persentase kepatuhan stakeholder dan mitra kerja dalam implementasi program KKBPK	100,00
		31	Pengelolaan Data dan Informasi program KKBPK di Provinsi	2
		32	Jumlah pengelolaan data dan informasi program KKBPK di provinsi	1
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya				
8	Terselenggaranya Dukungan Manajemen dalam pengelolaan Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Provinsi			
Dukungan Kegiatan Manajemen/Sekretariat Provinsi				
		33	Dukungan Manajemen di Provinsi (termasuk gaji/001 dan pemeliharaan rutin/002)	13 bulan 1 Provinsi
		34	Persentase ketepatan Pembayaran Gaji dan uang makan Pegawai (Perwakilan BKKBN Provinsi)	100,00
		35	Jumlah penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran	12
		36	Jumlah penyelenggaraan Manajemen di Provinsi (Keuangan dan BMN, Perencanaan, Kepegawaian, Umum, dan Ortala)	12
		37	Persentase pengadaan sarana prasarana sesuai Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK)	100,00
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur				
9	Terwujudnya akuntabilitas pelaksanaan pengawasan lainnya di provinsi			
V Pengawasan Provinsi				
		38	Jumlah pelaksanaan pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparaturnya di provinsi	1
		39	Jumlah peningkatan pelaksanaan pengawasan lainnya dan penerapan ZI WBK	1
Program Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan serta Kerjasama Internasional				
10	Terselenggaranya kegiatan pelatihan, penelitian dan pengembangan di Provinsi			
VI Pelatihan Pengembangan Provinsi				
		40	Jumlah SDM provinsi (SDM Aparatur dan tenaga Fungsional termasuk Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana -PLKB/PKB) yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan kapasitas	717
		41	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan SDM (SDM Aparatur dan tenaga Fungsional)	1
VII Penelitian dan Pengembangan Provinsi				
		42	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan program KKBPK di Provinsi yang dimanfaatkan	3 Dokumen penelitian (KKBPK dan RPJMN) / Prov
		43	Jumlah hasil-hasil penelitian dan pengembangan program KKBPK (KKB) yang dimanfaatkan	3

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019
C PROYEK PRIORITAS NASIONAL (PRO PN)				
11	Tersedianya Alokasi di Fasilitas Kesehatan	44	Pemenuhan Ketersediaan Alokasi di Fasilitas	1.849
12	Tertaksananya promosi dan konseling kesehatan reproduksi melalui Kelompok Kegiatan	45	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi melalui Kelompok Kegiatan	9.225
13	Meningkatnya pengetahuan keluarga yang memiliki Baduta tentang 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	46	Keluarga yang Memiliki Baduta Terpapar 1000 HPK	315.181
14	Meningkatnya pengetahuan Remaja Putri sebagai calon ibu tentang edukasi Kespro dan Gizi melalui peran Pusat Informasi Konseling (PIK) Remaja dan Bina Ketahanan Remaja (BKR)	47	Penguatan Peran PIK Remaja dan BKR dalam Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu	3.697
D INDIKATOR STRATEGIS DI LUAR RENSTRA				
15	Tertaksananya penetapan BMN berdasarkan status penggunaannya	48	Persentase BMN yang telah ditetapkan status penggunaannya	100,00
16	Meningkatnya akuntabilitas kinerja program dan anggaran	49	Level maturitas penilaian mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3,0 (Level 1-5)
17	Meningkatnya pengelolaan Kampung KB melalui Kelompok Kerja (POKJA) Kampung KB	50	Persentase Kampung KB yang telah memiliki Kelompok Kerja (POKJA) Kampung KB	65,00
18	Tertaksananya Kampung KB Percontohan Tingkat Kabupaten dan Kota	51	Jumlah Kampung KB Percontohan Tingkat Kabupaten dan Kota	38
19	Tertaksananya Pembinaan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Komprehensif di Kecamatan oleh Kabupaten dan Kota	52	Persentase Kabupaten dan Kota yang melaksanakan Pembinaan PPKS secara Komprehensif di Kecamatan	50,00
20	Terdapatnya Kepala Keluarga (KK) dalam Pendataan Keluarga	53	Persentase Kepala Keluarga (KK) terdapat dalam Pendataan Keluarga	96,00
21	Meningkatnya cakupan potensi Fasilitas dan Poktan yang terregistrasi dalam database SIGA	54	Persentase cakupan potensi Fasilitas dan Poktan yang terregistrasi dalam database SIGA	50,00
22	Meningkatnya kualitas SDM Aparatur sesuai dengan kompetensinya	55	Persentase peta kompetensi PNS	60,00
		56	Tingkat internalisasi budaya kerja CETAK TEGAS yang dimiliki oleh PNS di BKKBN Provinsi	3,0 (Skala 1-5)

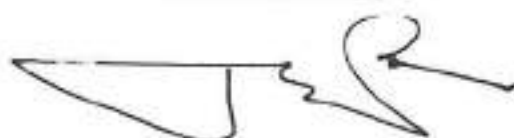
NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN/BIDANG/OUTPUT	ANGGARAN (Rp)
1	Pengelolaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga Provinsi Jawa Timur	1 Pengendalian Penduduk Provinsi	2.485.807.000
		2 Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Provinsi	10.530.042.000
		3 Ketahanan Keluarga dan Pemberdayaan Keluarga Provinsi	7.044.340.000
		4 Advokasi, Penggerakan dan Informasi Provinsi	26.766.631.000
		5 Dukungan Kegiatan Manajemen/Sekretariat Provinsi	333.982.018.000
		6 Pengawasan Provinsi	148.406.000
		7 Pelatihan Penguatan Provinsi	3.606.014.000
		8 Penelitian dan Pengembangan Provinsi	3.368.653.000
2	Proyek Prioritas Nasional	9 Pemenuhan Ketersediaan Alokasi di Fasilitas	12.380.439.000
		10 Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi melalui Kelompok Kegiatan	246.100.000
		11 Keluarga yang Memiliki Baduta Terpapar 1000 HPK	1.702.000.000
		12 Penguatan Peran PIK Remaja dan BKR dalam Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu	3.218.147.000
		TOTAL ANGGARAN	405.478.597.000

Kepala Badan Kependudukan
Dan Keluarga Berencana Nasional,

Surabaya, 16 September 2019
Kepala Perwakilan BKKBN
Provinsi Jawa Timur,



Hasto Wardoyo



Yenzil Makmur



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Catur Sentane
Jabatan : Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Hasto Wardoyo
Jabatan : Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Hasto Wardoyo

Surabaya, 16 September 2019

Pihak Pertama,

Catur Sentane



PERWAKILAN BKKBN PROVINSI BALI

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019
A INDIKATOR SASARAN STRATEGIS				
1	Menurunnya angka kelahiran total (TFR)	1	Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) per WUS (15-49 tahun)	2,10
2	Meningkatnya prevalensi kontrasepsi modern (mCPR)	2	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (modern contraceptive prevalence rate/mCPR)	58,98
3	Menurunnya tingkat putus pakai kontrasepsi	3	Persentase penurunan angka ketidakberlangsungan pemakaian (tingkat putus pakai) kontrasepsi	24,00
4	Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet need)	4	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	10,39
5	Meningkatnya peserta KB Aktif yang menggunakan MKJP	5	Persentase Peserta KB Aktif MKJP	37,98
6	Meningkatnya peserta KB Aktif tambahan	6	Jumlah Peserta KB Aktif tambahan (Additional User)	3.368
B INDIKATOR KINERJA RENSTRA				
Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga				
7	Terlaksananya Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga diseluruh tingkatan wilayah			
Pengendalian Penduduk Provinsi				
		7	Jumlah cakupan sinkronisasi (penyerasian) kebijakan pembangunan daerah dengan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk diseluruh tingkatan wilayah	100% (8 Kab/Kota)
		8	Persentase Kab/Kota yang mengimplementasikan kebijakan dan strategi pengendalian penduduk (Grand Design, Profil/parameter dan Proyeksi Penduduk)	100,00
		9	Jumlah Kabupaten/Kota yang memanfaatkan Analisis Dampak Kependudukan sebagai pendukung kebijakan Pembangunan berwawasan kependudukan	26
		10	Jumlah pembinaan implementasi pendidikan kependudukan di Tk. Provinsi dan Kabupaten/Kota (formal, non formal, informal)	3 Model (terdiri dari 1 formal, 1 non formal, 1 informal)
		11	Jumlah Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi Bidang Pengendalian Penduduk	1
Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Provinsi				
		12	Cakupan pembinaan kesetiaan ber-KB dan peningkatan kualitas pelayanan KB yang sesuai dengan standarisasi pelayanan KB diseluruh tingkatan wilayah	100,00
		13	Jumlah penggerakan pelayanan KB MKJP	5.880
		14	Jumlah penggerakan pelayanan KB dan KR di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan terluar (DTPK), wilayah miskin perkotaan dan sasaran khusus	3 fak/th/kab
		15	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	85,00
		16	Persentase Faskes yang melakukan promosi dan konseling Kesehatan dan hak-hak Reproduksi di Provinsi dan Kab/Kota	85,00
		17	Jumlah Pembinaan, Monitoring, evaluasi dan Fasilitasi kegiatan Bidang KBKR di Kabupaten dan Kota	1
Ketahanan Keluarga dan Pemberdayaan Keluarga Provinsi				
		18	Pembinaan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga diseluruh tingkatan wilayah	1 Provinsi dan 9 Kab/Kota
		19	Jumlah pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi kebijakan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (Pembangunan Keluarga) diseluruh tingkatan wilayah	1 Provinsi dan 9 Kab/Kota
		20	Persentase Kabupaten/Kota yang mengembangkan kegiatan BKB Holistic Integrative	100,00

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019
		21	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pembinaan Genre (PIK-RM dan BKR)	100,00
		22	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan pembinaan BKL	100,00
		23	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan pembinaan PEK dan pembentukan kelompok UPPKS	100,00
		24	Jumlah Pembinaan, Monitoring, evaluasi dan Fasilitasi kegiatan Bidang KSPK	1
Advokasi, Penggerakan dan Informasi Provinsi				
		25	Persentase Stakeholders/mitra kerja dan masyarakat diseluruh tingkatan wilayah yang mendapat Pembinaan Advokasi dan KIE program KKBPK	80,00
		26	Jumlah Pembinaan dan sosialisasi kebijakan, strategi dan materi advokasi dan KIE pembangunan KKBPK	1
		27	Jumlah Penayangan informasi KKBPK melalui berbagai media cetak dan elektronik, media luar ruang dan seni dan budaya/tradisional	5 Media
		28	Jumlah Pembinaan mekanisme operasional dalam penguatan pelayanan dasar masyarakat	9
		29	Jumlah wilayah yang mendapatkan dukungan pendampingan kemitraan dalam pembangunan KKB diseluruh tingkatan wilayah	1 Provinsi dan 9 Kab/Kota
		30	Persentase kesertaan stakeholder dan mitra kerja dalam implementasi program KKBPK	100,00
		31	Pengelolaan Data dan informasi program KKBPK di Provinsi	2
		32	Jumlah pengelolaan data dan informasi program KKBPK di provinsi	1
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya				
8	Terselenggaranya Dukungan Manajemen dalam pengelolaan Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Provinsi			
Dukungan Kegiatan Manajemen/Sekretariat Provinsi				
		33	Dukungan Manajemen di Provinsi (termasuk gaji/001 dan pemeliharaan rutin/002)	13 bulan 1 Provinsi
		34	Persentase ketepatan Pembayaran Gaji dan uang makan Pegawai (Perwakilan BKKBN Provinsi)	100,00
		35	Jumlah penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran	12
		36	Jumlah penyelenggaraan Manajemen di Provinsi (Keuangan dan BMN, Perencanaan, Kepegawaian, Umum, dan Orala)	12
		37	Persentase pengadaan sarana prasarana sesuai Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK)	100,00
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur				
9	Terwujudnya akuntabilitas pelaksanaan pengawasan lainnya di provinsi			
V Pengawasan Provinsi				
		38	Jumlah pelaksanaan pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparat di provinsi	1
		39	Jumlah peningkatan pelaksanaan pengawasan lainnya dan penerapan 21 WBK	1
Program Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan serta Kerjasama Internasional				
10	Terselenggaranya kegiatan pelatihan, penelitian dan pengembangan di Provinsi			
VI Pelatihan Pengembangan Provinsi				
		40	Jumlah SDM provinsi (SDM Aparatur dan tenaga Fungsional, termasuk Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana -PUKB/PKB) yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan kapasitas	135
		41	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan SDM (SDM Aparatur dan tenaga Fungsional)	1
VII Penelitian dan Pengembangan Provinsi				
		42	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan program KKBPK di Provinsi yang dimanfaatkan	3 Dokumen penelitian (KKBPK dan RPJMN)/ Prov
		43	Jumlah hasil-hasil penelitian dan pengembangan program KKBPK (KKB) yang dimanfaatkan	3

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019
C PROYEK PRIORITAS NASIONAL (PRO PN)				
11	Tersedianya Alokasi di Fasilitas Kesehatan	44	Pemenuhan Ketersediaan Alokasi di Fasilitas	359
12	Tersedianya promosi dan konseling kesehatan reproduksi melalui Kelompok Kegiatan	45	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi melalui Kelompok Kegiatan	1.230
13	Meningkatnya pengetahuan keluarga yang memiliki Bayi tentang 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	46	Keluarga yang Memiliki Bayi Terpapar 1000 HPK	20.675
14	Meningkatnya pengetahuan Remaja Putri sebagai calon ibu tentang edukasi Kespro dan Gizi melalui peran Pusat Informasi Konseling (PIK) Remaja dan Bina Ketahanan Remaja (BKR)	47	Penguatan Peran PIK Remaja dan BKR dalam Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu	315
D INDIKATOR STRATEGIS DI LUAR RENSTRA				
15	Tersedianya penetapan BMN berdasarkan status penggunaannya	48	Persentase BMN yang telah ditetapkan status penggunaannya	100,00
16	Meningkatnya akuntabilitas kinerja program dan anggaran	49	Level maturitas penilaian mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3,0 (Level 1-5)
17	Meningkatnya pengelolaan Kampung KB melalui Kelompok Kerja (POKJA) Kampung KB	50	Persentase Kampung KB yang telah memiliki Kelompok Kerja (POKJA) Kampung KB	65,00
18	Terbentuknya Kampung KB Percontohan Tingkat Kabupaten dan Kota	51	Jumlah Kampung KB Percontohan Tingkat Kabupaten dan Kota	9
19	Tersedianya Pembinaan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Komprehensif di Kecamatan oleh Kabupaten dan Kota	52	Persentase Kabupaten dan Kota yang melaksanakan Pembinaan PPKS secara Komprehensif di Kecamatan	50,00
20	Terdapatnya Kepala Keluarga (KK) dalam Pendataan Keluarga	53	Persentase Kepala Keluarga (KK) terdata dalam Pendataan Keluarga	90,00
21	Meningkatnya cakupan potensi Fasilitas dan Poktan yang teregister dalam database SIGA	54	Persentase cakupan potensi Fasilitas dan Poktan yang teregister dalam database SIGA	50,00
22	Meningkatnya kualitas SDM Aparatur sesuai dengan kompetensinya	55	Persentase peta kompetensi PNS	60,00
		56	Tingkat internalisasi budaya kerja CETAK TEGAS yang dimiliki oleh PNS di BKKBN Provinsi	3,0 (Skala 1-5)

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN/BIDANG/OUTPUT	ANGGARAN (Rp)
1	Pengelolaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga Provinsi Bali	1 Pengendalian Penduduk Provinsi	858.398.000
		2 Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Provinsi	1.967.422.000
		3 Ketahanan Keluarga dan Pemberdayaan Keluarga Provinsi	1.231.040.000
		4 Advokasi, Penggerakan dan Informasi Provinsi	4.443.851.000
		5 Dukungan Kegiatan Manajemen/Sekretariat Provinsi	47.764.726.000
		6 Pengawasan Provinsi	90.000.000
		7 Pelatihan Pengembangan Provinsi	985.314.000
		8 Penelitian dan Pengembangan Provinsi	635.306.000
2	Proyek Prioritas Nasional	9 Pemenuhan Ketersediaan Alokasi di Fasilitas	1.642.775.000
		10 Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi melalui Kelompok Kegiatan	111.500.000
		11 Keluarga yang Memiliki Bayi Terpapar 1000 HPK	602.500.000
		12 Penguatan Peran PIK Remaja dan BKR dalam Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu	1.385.207.000
		TOTAL ANGGARAN	61.838.130.000

Kepala Badan Kependudukan
Dan Keluarga Berencana Nasional,



Haslo Wardoyo

Surabaya, 16 September 2019
Kepala Perwakilan BKKBN
Provinsi Bali,



Catur Sentana



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lalu Makripuddin
Jabatan : Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Barat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Hasto Wardoyo
Jabatan : Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Hasto Wardoyo

Surabaya, 16 September 2019

Pihak Pertama,

Lalu Makripuddin



PERWAKILAN BKKBN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019
A. INDIKATOR SASARAN STRATEGIS				
1	Menurunnya angka kelahiran total (TFR)	1	Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) per WUS (15-49 tahun)	2,38
2	Meningkatnya prevalensi kontrasepsi modern (mCPR)	2	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (modern contraceptive prevalence rate/mCPR)	55,26
3	Menurunnya tingkat putus pakai kontrasepsi	3	Persentase penurunan angka ketidakberlangsungan pemakaian (tingkat putus pakai) kontrasepsi	24,60
4	Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmetneed)	4	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	9,67
5	Meningkatnya peserta KB Aktif yang menggunakan MKJP	5	Persentase Peserta KB Aktif MKJP	27,54
6	Meningkatnya peserta KB Aktif tambahan	6	Jumlah Peserta KB Aktif tambahan (Additional User)	7.605
B. INDIKATOR KINERJA RENSTRA				
Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga				
7	Terlaksananya Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga diseluruh tingkatan wilayah			
Pengendalian Penduduk Provinsi				
		7	Jumlah cakupan sinkronisasi (penyerasian) kebijakan pembangunan daerah dengan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk diseluruh tingkatan wilayah	100% (10 Kab/Kota)
		8	Persentase Kab/Kota yang mengimplementasikan kebijakan dan strategi pengendalian penduduk (Grand Design, Profil/parameter dan Proyeksi Penduduk)	100,00
		9	Jumlah Kabupaten/Kota yang memanfaatkan Analisis Dampak Kependudukan sebagai pendukung kebijakan Pembangunan berwawasan kependudukan	43
		10	Jumlah pembinaan implementasi pendidikan kependudukan di Tk. Provinsi dan Kabupaten/Kota (formal, non formal, informal)	3 Model (terdiri dari 1 formal, 1 non formal, 1 informal)
		11	Jumlah Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi Bidang Pengendalian Penduduk	1
Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Provinsi				
		12	Cakupan pembinaan kesetaraan ber-KB dan peningkatan kualitas pelayanan KB yang sesuai dengan standarisasi pelayanan KB diseluruh tingkatan wilayah	100,00
		13	Jumlah penggerakan pelayanan KB MKJP	10.026
		14	Jumlah penggerakan pelayanan KB dan KR di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan terluar (DTPK), wilayah miskin perkotaan dan sasaran khusus	3 frek/th/kab
		15	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	85,00
		16	Persentase Faskes yang melakukan promosi dan konseling Kesehatan dan hak-hak Reproduksi di Provinsi dan Kab/Kota	85,00
		17	Jumlah Pembinaan, Monitoring, evaluasi dan Fasilitasi kegiatan Bidang KBKR di Kabupaten dan Kota	1
Ketahanan Keluarga dan Pemberdayaan Keluarga Provinsi				
		18	Pembinaan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga diseluruh tingkatan wilayah	1 Provinsi dan 10 Kab/Kota
		19	Jumlah pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi kebijakan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (Pembangunan Keluarga) diseluruh tingkatan wilayah	1 Provinsi dan 10 Kab/Kota
		20	Persentase Kabupaten/Kota yang mengembangkan kegiatan BKB Holistic Integrative	100,00

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019
		21	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pembinaan Genre (PK-RM dan BKK)	100,00
		22	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan pembinaan BKL	100,00
		23	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan pembinaan PEK dan pembentukan kelompok UPPKS	100,00
		24	Jumlah Pembinaan, Monitoring, evaluasi dan Fasilitasi kegiatan Bidang KSPK	1
Advokasi, Penggerakan dan Informasi Provinsi				
		25	Persentase Stakeholders/mitra kerja dan masyarakat diseluruh tingkatan wilayah yang mendapat Pembinaan Advokasi dan KIE program KKBPK	80,00
		26	Jumlah Pembinaan dan sosialisasi kebijakan, strategi dan materi advokasi dan KIE pembangunan KKBPK	1
		27	Jumlah Penayangan informasi KKBPK melalui berbagai media cetak dan elektronik, media luar ruang dan seni dan budaya/tradisional	5 Media
		28	Jumlah Pembinaan mekanisme operasional dalam pengujian pelayanan dasar masyarakat	10
		29	Jumlah wilayah yang mendapatkan dukungan pendampingan kemitraan dalam pembangunan KKB diseluruh lingkaran wilayah	1 Provinsi dan 10 Kab/Kota
		30	Persentase keseriusan stakeholder dan mitra kerja dalam implementasi program KKBPK	100,00
		31	Pengelolaan Data dan informasi program KKBPK di Provinsi	2
		32	Jumlah pengelolaan data dan informasi program KKBPK di provinsi	1
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya				
8	Terselenggaranya Dukungan Manajemen dalam pengelolaan Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Provinsi			
Dukungan Kegiatan Manajemen/Sekretariat Provinsi				
		33	Dukungan Manajemen di Provinsi (termasuk gaji/001 dan pemeliharaan rutin/002)	13 bulan 1 Provinsi
		34	Persentase ketepatan Pembayaran Gaji dan uang makan Pegawai (Perwakilan BKKBN Provinsi)	100,00
		35	Jumlah penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran	12
		36	Jumlah penyelenggaraan Manajemen di Provinsi (Keuangan dan BMN, Perencanaan, Kepegawaian, Umum, dan Ortala)	12
		37	Persentase pengadaan sarana prasarana sesuai Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK)	100,00
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur				
9	Terwujudnya akuntabilitas pelaksanaan pengawasan lainnya di provinsi			
V Pengawasan Provinsi				
		38	Jumlah pelaksanaan pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur di provinsi	1
		39	Jumlah peningkatan pelaksanaan pengawasan lainnya dan penerapan 21 WBK	1
Program Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan serta Kerjasama Internasional				
10	Terselenggaranya kegiatan pelatihan, penelitian dan pengembangan di Provinsi			
VI Pelatihan Pengembangan Provinsi				
		40	Jumlah SDM provinsi (SDM Aparatur dan tenaga Fungsional, termasuk Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana -PLKB/PKB) yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan kapasitas	184
		41	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan SDM (SDM Aparatur dan tenaga Fungsional)	1
VII Penelitian dan Pengembangan Provinsi				
		42	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan program KKBPK di Provinsi yang dimanfaatkan	3 Dokumen penelitian (KKBPK dan RPJMN) / Prov
		43	Jumlah hasil-hasil penelitian dan pengembangan program KKBPK (KKB) yang dimanfaatkan	3

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019
C PROYEK PRIORITAS NASIONAL (PRO PN)				
11	Tersedianya Alokasi di Fasilitas Kesehatan	44	Pemenuhan Ketersediaan Alokasi di Fasilitas	1.204
12	Tersedianya promosi dan konseling kesehatan reproduksi melalui Kelompok Kegiatan	45	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi melalui Kelompok Kegiatan	789
13	Meningkatnya pengetahuan keluarga yang memiliki Baduta tentang 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	46	Keluarga yang Memiliki Baduta Terpapar 1000 HPK	177.661
14	Meningkatnya pengetahuan Remaja Putri sebagai calon ibu tentang edukasi Kespro dan Gizi melalui peran Pusat Informasi Konseling (PIK) Remaja dan Bina Ketahanan Remaja (BKR)	47	Penguatan Peran PIK Remaja dan BKR dalam Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu	594
D INDIKATOR STRATEGIS DI LUAR RENSTRA				
15	Tersedianya penetapan BMN berdasarkan status penggunaannya	48	Persentase BMN yang telah ditetapkan status penggunaannya	100,00
16	Meningkatnya akuntabilitas kinerja program dan anggaran	49	Level maturitas penilaian mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3,0 (Level 1-5)
17	Meningkatnya pengelolaan Kampung KB melalui Kelompok Kerja (POKJA) Kampung KB	50	Persentase Kampung KB yang telah memiliki Kelompok Kerja (POKJA) Kampung KB	65,00
18	Terbentuknya Kampung KB Percontohan Tingkat Kabupaten dan Kota	51	Jumlah Kampung KB Percontohan Tingkat Kabupaten dan Kota	10
19	Tersedianya Pembinaan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Komprehensif di Kecamatan oleh Kabupaten dan Kota	52	Persentase Kabupaten dan Kota yang melaksanakan Pembinaan PPKS secara Komprehensif di Kecamatan	50,00
20	Tersedianya Kepala Keluarga (KK) dalam Pendataan Keluarga	53	Persentase Kepala Keluarga (KK) terdapat dalam Pendataan Keluarga	95,00
21	Meningkatnya cakupan potensi Fasilitas dan Poktan yang terregistrasi dalam database SIGA	54	Persentase cakupan potensi Fasilitas dan Poktan yang terregistrasi dalam database SIGA	50,00
22	Meningkatnya kualitas SDM Aparatur sesuai dengan kompetensinya	55	Persentase peta kompetensi PNS	60,00
		56	Tingkat internalisasi budaya kerja CETAK TEGAS yang dimiliki oleh PNS di BKKBN Provinsi	3,0 (Skala 1-5)

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN/BIDANG/OUTPUT	ANGGARAN (Rp)
1	Pengelolaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga Provinsi Nusa Tenggara Barat	1 Pengendalian Penduduk Provinsi	1.273.455.000
		2 Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Provinsi	2.562.382.000
		3 Ketahanan Keluarga dan Pemberdayaan Keluarga Provinsi	2.469.240.000
		4 Advokasi, Penggerakan dan Informasi Provinsi	7.386.899.000
		5 Dukungan Kegiatan Manajemen/Sekretariat Provinsi	60.583.515.000
		6 Pengawasan Provinsi	60.000.000
		7 Pelatihan Pengembangan Provinsi	1.157.389.000
		8 Penelitian dan Pengembangan Provinsi	981.864.000
2	Proyek Prioritas Nasional	9 Pemenuhan Ketersediaan Alokasi di Fasilitas	18.612.344.000
		10 Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi melalui Kelompok Kegiatan	126.500.000
		11 Keluarga yang Memiliki Baduta Terpapar 1000 HPK	800.000.000
		12 Penguatan Peran PIK Remaja dan BKR dalam Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu	1.473.481.000
		TOTAL ANGGARAN	107.489.129.000

Kepala Badan Kependudukan
Dan Keluarga Berencana Nasional,



Hasto Wardoyo

Surabaya, 16 September 2019
Kepala Perwakilan BKKBN
Provinsi Nusa Tenggara Barat,



Lalu Makripuddin



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Marianus Mau Kuru
Jabatan : Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Timur

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Hasto Wardoyo
Jabatan : Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Hasto Wardoyo

Surabaya, 16 September 2019
Pihak Pertama,

Marianus Mau Kuru



PERWAKILAN BKKBN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019
A INDIKATOR SASARAN STRATEGIS				
1	Menurunnya angka kelahiran total (TFR)	1	Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) per WUS (15-49 tahun)	3,24
2	Meningkatnya prevalensi kontrasepsi modern (mCPR)	2	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (modern contraceptive prevalence rate/mCPR)	46,09
3	Menurunnya tingkat putus pakai kontrasepsi	3	Persentase penurunan angka ketidakeberlangsungan pemakaian (tingkat putus pakai) kontrasepsi	24,60
4	Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmetneed)	4	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	18,54
5	Meningkatnya peserta KB Aktif yang menggunakan MKJP	5	Persentase Peserta KB Aktif MKJP	42,81
6	Meningkatnya peserta KB Aktif tambahan	6	Jumlah Peserta KB Aktif tambahan (Additional User)	5.357
B INDIKATOR KINERJA RENSTRA				
Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga				
7	Terlaksananya Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga diseluruh tingkatan wilayah			
Pengendalian Penduduk Provinsi				
		7	Jumlah cakupan sinkronisasi (penyerasian) kebijakan pembangunan daerah dengan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk diseluruh tingkatan wilayah	100% (22 Kab/Kota)
		8	Persentase Kab/Kota yang mengimplementasikan kebijakan dan strategi pengendalian penduduk (Grand Design, Profil/parameter dan Proyeksi Penduduk)	100,00
		9	Jumlah Kabupaten/Kota yang memanfaatkan Analisis Dampak Kependudukan sebagai pendukung kebijakan Pembangunan berwawasan kependudukan	98
		10	Jumlah pembinaan implementasi pendidikan kependudukan di Tk. Provinsi dan Kabupaten/Kota (formal, non formal, informal)	3 Model (terdiri dari 1 formal, 1 non formal, 1 informal)
		11	Jumlah Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi Bidang Pengendalian Penduduk	1
Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Provinsi				
		12	Cakupan pembinaan kesetaraan ber-KB dan peningkatan kualitas pelayanan KB yang sesuai dengan standarisasi pelayanan KB diseluruh tingkatan wilayah	100,00
		13	Jumlah pergerakan pelayanan KB MKJP	5.752
		14	Jumlah pergerakan pelayanan KB dan KR di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan terluar (DTPK), wilayah miskin perkotaan dan sasaran khusus	3 frek/th/kab
		15	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	85,00
		16	Persentase Faskes yang melakukan promosi dan konseling Kesehatan dan hak-hak Reproduksi di Provinsi dan Kab/Kota	85,00
		17	Jumlah Pembinaan, Monitoring, evaluasi dan Fasilitasi kegiatan Bidang KBKR di Kabupaten dan Kota	1
Ketahanan Keluarga dan Pemberdayaan Keluarga Provinsi				
		18	Pembinaan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga diseluruh tingkatan wilayah	1 Provinsi dan 22 Kab/Kota
		19	Jumlah pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi kebijakan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (Pembangunan Keluarga) diseluruh tingkatan wilayah	1 Provinsi dan 22 Kab/Kota
		20	Persentase Kabupaten/Kota yang mengembangkan kegiatan BKB Holistic Integrative	100,00

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019
		21	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pembinaan Genre (PIK-R/M dan BKR)	100,00
		22	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan pembinaan SKL	100,00
		23	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan pembinaan PEK dan pembentukan kelompok UPPKS	100,00
		24	Jumlah Pembinaan, Monitoring, evaluasi dan Fasilitasi kegiatan Bidang KSPK	1
Advokasi, Penggerakan dan Informasi Provinsi				
		25	Persentase Stakeholders/mitra kerja dan masyarakat diseluruh tingkatan wilayah yang mendapat Pembinaan Advokasi dan KIE program KKBPK	60,00
		26	Jumlah Pembinaan dan sosialisasi kebijakan, strategi dan materi advokasi dan KIE pembangunan KKBPK	1
		27	Jumlah Penayangan informasi KKBPK melalui berbagai media cetak dan elektronik, media luar ruang dan seni dan budaya/tradisional	5 Media
		28	Jumlah Pembinaan mekanisme operasional dalam penguatan pelayanan dasar masyarakat	22
		29	Jumlah wilayah yang mendapatkan dukungan pendampingan kemitraan dalam pembangunan KKB diseluruh tingkatan wilayah	1 Provinsi dan 22 Kab/Kota
		30	Persentase kesertaan stakeholder dan mitra kerja dalam implementasi program KKBPK	100,00
		31	Pengelolaan Data dan informasi program KKBPK di Provinsi	2
		32	Jumlah pengelolaan data dan informasi program KKBPK di provinsi	1
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya				
6	Terselenggaranya Dukungan Manajemen dalam pengelolaan Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Provinsi			
Dukungan Kegiatan Manajemen/Sekretariat Provinsi				
		33	Dukungan Manajemen di Provinsi (termasuk gaji/001 dan pemeliharaan rutin/002)	13 bulan 1 Provinsi
		34	Persentase ketepatan Pembayaran Gaji dan uang makan Pegawai (Perwakilan BKKBN Provinsi)	100,00
		35	Jumlah penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran	12
		36	Jumlah penyelenggaraan Manajemen di Provinsi (Keuangan dan BMN, Perencanaan, Kepegawaian, Umum, dan Ortala)	12
		37	Persentase pengadaan sarana prasarana sesuai Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBK)	100,00
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur				
9	Terwujudnya akuntabilitas pelaksanaan pengawasan lainnya di provinsi			
V Pengawasan Provinsi				
		38	Jumlah pelaksanaan pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparat di provinsi	1
		39	Jumlah peningkatan pelaksanaan pengawasan lainnya dan penerapan ZI WBK	1
Program Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan serta Kerjasama Internasional				
10	Terselenggaranya kegiatan pelatihan, penelitian dan pengembangan di Provinsi			
VI Pelatihan Pengembangan Provinsi				
		40	Jumlah SDM provinsi (SDM Aparatur dan tenaga Fungsional, termasuk Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana -PLKB/PKB) yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan kapasitas	300
		41	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan SDM (SDM Aparatur dan tenaga Fungsional)	1
VII Penelitian dan Pengembangan Provinsi				
		42	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan program KKBPK di Provinsi yang dimanfaatkan	3 Dokumen penelitian (KKBPK dan RPJMN) / Prov
		43	Jumlah hasil-hasil penelitian dan pengembangan program KKBPK (KKB) yang dimanfaatkan	3

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019
C PROYEK PRIORITAS NASIONAL (PRO PN)				
11	Tersedianya Alokasi di Fasilitas Kesehatan	44	Pemenuhan Ketersediaan Alokasi di Fasilitas	577
12	Tersedianya promosi dan konseling kesehatan reproduksi melalui Kelompok Kegiatan	45	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi melalui Kelompok Kegiatan	997
13	Meningkatnya pengetahuan keluarga yang memiliki Baduta tentang 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	46	Keluarga yang Memiliki Baduta Terpapar 1000 HPK	117.606
14	Meningkatnya pengetahuan Remaja Putri sebagai calon ibu tentang edukasi Kespro dan Gizi melalui peran Pusat Informasi Konseling (PIK) Remaja dan Bina Ketahanan Remaja (BKR)	47	Penguatan Peran PIK Remaja dan BKR dalam Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu	786
D INDIKATOR STRATEGIS DI LUAR RENSTRA				
15	Tersedianya penetapan BMN berdasarkan status penggunaannya	48	Persentase BMN yang telah ditetapkan status penggunaannya	100,00
16	Meningkatnya akuntabilitas kinerja program dan anggaran	49	Level maturitas penilaian mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3,0 (Level 1-5)
17	Meningkatnya pengelolaan Kampung KB melalui Kelompok Kerja (POKJA) Kampung KB	50	Persentase Kampung KB yang telah memiliki Kelompok Kerja (POKJA) Kampung KB	65,00
18	Tersedianya Kampung KB Percontohan Tingkat Kabupaten dan Kota	51	Jumlah Kampung KB Percontohan Tingkat Kabupaten dan Kota	22
19	Tersedianya Pembinaan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Komprehensif di Kecamatan oleh Kabupaten dan Kota	52	Persentase Kabupaten dan Kota yang melaksanakan Pembinaan PPKS secara Komprehensif di Kecamatan	50,00
20	Tersedianya Kepala Keluarga (KK) dalam Pendataan Keluarga	53	Persentase Kepala Keluarga (KK) terdapat dalam Pendataan Keluarga	73,00
21	Meningkatnya cakupan potensi Fasilitas dan Poktan yang teregister dalam database SIGA	54	Persentase cakupan potensi Fasilitas dan Poktan yang teregister dalam database SIGA	50,00
22	Meningkatnya kualitas SDM Aparatur sesuai dengan kompetensinya	55	Persentase peta kompetensi PNS	60,00
		56	Tingkat internalisasi budaya kerja CETAK TEGAS yang dimiliki oleh PNS di BKKBN Provinsi	3,0 (Skala 1-5)

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN/BIDANG/OUTPUT	ANGGARAN (Rp)
1	Pengelolaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga Provinsi Nusa Tenggara Timur	1 Pengendalian Penduduk Provinsi	1.715.486.000
		2 Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Provinsi	2.654.102.000
		3 Ketahanan Keluarga dan Pemberdayaan Keluarga Provinsi	3.559.340.000
		4 Advokasi, Penggerakan dan Informasi Provinsi	10.720.636.000
		5 Dukungan Kegiatan Manajemen/Sekretariat Provinsi	77.934.889.000
		6 Pengawasan Provinsi	80.000.000
		7 Pelatihan Pengembangan Provinsi	1.885.754.000
		8 Penelitian dan Pengembangan Provinsi	1.371.383.000
2	Proyek Prioritas Nasional	9 Pemenuhan Ketersediaan Alokasi di Fasilitas	12.880.242.000
		10 Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi melalui Kelompok Kegiatan	143.500.000
		11 Keluarga yang Memiliki Baduta Terpapar 1000 HPK	1.100.000.000
		12 Penguatan Peran PIK Remaja dan BKR dalam Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu	2.118.281.000
		TOTAL ANGGARAN	116.923.826.000

Kepala Badan Kependudukan
Dan Keluarga Berencana Nasional,



Hasto Wardoyo

Surabaya, 16 September 2019
Kepala Perwakilan BKKBN
Provinsi Nusa Tenggara Timur,



Marianus Mau Kuru



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kusmana
Jabatan : Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Hasto Wardoyo
Jabatan : Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Surabaya, 16 September 2019

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Hasto Wardoyo

Kusmana



PERWAKILAN BKKBN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019
A. INDIKATOR SASARAN STRATEGIS				
1	Menurunnya angka kelahiran total (TFR)	1	Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) per WUS (15-49 tahun)	2,57
2	Meningkatnya prevalensi kontrasepsi modern (mCPR)	2	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (modern contraceptive prevalence rate/mCPR)	64,96
3	Menurunnya tingkat putus pakai kontrasepsi	3	Persentase penurunan angka kelidakerlangsungan pemakaian (tingkat putus pakai) kontrasepsi	24,60
4	Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet need)	4	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	10,55
5	Meningkatnya peserta KB Aktif yang menggunakan MKJP	5	Persentase Peserta KB Aktif MKJP	15,19
6	Meningkatnya peserta KB Aktif tambahan	6	Jumlah Peserta KB Aktif tambahan (Additional User)	6.045
B. INDIKATOR KINERJA RENSTRA				
Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga				
7	Terlaksananya Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga diseluruh tingkatan wilayah			
Pengendalian Penduduk Provinsi				
	7	Jumlah cakupan sinkronisasi (penyerasan) kebijakan pembangunan daerah dengan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk diseluruh tingkatan wilayah	100% (14 Kab/Kota)	
	8	Persentase Kab/Kota yang mengimplementasikan kebijakan dan strategi pengendalian penduduk (Grand Design, Profil/parameter dan Proyeksi Penduduk)	100,00	
	9	Jumlah Kabupaten/Kota yang memanfaatkan Analisis Dampak Kependudukan sebagai pendukung kebijakan Pembangunan berwawasan kependudukan	52	
	10	Jumlah pembinaan implementasi pendidikan kependudukan di Tk. Provinsi dan Kabupaten/Kota (formal, non formal, informal)	3 Model (terdiri dari 1 formal, 1 non formal, 1 informal)	
	11	Jumlah Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi Bidang Pengendalian Penduduk	1	
Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Provinsi				
	12	Cakupan pembinaan kesertaan ber-KB dan peningkatan kualitas pelayanan KB yang sesuai dengan standarisasi pelayanan KB diseluruh tingkatan wilayah	100,00	
	13	Jumlah penggerak pelayanan KB MKJP	4.778	
	14	Jumlah penggerak pelayanan KB dan KR di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan terluar (DTPK), wilayah miskin perkotaan dan sasaran khusus	3 frek/th/kab	
	15	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	85,00	
	16	Persentase Faskes yang melakukan promosi dan konseling Kesehatan dan hak-hak Reproduksi di Provinsi dan Kab/Kota	85,00	
	17	Jumlah Pembinaan, Monitoring, evaluasi dan Fasilitasi kegiatan Bidang KBKR di Kabupaten dan Kota	1	
Ketahanan Keluarga dan Pemberdayaan Keluarga Provinsi				
	18	Pembinaan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga diseluruh tingkatan wilayah	1 Provinsi dan 14 Kab/Kota	
	19	Jumlah pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi kebijakan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (Pembangunan Keluarga) diseluruh tingkatan wilayah	1 Provinsi dan 14 Kab/Kota	
	20	Persentase Kabupaten/Kota yang mengembangkan kegiatan BKB Holistic Integrative	100,00	

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019
		21	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pembinaan Genre (PK-R/M dan BKR)	100,00
		22	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan pembinaan BKL	100,00
		23	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan pembinaan PEK dan pembentukan kelompok UPPKS	100,00
		24	Jumlah Pembinaan, Monitoring, evaluasi dan Fasilitas kegiatan Bidang KSPK	1
Advokasi, Penggerakan dan Informasi Provinsi				
		25	Persentase Stakeholders/mitra kerja dan masyarakat diseluruh tingkatan wilayah yang mendapat Pembinaan Advokasi dan KIE program KKBPK	80,00
		26	Jumlah Pembinaan dan sosialisasi kebijakan, strategi dan materi advokasi dan KIE pembangunan KKBPK	1
		27	Jumlah Penayangan informasi KKBPK melalui berbagai media cetak dan elektronik, media luar ruang dan seni dan budaya/tradisional	5 Media
		28	Jumlah Pembinaan mekanisme operasional dalam penguatan pelayanan dasar masyarakat	14
		29	Jumlah wilayah yang mendapatkan dukungan pendampingan kemitraan dalam pembangunan KKB diseluruh tingkatan wilayah	1 Provinsi dan 14 Kab/Kota
		30	Persentase kesertaan stakeholder dan mitra kerja dalam implementasi program KKBPK	100,00
		31	Pengelolaan Data dan informasi program KKBPK di Provinsi	2
		32	Jumlah pengelolaan data dan informasi program KKBPK di provinsi	1
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknik Lainnya				
8	Terselenggaranya Dukungan Manajemen dalam pengelolaan Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Provinsi			
Dukungan Kegiatan Manajemen/Sekretariat Provinsi				
		33	Dukungan Manajemen di Provinsi (termasuk gaji/001 dan pemeliharaan rutin/002)	13 bulan 1 Provinsi
		34	Persentase ketepatan Pembayaran Gaji dan uang makan Pegawai (Perwakilan BKKBN Provinsi)	100,00
		35	Jumlah penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran	12
		36	Jumlah penyelenggaraan Manajemen di Provinsi (Keuangan dan BMN, Perencanaan, Kepegawaian, Umum, dan Ortala)	12
		37	Persentase pengadaan sarana prasarana sesuai Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK)	100,00
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur				
9	Terwujudnya akuntabilitas pelaksanaan pengawasan lainnya di provinsi			
V Pengawasan Provinsi				
		38	Jumlah pelaksanaan pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparat di provinsi	1
		39	Jumlah peningkatan pelaksanaan pengawasan lainnya dan penerapan ZI WBK	1
Program Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan serta Kerjasama Internasional				
10	Terselenggaranya kegiatan pelatihan, penelitian dan pengembangan di Provinsi			
VI Pelatihan Pengembangan Provinsi				
		40	Jumlah SDM provinsi (SDM Aparatur dan tenaga Fungsional, termasuk Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana -PJ,KB/PKB) yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan kapasitas	155
		41	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan SDM (SDM Aparatur dan tenaga Fungsional)	1
VII Penelitian dan Pengembangan Provinsi				
		42	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan program KKBPK di Provinsi yang dimanfaatkan	3 Dokumen penelitian (KKBPK dan RPJMN) / Prov
		43	Jumlah hasil-hasil penelitian dan pengembangan program KKBPK (KKB) yang dimanfaatkan	3

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019
C PROYEK PRIORITAS NASIONAL (PRO PN)				
11	Tersedianya Alokasi di Fasilitas Kesehatan	44	Pemenuhan Ketersediaan Alokasi di Faskes	400
12	Terlaksananya promosi dan konseling kesehatan reproduksi melalui Kelompok Kegiatan	45	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi melalui Kelompok Kegiatan	876
13	Meningkatnya pengetahuan keluarga yang memiliki Baduta tentang 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	46	Keluarga yang Memiliki Baduta Terpapar 1000 HPK	16.045
14	Meningkatnya pengetahuan Remaja Putri sebagai calon ibu tentang edukasi Kespro dan Gizi melalui peran Pusat Informasi Konseling (PIK) Remaja dan Bina Ketahanan Remaja (BKR)	47	Penguatan Peran PIK Remaja dan BKR dalam Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu	433
D INDIKATOR STRATEGIS DI LUAR RENSTRA				
15	Terlaksananya penetapan BMN berdasarkan status penggunaannya	48	Persentase BMN yang telah ditetapkan status penggunaannya	100,00
16	Meningkatnya akuntabilitas kinerja program dan anggaran	49	Level maturitas penilaian mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3,0 (Level 1-5)
17	Meningkatnya pengelolaan Kampung KB melalui Kelompok Kerja (POKJA) Kampung KB	50	Persentase Kampung KB yang telah memiliki Kelompok Kerja (POKJA) Kampung KB	65,00
18	Terbentuknya Kampung KB Percontohan Tingkat Kabupaten dan Kota	51	Jumlah Kampung KB Percontohan Tingkat Kabupaten dan Kota	14
19	Terlaksananya Pembinaan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Komprehensif di Kecamatan oleh Kabupaten dan Kota	52	Persentase Kabupaten dan Kota yang melaksanakan Pembinaan PPKS secara Komprehensif di Kecamatan	60,00
20	Terdatanya Kepala Keluarga (KK) dalam Pendataan Keluarga	53	Persentase Kepala Keluarga (KK) terdata dalam Pendataan Keluarga	60,00
21	Meningkatnya cakupan potensi Faskes dan Poktan yang teregister dalam database SIGA	54	Persentase cakupan potensi Faskes dan Poktan yang teregister dalam database SIGA	60,00
22	Meningkatnya kualitas SDM Aparatur sesuai dengan kompetensinya	55	Persentase pola kompetensi PNS	60,00
		56	Tingkat internalisasi budaya kerja CETAK TEGAS yang dimiliki oleh PNS di BKKBN Provinsi	3,0 (Skala 1-5)

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN/BIDANG/OUTPUT	ANGGARAN (Rp)
1	Pengelolaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga Provinsi Kalimantan Barat	1. Pengendalian Penduduk Provinsi	868.684.000
		2. Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Provinsi	2.106.012.000
		3. Ketahanan Keluarga dan Pemberdayaan Keluarga Provinsi	1.349.240.000
		4. Advokasi, Penggerakan dan Informasi Provinsi	4.715.421.000
		5. Dukungan Kegiatan Manajemen/Sekretariat Provinsi	43.214.683.000
		6. Pengawasan Provinsi	96.822.000
		7. Pelatihan Pengembangan Provinsi	1.060.805.000
		8. Penelitian dan Pengembangan Provinsi	811.327.000
2	Proyek Prioritas Nasional	9. Pemenuhan Ketersediaan Alokasi di Faskes	8.703.961.000
		10. Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi melalui Kelompok Kegiatan	115.500.000
		11. Keluarga yang Memiliki Baduta Terpapar 1000 HPK	910.000.000
		12. Penguatan Peran PIK Remaja dan BKR dalam Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu	1.586.543.000
		TOTAL ANGGARAN	65.531.098.000

Kepala Badan Kependudukan
Dan Keluarga Berencana Nasional,


Hasto Wardoyo

Surabaya, 16 September 2019
Kepala Perwakilan BKKBN
Provinsi Kalimantan Barat,


Kusmana



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Satyawati Kusumawijaya
Jabatan : Plt. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Hasto Wardoyo
Jabatan : Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Hasto Wardoyo

Surabaya, 16 September 2019
Pihak Pertama,

Satyawati Kusumawijaya



PERWAKILAN BKKBN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019
A INDIKATOR SASARAN STRATEGIS				
1	Menurunnya angka kelahiran total (TFR)	1	Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) per WUS (15-49 tahun)	2,38
2	Meningkatnya prevalensi kontrasepsi modern (mCPR)	2	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (modern contraceptive prevalence rate/mCPR)	69,76
3	Menurunnya tingkat putus pakai kontrasepsi	3	Persentase penurunan angka ketidakberlangsungan pemakaian (tingkat putus pakai) kontrasepsi	24,60
4	Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmetneed)	4	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	7,59
5	Meningkatnya peserta KB Aktif yang menggunakan MKJP	5	Persentase Peserta KB Aktif MKJP	14,51
6	Meningkatnya peserta KB Aktif tambahan	6	Jumlah Peserta KB Aktif tambahan (Additional User)	3.629
B INDIKATOR KINERJA RENSTRA				
Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga				
7	Terlaksananya Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga diseluruh tingkatan wilayah			
Pengendalian Penduduk Provinsi				
		7	Jumlah cakupan sinkronisasi (penyerasian) kebijakan pembangunan daerah dengan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk diseluruh tingkatan wilayah	100% (14 Kab/Kota)
		8	Persentase Kab/Kota yang mengimplementasikan kebijakan dan strategi pengendalian penduduk (Grand Design, Profil/parameter dan Proyeksi Penduduk)	100,00
		9	Jumlah Kabupaten/Kota yang memanfaatkan Analisis Dampak Kependudukan sebagai pendukung kebijakan Pembangunan berwawasan kependudukan	54
		10	Jumlah pembinaan implementasi pendidikan kependudukan di Tk. Provinsi dan Kabupaten/Kota (formal, non formal, informal)	3 Model (terdiri dari 1 formal, 1 non formal, 1 informal)
		11	Jumlah Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi Bidang Pengendalian Penduduk	1
Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Provinsi				
		12	Cakupan pembinaan kesetaraan ber-KB dan peningkatan kualitas pelayanan KB yang sesuai dengan standarisasi pelayanan KB diseluruh tingkatan wilayah	100,00
		13	Jumlah pergerakan pelayanan KB MKJP	1.796
		14	Jumlah pergerakan pelayanan KB dan KR di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan terluar (DTPK), wilayah miskin perkotaan dan sasaran khusus	3 frek/th/kab
		15	Persentase Faskes dan jejeringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	85,00
		16	Persentase Faskes yang melakukan promosi dan konseling Kesehatan dan hak-hak Reproduksi di Provinsi dan Kab/Kota	85,00
		17	Jumlah Pembinaan, Monitoring, evaluasi dan Fasilitas kegiatan Bidang KBKR di Kabupaten dan Kota	1
Ketahanan Keluarga dan Pemberdayaan Keluarga Provinsi				
		18	Pembinaan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga diseluruh tingkatan wilayah	1 Provinsi dan 14 Kab/Kota
		19	Jumlah pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi kebijakan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (Pembangunan Keluarga) diseluruh tingkatan wilayah	1 Provinsi dan 14 Kab/Kota
		20	Persentase Kabupaten/Kota yang mengembangkan kegiatan BKB Holistic Integrative	100,00

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019
		21	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pembinaan Genre (PIK-R/M dan BKR)	100,00
		22	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan pembinaan SKL	100,00
		23	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan pembinaan PEK dan pembentukan kelompok UPPKS	100,00
		24	Jumlah Pembinaan, Monitoring, evaluasi dan Fasilitasi kegiatan Bidang KSPK	1
Advokasi, Penggerakan dan Informasi Provinsi				
		25	Persentase Stakeholders/mitra kerja dan masyarakat diseluruh lingkaran wilayah yang mendapat Pembinaan Advokasi dan KIE program KKBPK	80,00
		26	Jumlah Pembinaan dan sosialisasi kebijakan, strategi dan materi advokasi dan KIE pembangunan KKBPK	1
		27	Jumlah Penayangan informasi KKBPK melalui berbagai media cetak dan elektronik, media luar ruang dan seni dan budaya/tradisional	0 Media
		28	Jumlah Pembinaan mekanisme operasional dalam penguatan pelayanan dasar masyarakat	14
		29	Jumlah wilayah yang mendapatkan dukungan pendampingan kemitraan dalam pembangunan KKB diseluruh lingkaran wilayah	1 Provinsi dan 14 Kab/Kota
		30	Persentase keseriusan stakeholder dan mitra kerja dalam implementasi program KKBPK	100,00
		31	Pengelolaan Data dan informasi program KKBPK di Provinsi	2
		32	Jumlah pengelolaan data dan informasi program KKBPK di provinsi	1
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya				
8	Terselenggaranya Dukungan Manajemen dalam pengelolaan Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Provinsi			
Dukungan Kegiatan Manajemen/Sekretariat Provinsi				
		33	Dukungan Manajemen di Provinsi (termasuk gaji/001 dan pemeliharaan rutin/002)	13 bulan 1 Provinsi
		34	Persentase ketepatan Pembayaran Gaji dan uang makan Pegawai (Perwakilan BKKBN Provinsi)	100,00
		35	Jumlah penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran	12
		36	Jumlah penyelenggaraan Manajemen di Provinsi (Keuangan dan BMN, Perencanaan, Kepegawaian, Umum, dan Orta)	12
		37	Persentase pengadaan sarana prasarana sesuai Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK)	100,00
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur				
9	Tereujudnya akuntabilitas pelaksanaan pengawasan lainnya di provinsi			
V Pengawasan Provinsi				
		38	Jumlah pelaksanaan pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur di provinsi	1
		39	Jumlah peningkatan pelaksanaan pengawasan lainnya dan penerapan ZI WBK	1
Program Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan serta Kerjasama Internasional				
10	Terselenggaranya kegiatan pelatihan, penelitian dan pengembangan di Provinsi			
VI Pelatihan Pengembangan Provinsi				
		40	Jumlah SDM provinsi (SDM Aparatur dan tenaga Fungsional, termasuk Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana -PLKB/PKB) yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan kapasitas	142
		41	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan SDM (SDM Aparatur dan tenaga Fungsional)	1
VII Penelitian dan Pengembangan Provinsi				
		42	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan program KKBPK di Provinsi yang dimanfaatkan	3 Dokumen penelitian (KKBPK dan RPJMN) / Prov
		43	Jumlah hasil-hasil penelitian dan pengembangan program KKBPK (KKB) yang dimanfaatkan	3

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019
C PROYEK PRIORITAS NASIONAL (PRO PN)				
11	Tersedianya Alokasi di Fasilitas Kesehatan	44	Pemenuhan Ketersediaan Alokasi di Fasilitas	406
12	Terlaksananya promosi dan konseling kesehatan reproduksi melalui Kelompok Kegiatan	45	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi melalui Kelompok Kegiatan	518
13	Meningkatnya pengetahuan keluarga yang memiliki Baduta tertang 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	46	Keluarga yang Memiliki Baduta Terpapar 1000 HPK	19.489
14	Meningkatnya pengetahuan Remaja Putri sebagai calon ibu tentang edukasi Kespro dan Gizi melalui peran Pusat Informasi Konseling (PIK) Remaja dan Bina Katahanan Remaja (BKR)	47	Penguatan Peran PIK Remaja dan BKR dalam Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu	377
D INDIKATOR STRATEGIS DI LUAR RENSTRA				
15	Terlaksananya penetapan BMN berdasarkan status penggunaannya	48	Persentase BMN yang telah ditetapkan status penggunaannya	100,00
16	Meningkatnya akuntabilitas kinerja program dan anggaran	49	Level maturitas penilaian mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3,0 (Level 1-5)
17	Meningkatnya pengelolaan Kampung KB melalui Kelompok Kerja (POKJA) Kampung KB	50	Persentase Kampung KB yang telah memiliki Kelompok Kerja (POKJA) Kampung KB	65,00
18	Terbentuknya Kampung KB Percontohan Tingkat Kabupaten dan Kota	51	Jumlah Kampung KB Percontohan Tingkat Kabupaten dan Kota	14
19	Terlaksananya Pembinaan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Komprehensif di Kecamatan oleh Kabupaten dan Kota	52	Persentase Kabupaten dan Kota yang melaksanakan Pembinaan PPKS secara Komprehensif di Kecamatan	50,00
20	Terdatanya Kepala Keluarga (KK) dalam Pendataan Keluarga	53	Persentase Kepala Keluarga (KK) terdata dalam Pendataan Keluarga	82,00
21	Meningkatnya cakupan potensi Fasilitas dan Poktan yang terregistrasi dalam database SIGA	54	Persentase cakupan potensi Fasilitas dan Poktan yang terregistrasi dalam database SIGA	50,00
22	Meningkatnya kualitas SDM Aparatur sesuai dengan kompetensinya	55	Persentase peta kompetensi PNS	60,00
		56	Tingkat internalisasi budaya kerja CETAK TEGAS yang dimiliki oleh PNS di BKKBN Provinsi	3,0 (Skala 1-5)

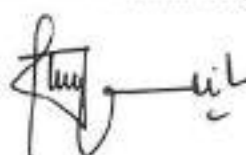
NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN/BIDANG/OUTPUT		ANGGARAN (Rp)
1.	Pengelolaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga Provinsi Kalimantan Tengah	1	Pengendalian Penduduk Provinsi	1.248.684.000
		2	Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Provinsi	1.320.062.000
		3	Ketahanan Keluarga dan Pemberdayaan Keluarga Provinsi	2.079.240.000
		4	Advokasi, Penggerakan dan Informasi Provinsi	6.056.654.000
		5	Dukungan Kegiatan Manajemen/Sekretariat Provinsi	34.032.351.000
		6	Pengawasan Provinsi	87.842.000
		7	Pelatihan Pengembangan Provinsi	988.818.000
		8	Penelitian dan Pengembangan Provinsi	718.334.000
2.	Proyek Prioritas Nasional	9	Pemenuhan Ketersediaan Alokasi di Faskes	4.299.270.000
		10	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi melalui Kelompok Kegiatan	115.500.000
		11	Keluarga yang Memiliki Baduta Terpapar 1000 HPK	840.000.000
		12	Penguatan Peran PIK Remaja dan BKR dalam Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu	1.679.741.000
		TOTAL ANGGARAN		53.166.494.000

Kepala Badan Kependudukan
Dan Keluarga Berencana Nasional,



Hasto Wardoyo

Surabaya, 16 September 2019
Pdt. Kepala Perwakilan BKKBN
Provinsi Kalimantan Tengah,



Satyawati Kusumawijaya



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eli Kusnaeli
Jabatan : Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Hasto Wardoyo
Jabatan : Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Hasto Wardoyo

Surabaya, 16 September 2019

Pihak Pertama,

Eli Kusnaeli



PERWAKILAN BKKBN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019
A INDIKATOR SASARAN STRATEGIS				
1	Menurunnya angka kelahiran total (TFR)	1	Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) per WUS (15-49 tahun)	2,57
2	Meningkatnya prevalensi kontrasepsi modern (mCPR)	2	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (modern contraceptive prevalence rate/mCPR)	63,86
3	Menurunnya tingkat putus pakai kontrasepsi	3	Persentase penurunan angka ketidakberlangsungan pemakaian (tingkat putus pakai) kontrasepsi	24,60
4	Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet need)	4	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	6,71
5	Meningkatnya peserta KB Aktif yang menggunakan MKJP	5	Persentase Peserta KB Aktif MKJP	19,91
6	Meningkatnya peserta KB Aktif tambahan	6	Jumlah Peserta KB Aktif tambahan (Additional User)	6.302
B INDIKATOR KINERJA RENSTRA				
Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga				
7	Terlaksananya Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga diseluruh tingkatan wilayah			
Pengendalian Penduduk Provinsi				
		7	Jumlah cakupan sinronisasi (penyerasian) kebijakan pembangunan daerah dengan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk diseluruh tingkatan wilayah	100% (15 Kab/Kota)
		8	Persentase Kab/Kota yang mengimplementasikan kebijakan dan strategi pengendalian penduduk (Grand Design, Profil/parameter dan Proyeksi Penduduk)	100,00
		9	Jumlah Kabupaten/Kota yang memanfaatkan Analisis Dampak Kependudukan sebagai pendukung kebijakan Pembangunan berwawasan kependudukan	59
		10	Jumlah pembinaan implementasi pendidikan kependudukan di Tk. Provinsi dan Kabupaten/Kota (formal, non formal, informal)	3 Model (terdiri dari 1 formal, 1 non formal, 1 informal)
		11	Jumlah Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi Bidang Pengendalian Penduduk	2
Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Provinsi				
		12	Cakupan pembinaan kesertaan ber-KB dan peningkatan kualitas pelayanan KB yang sesuai dengan standarisasi pelayanan KB diseluruh tingkatan wilayah	100,00
		13	Jumlah pergerakan pelayanan KB MKJP	3.892
		14	Jumlah pergerakan pelayanan KB dan KIR di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan terluar (DTPK), wilayah miskin perkotaan dan sasaran khusus	3 frek/th/kab
		15	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	85,00
		16	Persentase Faskes yang melakukan promosi dan konseling Kesehatan dan hak-hak Reproduksi di Provinsi dan Kab/Kota	85,00
		17	Jumlah Pembinaan, Monitoring, evaluasi dan Fasilitasi kegiatan Bidang KBKR di Kabupaten dan Kota	2
Ketahanan Keluarga dan Pemberdayaan Keluarga Provinsi				
		18	Pembinaan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga diseluruh tingkatan wilayah	2 Provinsi dan 15 Kab/Kota
		19	Jumlah pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi kebijakan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (Pembangunan Keluarga) diseluruh tingkatan wilayah	2 Provinsi dan 15 Kab/Kota
		20	Persentase Kabupaten/Kota yang mengembangkan kegiatan BKB Holistic Integrative	100,00

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019
		21	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pembinaan Genre (PK-RM dan BKR)	100,00
		22	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan pembinaan BKL	100,00
		23	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan pembinaan PEK dan pembentukan kelompok UPPKS	100,00
		24	Jumlah Pembinaan, Monitoring, evaluasi dan Fasilitasi kegiatan Bidang KSPK	2
Advokasi, Penggerakan dan Informasi Provinsi				
		25	Persentase Stakeholders/mitra kerja dan masyarakat diseluruh tingkatan wilayah yang mendapat Pembinaan Advokasi dan KIE program KKBPK	80,00
		26	Jumlah Pembinaan dan sosialisasi kebijakan, strategi dan materi advokasi dan KIE pembangunan KKBPK	2
		27	Jumlah Penayangan informasi KKBPK melalui berbagai media cetak dan elektronik, media luar ruang dan seni dan budaya/tradisional	5 Media
		28	Jumlah Pembinaan mekanisme operasional dalam penguatan pelayanan dasar masyarakat	10
		29	Jumlah wilayah yang mendapatkan dukungan pendampingan kemitraan dalam pembangunan KKB diseluruh lingkatan wilayah	2 Provinsi dan 15 Kab/Kota
		30	Persentase kesertaan stakeholder dan mitra kerja dalam implementasi program KKBPK	100,00
		31	Pengelolaan Data dan Informasi program KKBPK di Provinsi	2
		32	Jumlah pengelolaan data dan informasi program KKBPK di provinsi	2
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya				
8	Terselenggaranya Dukungan Manajemen dalam pengelolaan Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Provinsi			
Dukungan Kegiatan Manajemen/Sekretariat Provinsi				
		33	Dukungan Manajemen di Provinsi (termasuk gaji/001 dan pemeliharaan rutin/002)	13 bulan 2 Provinsi
		34	Persentase ketepatan Pembayaran Gaji dan uang makan Pegawai (Penwakilan BKKBN Provinsi)	100,00
		35	Jumlah penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran	12
		36	Jumlah penyelenggaraan Manajemen di Provinsi (Keuangan dan BMN, Perencanaan, Kepegawalan, Umum, dan Orala)	12
		37	Persentase pengadaan sarana prasarana sesuai Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK)	100,00
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur				
9	Terwujudnya akuntabilitas pelaksanaan pengawasan lainnya di provinsi			
V Pengawasan Provinsi				
		38	Jumlah pelaksanaan pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur di provinsi	2
		39	Jumlah peningkatan pelaksanaan pengawasan lainnya dan penerapan ZI WBK	2
Program Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan serta Kerjasama Internasional				
10	Terselenggaranya kegiatan pelatihan, penelitian dan pengembangan di Provinsi			
VI Pelatihan Pengembangan Provinsi				
		40	Jumlah SDM provinsi (SDM Aparatur dan tenaga Fungsional, termasuk Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana -PUKB/PKB) yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan kapasitas	167
		41	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan SDM (SDM Aparatur dan tenaga Fungsional)	2
VII Penelitian dan Pengembangan Provinsi				
		42	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan program KKBPK di Provinsi yang dimanfaatkan	3 Dokumen penelitian (KKBPK dan RPJMN)/Prov
		43	Jumlah hasil-hasil penelitian dan pengembangan program KKBPK (KKB) yang dimanfaatkan	3

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019
C PROYEK PRIORITAS NASIONAL (PRO PN)				
11	Tersedianya Alokasi di Fasilitas Kesehatan	44	Pemenuhan Ketersediaan Alokasi di Fasilitas	393
12	Tertaksananya promosi dan konseling kesehatan reproduksi melalui Kelompok Kegiatan	45	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi melalui Kelompok Kegiatan	521
13	Meningkatnya pengetahuan keluarga yang memiliki Baduta tentang 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	46	Keluarga yang Memiliki Baduta Terpapar 1000 HPK	8.994
14	Meningkatnya pengetahuan Remaja Putri sebagai calon ibu tentang edukasi Kespro dan Gizi melalui peran Pusat Informasi Konseling (PIK) Remaja dan Bina Kelahiran Remaja (BKR)	47	Penguatan Peran PIK Remaja dan BKR dalam Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu	450
D INDIKATOR STRATEGIS DI LUAR RENSTRA				
15	Tertaksananya penetapan BMN berdasarkan status penggunaannya	48	Persentase BMN yang telah ditetapkan status penggunaannya	100,00
16	Meningkatnya akuntabilitas kinerja program dan anggaran	49	Level maturitas penilaian mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3,0 (Level 1-5)
17	Meningkatnya pengelolaan Kampung KB melalui Kelompok Kerja (POKJA) Kampung KB	50	Persentase Kampung KB yang telah memiliki Kelompok Kerja (POKJA) Kampung KB	65,00
18	Terbentuknya Kampung KB Percontohan Tingkat Kabupaten dan Kota	51	Jumlah Kampung KB Percontohan Tingkat Kabupaten dan Kota	15
19	Tertaksananya Pembinaan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Komprehensif di Kecamatan oleh Kabupaten dan Kota	52	Persentase Kabupaten dan Kota yang melaksanakan Pembinaan PPKS secara Komprehensif di Kecamatan	50,00
20	Terdatanya Kepala Keluarga (KK) dalam Pendataan Keluarga	53	Persentase Kepala Keluarga (KK) terdata dalam Pendataan Keluarga	100,00
21	Meningkatnya cakupan potensi Fasilitas dan Poktan yang teregister dalam database SIGA	54	Persentase cakupan potensi Fasilitas dan Poktan yang teregister dalam database SIGA	50,00
22	Meningkatnya kualitas SDM Aparatur sesuai dengan kompetensinya	55	Persentase peta kompetensi PNS	60,00
		56	Tingkat internalisasi budaya kerja CETAK TEGAS yang dimiliki oleh PNS di BKKBN Provinsi	3,0 (Skala 1-5)

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN/BIDANG/OUTPUT	ANGGARAN (Rp)
1	Pengelolaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga Provinsi Kalimantan Timur	1. Pengendalian Penduduk Provinsi	1.167.054.000
		2. Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Provinsi	2.379.474.000
		3. Ketahanan Keluarga dan Pemberdayaan Keluarga Provinsi	1.977.730.000
		4. Advokasi, Penggerakan dan Informasi Provinsi	7.250.850.000
		5. Dukungan Kegiatan Manajemen/Sekretariat Provinsi	42.485.974.000
		6. Pengawasan Provinsi	90.418.000
		7. Pelatihan Pengembangan Provinsi	1.393.854.000
		8. Penelitian dan Pengembangan Provinsi	1.615.726.000
2	Proyek Prioritas Nasional	9. Pemenuhan Ketersediaan Alokasi di Fasilitas	1.173.481.000
		10. Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi melalui Kelompok Kegiatan	208.000.000
		11. Keluarga yang Memiliki Baduta Terpapar 1000 HPK	1.200.000.000
		12. Penguatan Peran PIK Remaja dan BKR dalam Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu	2.214.017.000
		TOTAL ANGGARAN	63.186.377.000

Kepala Badan Kependudukan
Dan Keluarga Berencana Nasional,

Surabaya, 16 September 2019
Kepala Perwakilan BKKBN
Provinsi Kalimantan Timur,



Hasto Wardoyo



Eli Kusnaeli



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sugiyatna
Jabatan : Plt. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Utara

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Hasto Wardoyo
Jabatan : Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Hasto Wardoyo

Surabaya, 16 September 2019

Pihak Pertama,

Sugiyatna



PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SULAWESI UTARA

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019
A. INDIKATOR SASARAN STRATEGIS				
1	Menurunnya angka kelahiran total (TFR)	1	Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) per WUS (15-49 tahun)	2,18
2	Meningkatnya prevalensi kontrasepsi modern (mCPR)	2	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (modern contraceptive prevalence rate/mCPR)	65,56
3	Menurunnya tingkat putus pakai kontrasepsi	3	Persentase penurunan angka ketidakberlangsungan pemakaian (tingkat putus pakai) kontrasepsi	24,60
4	Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet need)	4	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	7,35
5	Meningkatnya peserta KB Aktif yang menggunakan MKJP	5	Persentase Peserta KB Aktif MKJP	26,73
6	Meningkatnya peserta KB Aktif tambahan	6	Jumlah Peserta KB Aktif tambahan (Additional User)	2.534
B. INDIKATOR KINERJA RENSTRA				
Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga				
7	Terlaksananya Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga diseluruh ingkatan wilayah			
Pengendalian Penduduk Provinsi				
		7	Jumlah cakupan sinkronisasi (penyerasian) kebijakan pembangunan daerah dengan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk diseluruh tingkatan wilayah	100% (15 Kab/Kota)
		8	Persentase Kab/Kota yang mengimplementasikan kebijakan dan strategi pengendalian penduduk (Grand Design, Profil/parameter dan Proyeksi Penduduk)	100,00
		9	Jumlah Kabupaten/Kota yang memanfaatkan Analisa Dampak Kependudukan sebagai pendukung kebijakan Pembangunan berwawasan kependudukan	64
		10	Jumlah pembinaan implementasi pendidikan kependudukan di Tk. Provinsi dan Kabupaten/Kota (formal, non formal, informal)	3 Model (terdiri dari 1 formal, 1 non formal, 1 informal)
		11	Jumlah Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi Bidang Pengendalian Penduduk	1
Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Provinsi				
		12	Cakupan pembinaan kesetaraan ber-KB dan peningkatan kualitas pelayanan KB yang sesuai dengan standarisasi pelayanan KB diseluruh ingkatan wilayah	100,00
		13	Jumlah pergerakan pelayanan KB MKJP	4.118
		14	Jumlah pergerakan pelayanan KB dan KR di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan terluar (DTPK), wilayah miskin perkotaan dan sasaran khusus	3 tek/tn/kab
		15	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	85,00
		16	Persentase Faskes yang melakukan promosi dan konseling Kesehatan dan hak-hak Reproduksi di Provinsi dan Kab/Kota	85,00
		17	Jumlah Pembinaan, Monitoring, evaluasi dan Fasilitasi kegiatan Bidang KBKR di Kabupaten dan Kota	1
Ketahanan Keluarga dan Pemberdayaan Keluarga Provinsi				
		18	Pembinaan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga diseluruh ingkatan wilayah	1 Provinsi dan 15 Kab/Kota
		19	Jumlah pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi kebijakan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (Pembangunan Keluarga) diseluruh ingkatan wilayah	1 Provinsi dan 15 Kab/Kota
		20	Persentase Kabupaten/Kota yang mengembangkan kegiatan BKB Holistic Integrative	100,00

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019
		21	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pembinaan Genre (PIK-R/M dan BKR)	100,00
		22	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan pembinaan BKL	100,00
		23	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan pembinaan PEK dan pembentukan kelompok UPPKS	100,00
		24	Jumlah Pembinaan, Monitoring, evaluasi dan Fasilitasi kegiatan Bidang KSPK	1
Advokasi, Penggerakan dan Informasi Provinsi				
		25	Persentase Stakeholders/mitra kerja dan masyarakat diseluruh tingkatan wilayah yang mendapat Pembinaan Advokasi dan KIE program KKBPK	80,00
		26	Jumlah Pembinaan dan sosialisasi kebijakan, strategi dan materi advokasi dan KIE pembangunan KKBPK	1
		27	Jumlah Penayangan informasi KKBPK melalui berbagai media cetak dan elektronik, media luar ruang dan seni dan budayatradsional	5 Media
		28	Jumlah Pembinaan mekanisme operasional dalam penguatan pelayanan dasar masyarakat	15
		29	Jumlah wilayah yang mendapatkan dukungan pendampingan kemitraan dalam pembangunan KKB diseluruh tingkatan wilayah	1 Provinsi dan 15 Kab/Kota
		30	Persentase kesertaan stakeholder dan mitra kerja dalam implementasi program KKBPK	100,00
		31	Pengelolaan Data dan informasi program KKBPK di Provinsi	2
		32	Jumlah pengelolaan data dan informasi program KKBPK di provinsi	1
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya				
8	Terselenggaranya Dukungan Manajemen dalam pengelolaan Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Provinsi			
Dukungan Kegiatan Manajemen/Sekretariat Provinsi				
		33	Dukungan Manajemen di Provinsi (termasuk gaji/001 dan pemeliharaan rutin/002)	13 bulan 1 Provinsi
		34	Persentase ketepatan Pembayaran Gaji dan uang makan Pegawai (Perwakilan BKKBN Provinsi)	100,00
		35	Jumlah penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran	12
		36	Jumlah penyelenggaraan Manajemen di Provinsi (Keuangan dan BMN, Perencanaan, Kepegawaian, Umum, dan Ortala)	12
		37	Persentase pengadaan sarana prasarana sesuai Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK)	100,00
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur				
9	Terwujudnya akuntabilitas pelaksanaan pengawasan lainnya di provinsi			
V Pengawasan Provinsi				
		38	Jumlah pelaksanaan pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur di provinsi	1
		39	Jumlah peningkatan pelaksanaan pengawasan lainnya dan penerapan ZI WBK	1
Program Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan serta Kerjasama Internasional				
10	Terselenggaranya kegiatan pelatihan, penelitian dan pengembangan di Provinsi			
VI Pelatihan Pengembangan Provinsi				
		40	Jumlah SDM provinsi (SDM Aparatur dan tenaga Fungsional, termasuk Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana -PLKB/PKB) yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan kapasitas	147
		41	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan SDM (SDM Aparatur dan tenaga Fungsional)	1
VII Penelitian dan Pengembangan Provinsi				
		42	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan program KKBPK di Provinsi yang dimanfaatkan	3 Dokumen penelitian (KKBPK dan RPJMN) / Prov
		43	Jumlah hasil-hasil penelitian dan pengembangan program KKBPK (KKB) yang dimanfaatkan	3

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019
C PROYEK PRIORITAS NASIONAL (PRO PN)				
11	Tersedianya Alokasi di Fasilitas Kesehatan	44	Pemenuhan Ketersediaan Alokasi di Fasilitas	403
12	Terlaksananya promosi dan konseling kesehatan reproduksi melalui Kelompok Kegiatan	45	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi melalui Kelompok Kegiatan	1.075
13	Meningkatnya pengetahuan keluarga yang memiliki Bayi tertang 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	46	Keluarga yang Memiliki Bayi Tertang 1000 HPK	10.492
14	Meningkatnya pengetahuan Remaja Putri sebagai calon ibu tentang edukasi Kespro dan Gizi melalui peran Pusat Informasi Konseling (PIK) Remaja dan Bina Ketahanan Remaja (BKR)	47	Penguatan Peran PIK Remaja dan BKR dalam Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu	656
D INDIKATOR STRATEGIS DI LUAR RENSTRA				
15	Terlaksananya penetapan BMN berdasarkan status penggunaannya	48	Persentase BMN yang telah ditetapkan status penggunaannya	100,00
16	Meningkatnya akuntabilitas kinerja program dan anggaran	49	Level maturitas penilaian mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPI)	3,0 (Level 1-5)
17	Meningkatnya pengelolaan Kampung KB melalui Kelompok Kerja (POKJA) Kampung KB	50	Persentase Kampung KB yang telah memiliki Kelompok Kerja (POKJA) Kampung KB	66,00
18	Terbentuknya Kampung KB Percontohan Tingkat Kabupaten dan Kota	51	Jumlah Kampung KB Percontohan Tingkat Kabupaten dan Kota	15
19	Terlaksananya Pembinaan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Komprehensif di Kecamatan oleh Kabupaten dan Kota	52	Persentase Kabupaten dan Kota yang melaksanakan Pembinaan PPKS secara Komprehensif di Kecamatan	50,00
20	Terdatanya Kepala Keluarga (KK) dalam Pendataan Keluarga	53	Persentase Kepala Keluarga (KK) terdata dalam Pendataan Keluarga	100,00
21	Meningkatnya cakupan potensi Fasilitas dan Poktan yang terregistrasi dalam database SIGA	54	Persentase cakupan potensi Fasilitas dan Poktan yang terregistrasi dalam database SIGA	50,00
22	Meningkatnya kualitas SDM Aparatur sesuai dengan kompetensinya	55	Persentase peta kompetensi PNS	60,00
		56	Tingkat internalisasi budaya kerja CETAK TEGAS yang dimiliki PNS di BKKBN Provinsi	3,0 (Skala 1-5)

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN/BIDANG/OUTPUT	ANGGARAN (Rp)
1	Pengelolaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga Provinsi Sulawesi Utara	1. Pengendalian Penduduk Provinsi	885.766.000
		2. Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Provinsi	1.817.502.000
		3. Ketahanan Keluarga dan Pemberdayaan Keluarga Provinsi	1.447.990.000
		4. Advokasi, Penggerakan dan Informasi Provinsi	4.820.833.000
		5. Dukungan Kegiatan Manajemen/Sekretariat Provinsi	33.797.075.000
		6. Pengawasan Provinsi	96.080.000
		7. Pelatihan Pengembangan Provinsi	1.030.381.000
		8. Penelitian dan Pengembangan Provinsi	690.531.000
2	Proyek Prioritas Nasional	9. Pemenuhan Ketersediaan Alokasi di Fasilitas	5.729.846.000
		10. Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi melalui Kelompok Kegiatan	119.000.000
		11. Keluarga yang Memiliki Bayi Tertang 1000 HPK	1.390.000.000
		12. Penguatan Peran PIK Remaja dan BKR dalam Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu	1.732.763.000
		TOTAL ANGGARAN	53.320.799.000

Kepala Badan Kependudukan
Dan Keluarga Berencana Nasional,

Surabaya, 16 September 2019
Pdt. Kepala Perwakilan BKKBN
Provinsi Sulawesi Utara,



Hasto Wardoyo



Sugiyatna



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jamaludin
Jabatan : Plt. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Hasto Wardoyo
Jabatan : Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Hasto Wardoyo

Surabaya, 16 September 2019

Pihak Pertama,

Jamaludin



PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019
A. INDIKATOR SASARAN STRATEGIS				
1	Menurunnya angka kelahiran total (TFR)	1	Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) per WUS (15-49 tahun)	2,67
2	Meningkatnya prevalensi kontrasepsi modern (mCPR)	2	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (modern contraceptive prevalence rate/mCPR)	50,76
3	Menurunnya tingkat putus pakai kontrasepsi	3	Persentase penurunan angka ketidakberlanggahan pemakaian (tingkat putus pakai) kontrasepsi	24,80
4	Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmetneed)	4	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	12,22
5	Meningkatnya peserta KB Aktif yang menggunakan MKJP	5	Persentase Peserta KB Aktif MKJP	21,48
6	Meningkatnya peserta KB Aktif tambahan	6	Jumlah Peserta KB Aktif tambahan (Additional User)	3.469
B. INDIKATOR KINERJA RENSTRA				
Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga				
7	Terlaksananya Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga diseluruh tingkatan wilayah			
Pengendalian Penduduk Provinsi				
		7	Jumlah cakupan sinkronisasi (penyerasian) kebijakan pembangunan daerah dengan kebijakan pengendalian kualitas penduduk diseluruh tingkatan wilayah	100% (17 Kab/Kota)
		8	Persentase Kab/Kota yang mengimplementasikan kebijakan dan strategi pengendalian penduduk (Grand Design, Profil/parameter dan Proyeksi Penduduk)	100,00
		9	Jumlah Kabupaten/Kota yang memanfaatkan Analisis Dampak Kependudukan sebagai pendukung kebijakan Pembangunan berwawasan kependudukan	91
		10	Jumlah pembinaan implementasi pendidikan kependudukan di Tk. Provinsi dan Kabupaten/Kota (formal, non formal, informal)	3 Model (terdiri dari 1 formal, 1 non formal, 1 informal)
		11	Jumlah Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi Bidang Pengendalian Penduduk	1
Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Provinsi				
		12	Cakupan pembinaan kesetaraan ber-KB dan peningkatan kualitas pelayanan KB yang sesuai dengan standarisasi pelayanan KB diseluruh tingkatan wilayah	100,00
		13	Jumlah penggerakan pelayanan KB MKJP	2.885
		14	Jumlah penggerakan pelayanan KB dan KR di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan terluar (DTPK), wilayah miskin perkotaan dan sasaran khusus	3 frek/th/kab
		15	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	85,00
		16	Persentase Faskes yang melakukan promosi dan konseling Kesehatan dan hak-hak Reproduksi di Provinsi dan Kab/Kota	85,00
		17	Jumlah Pembinaan, Monitoring, evaluasi dan Fasilitasi kegiatan Bidang KBKR di Kabupaten dan Kota	1
Ketahanan Keluarga dan Pemberdayaan Keluarga Provinsi				
		18	Pembinaan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga diseluruh tingkatan wilayah	1 Provinsi dan 17 Kab/Kota
		19	Jumlah pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi kebijakan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (Pembangunan Keluarga) diseluruh tingkatan wilayah	1 Provinsi dan 17 Kab/Kota
		20	Persentase Kabupaten/Kota yang mengembangkan kegiatan BKB Holistic Integrative	100,00

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019
		21	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pembinaan Genre (PK-R/M dan BKR)	100,00
		22	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan pembinaan BKL	100,00
		23	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan pembinaan PEK dan pembentukan kelompok UPPKS	100,00
		24	Jumlah Pembinaan, Monitoring, evaluasi dan Fasilitasi kegiatan Bidang KSPK	1
Advokasi, Penggerakan dan Informasi Provinsi				
		25	Persentase Stakeholders/mitra kerja dan masyarakat diseluruh tingkatan wilayah yang mendapat Pembinaan Advokasi dan KIE program KKBPK	80,00
		26	Jumlah Pembinaan dan sosialisasi kebijakan, strategi dan materi advokasi dan KIE pembangunan KKBPK	1
		27	Jumlah Penayangan informasi KKBPK melalui berbagai media cetak dan elektronik, media luar ruang dan seni dan budaya/tradisional	5 Media
		28	Jumlah Pembinaan mekanisme operasional dalam penguatan pelayanan dasar masyarakat	17
		29	Jumlah wilayah yang mendapatkan dukungan pendampingan kemitraan dalam pembangunan KKB diseluruh tingkatan wilayah	1 Provinsi dan 17 Kab/Kota
		30	Persentase kesertaan stakeholder dan mitra kerja dalam implementasi program KKBPK	100,00
		31	Pengelolaan Data dan informasi program KKBPK di Provinsi	2
		32	Jumlah pengelolaan data dan informasi program KKBPK di provinsi	1
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya				
8	Terselenggaranya Dukungan Manajemen dalam pengelolaan Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Provinsi			
Dukungan Kegiatan Manajemen/Sekretariat Provinsi				
		33	Dukungan Manajemen di Provinsi (termasuk gaji/001 dan pemeliharaan rutin/002)	13 bulan 1 Provinsi
		34	Persentase ketepatan Pembayaran Gaji dan uang makan Pegawai (Perwakilan BKKBN Provinsi)	100,00
		35	Jumlah penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran	12
		36	Jumlah penyelenggaraan Manajemen di Provinsi (Keuangan dan BMN, Perencanaan, Kepegawaian, Umum, dan Ortala)	12
		37	Persentase pengadaan sarana prasarana sesuai Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK)	100,00
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur				
9	Terwujudnya akuntabilitas pelaksanaan pengawasan lainnya di provinsi			
V Pengawasan Provinsi				
		38	Jumlah pelaksanaan pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur di provinsi	1
		39	Jumlah peningkatan pelaksanaan pengawasan lainnya dan penerapan ZI WBK	1
Program Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan serta Kerjasama Internasional				
10	Terselenggaranya kegiatan pelatihan, penelitian dan pengembangan di Provinsi			
VI Pelatihan Pengembangan Provinsi				
		40	Jumlah SDM provinsi (SDM Aparatur dan tenaga Fungsional, termasuk Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana -PKB/PKB) yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan kapasitas	198
		41	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan SDM (SDM Aparatur dan tenaga Fungsional)	1
VII Penelitian dan Pengembangan Provinsi				
		42	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan program KKBPK di Provinsi yang dimanfaatkan	3 Dokumen penelitian (KKBPK dan RPJMN)/Prov
		43	Jumlah hasil-hasil penelitian dan pengembangan program KKBPK (KKB) yang dimanfaatkan	3

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019
C PROYEK PRIORITAS NASIONAL (PRO PN)				
11	Tersedianya Alokasi di Fasilitas Kesehatan	44	Pemenuhan Ketersediaan Alokasi di Fasilitas	423
12	Tertaksananya promosi dan konseling kesehatan reproduksi melalui Kelompok Kegiatan	45	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi melalui Kelompok Kegiatan	789
13	Meningkatnya pengetahuan keluarga yang memiliki Baduta tentang 1000 Hari Pertama Kehidupan (H-PKC)	46	Keluarga yang Memiliki Baduta Terpapar 1000 HPK	8.399
14	Meningkatnya pengetahuan Remaja Putri sebagai calon ibu tentang edukasi Kespro dan Gizi melalui peran Pusat Informasi Konseling (PIK) Remaja dan Bina Ketahanan Remaja (BKR)	47	Penguatan Peran PIK Remaja dan BKR dalam Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu	348
D INDIKATOR STRATEGIS DI LUAR RENSTRA				
15	Tertaksananya penetapan BMN berdasarkan status penggunaannya	48	Persentase BMN yang telah ditetapkan status penggunaannya	100,00
16	Meningkatnya akuntabilitas kinerja program dan anggaran	49	Level maturitas penilaian mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3,0 (Level 1-5)
17	Meningkatnya pengelolaan Kampung KB melalui Kelompok Kerja (POKJA) Kampung KB	50	Persentase Kampung KB yang telah memiliki Kelompok Kerja (POKJA) Kampung KB	65,00
18	Terbentuknya Kampung KB Percontohan Tingkat Kabupaten dan Kota	51	Jumlah Kampung KB Percontohan Tingkat Kabupaten dan Kota	17
19	Tertaksananya Pembinaan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Komprehensif di Kecamatan oleh Kabupaten dan Kota	52	Persentase Kabupaten dan Kota yang melaksanakan Pembinaan PPKS secara Komprehensif di Kecamatan	50,00
20	Terdapatnya Kepala Keluarga (KK) dalam Pendataan Keluarga	53	Persentase Kepala Keluarga (KK) terdapat dalam Pendataan Keluarga	95,00
21	Meningkatnya cakupan potensi Fasilitas dan Poktan yang teregister dalam database SIGA	54	Persentase cakupan potensi Fasilitas dan Poktan yang teregister dalam database SIGA	50,00
22	Meningkatnya kualitas SDM Aparatur sesuai dengan kompetensinya	55	Persentase peta kompetensi PNS	60,00
		56	Tingkat internalisasi budaya kerja CETAK TEGAS yang dimiliki oleh PNS di BKKBN Provinsi	3,0 (Skala 1-5)

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN/BIDANG/OUTPUT	ANGGARAN (Rp)
1	Pengelolaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga Provinsi Sulawesi Tenggara	1. Pengendalian Penduduk Provinsi	1.383.226.000
		2. Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Provinsi	1.558.832.000
		3. Ketahanan Keluarga dan Pemberdayaan Keluarga Provinsi	1.443.890.000
		4. Advokasi, Penggerakan dan Informasi Provinsi	4.913.044.000
		5. Dukungan Kegiatan Manajemen/Sekretariat Provinsi	46.188.898.000
		6. Pengawasan Provinsi	87.042.000
		7. Pelatihan Pengembangan Provinsi	1.213.580.000
		8. Penelitian dan Pengembangan Provinsi	1.116.841.000
2	Proyek Prioritas Nasional	9. Pemenuhan Ketersediaan Alokasi di Fasilitas	11.975.104.000
		10. Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi melalui Kelompok Kegiatan	126.000.000
		11. Keluarga yang Memiliki Baduta Terpapar 1000 HPK	1.190.000.000
		12. Penguatan Peran PIK Remaja dan BKR dalam Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu	1.819.507.000
		TOTAL ANGGARAN	73.020.864.000

Kepala Badan Kependudukan
Dan Keluarga Berencana Nasional,


Hasto Wardoyo

Surabaya, 16 September 2019
Plt. Kepala Perwakilan BKKBN
Provinsi Sulawesi Tenggara,


Jamaludin



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hj. Rini Riatika Djohari
Jabatan : Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Hasto Wardoyo
Jabatan : Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Hasto Wardoyo

Surabaya, 16 September 2019

Pihak Pertama,

Hj. Rini Riatika Djohari



PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SULAWESI SELATAN

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019
A. INDIKATOR SASARAN STRATEGIS				
1	Menurunnya angka kelahiran total (TFR)	1	Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) per WUS (15-49 tahun)	2,28
2	Meningkatnya prevalensi kontrasepsi modern (mCPR)	2	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (modern contraceptive prevalence rate/mCPR)	63,25
3	Menurunnya tingkat putus pakai kontrasepsi	3	Persentase penurunan angka ketidakberlangsungan pemakaian (tingkat putus pakai) kontrasepsi	24,60
4	Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmetneed)	4	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	12,46
5	Meningkatnya peserta KB Aktif yang menggunakan MKJP	5	Persentase Peserta KB Aktif MKJP	21,54
6	Meningkatnya peserta KB Aktif tambahan	6	Jumlah Peserta KB Aktif tambahan (Additional User)	11.096
B. INDIKATOR KINERJA RENSTRA				
Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga				
7	Tertaksennya Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga diseluruh tingkatan wilayah			
Pengendalian Penduduk Provinsi				
		7	Jumlah cakupan sinkronisasi (penyeragaman) kebijakan pembangunan daerah dengan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk diseluruh tingkatan wilayah	100% (24 Kab/Kota)
		8	Persentase Kab/Kota yang mengimplementasikan kebijakan dan strategi pengendalian penduduk (Grand Design, Profilparameter dan Proyeksi Penduduk)	100,00
		9	Jumlah Kabupaten/Kota yang memanfaatkan Analisa Dampak Kependudukan sebagai pendukung kebijakan Pembangunan berwawasan kependudukan	110
		10	Jumlah pembinaan implementasi pendidikan kependudukan di Tk. Provinsi dan Kabupaten/Kota (formal, non formal, informal)	3 Model (terdiri dari 1 formal, 1 non formal, 1 informal)
		11	Jumlah Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi Bidang Pengendalian Penduduk	1
Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Provinsi				
		12	Cakupan pembinaan kesetaraan ber-KB dan peningkatan kualitas pelayanan KB yang sesuai dengan standarisasi pelayanan KB diseluruh tingkatan wilayah	100,00
		13	Jumlah penggerakan pelayanan KB MKJP	9.146
		14	Jumlah penggerakan pelayanan KB dan KR di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan terluar (DTPK), wilayah miskin perkotaan dan sasaran khusus	3 frek/th/kab
		15	Persentase Fasilitas dan jaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	85,00
		16	Persentase Fasilitas yang melakukan promosi dan konseling Kesehatan dan hak-hak Reproduksi di Provinsi dan Kab/Kota	85,00
		17	Jumlah Pembinaan, Monitoring, evaluasi dan Fasilitas kegiatan Bidang KBKR di Kabupaten dan Kota	1
Ketahanan Keluarga dan Pemberdayaan Keluarga Provinsi				
		18	Pembinaan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga diseluruh tingkatan wilayah	1 Provinsi dan 24 Kab/Kota
		19	Jumlah pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi kebijakan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (Pembangunan Keluarga) diseluruh tingkatan wilayah	1 Provinsi dan 24 Kab/Kota
		20	Persentase Kabupaten/Kota yang mengembangkan kegiatan BKB Holistic Integrative	100,00

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019
		21	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pembinaan Genre (PIK-RIM dan BKR)	100,00
		22	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan pembinaan BKL	100,00
		23	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan pembinaan PEK dan pembentukan kelompok UPPKS	100,00
		24	Jumlah Pembinaan, Monitoring, evaluasi dan Fasilitasi kegiatan Bidang KSPK	1
Advokasi, Penggerakan dan Informasi Provinsi				
		25	Persentase Stakeholders/mitra kerja dan masyarakat diseluruh lingkaran wilayah yang mendapat Pembinaan Advokasi dan KIE program KKBPK	80,00
		26	Jumlah Pembinaan dan sosialisasi kebijakan, strategi dan materi advokasi dan KIE pembangunan KKBPK	1
		27	Jumlah Penayangan informasi KKBPK melalui berbagai media cetak dan elektronik, media luar ruang dan seni dan budaya/tradisional	5 Media
		28	Jumlah Pembinaan mekanisme operasional dalam penguatan pelayanan dasar masyarakat	24
		29	Jumlah wilayah yang mendapatkan dukungan pendampingan kemitraan dalam pembangunan KKB diseluruh lingkaran wilayah	1 Provinsi dan 24 Kab/Kota
		30	Persentase kesertaan stakeholder dan mitra kerja dalam implementasi program KKBPK	100,00
		31	Pengelolaan Data dan informasi program KKBPK di Provinsi	2
		32	Jumlah pengelolaan data dan informasi program KKBPK di provinsi	1
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya				
8	Terselenggaranya Dukungan Manajemen dalam pengelolaan Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Provinsi			
Dukungan Kegiatan Manajemen/Sekretariat Provinsi				
		33	Dukungan Manajemen di Provinsi (termasuk gaji/GC1 dan pemeliharaan rutin/GC2)	13 bulan 1 Provinsi
		34	Persentase ketepatan Pembayaran Gaji dan uang makan Pegawai (Perwakilan BKKBN Provinsi)	100,00
		35	Jumlah penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran	12
		36	Jumlah penyelenggaraan Manajemen di Provinsi (Keuangan dan BMN, Perencanaan, Kepegawaian, Umum, dan Ortala)	12
		37	Persentase pengadaan sarana prasarana sesuai Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK)	100,00
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur				
9	Terwujudnya akuntabilitas pelaksanaan pengawasan lainnya di provinsi			
V Pengawasan Provinsi				
		38	Jumlah pelaksanaan pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparaturnya di provinsi	1
		39	Jumlah peningkatan pelaksanaan pengawasan lainnya dan penerapan ZI WBK	1
Program Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan serta Kerjasama Internasional				
10	Terselenggaranya kegiatan pelatihan, penelitian dan pengembangan di Provinsi			
VI Pelatihan Pengembangan Provinsi				
		40	Jumlah SDM provinsi (SDM Aparatur dan tenaga Fungsional termasuk Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana -PLKB/PKB) yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan kapasitas	485
		41	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan SDM (SDM Aparatur dan tenaga Fungsional)	1
VII Penelitian dan Pengembangan Provinsi				
		42	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan program KKBPK di Provinsi yang dimanfaatkan	3 Dokumen penelitian (KKBPK dan RPJMN) / Prov
		43	Jumlah hasil-hasil penelitian dan pengembangan program KKBPK (KKB) yang dimanfaatkan	3

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019
C PROYEK PRIORITAS NASIONAL (PRO PN)				
11	Tersedianya Alokasi di Fasilitas Kesehatan	44	Pemenuhan Ketersediaan Alokasi di Fasilitas	648
12	Terlaksananya promosi dan konseling kesehatan reproduksi melalui Kelompok Kegiatan	45	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi melalui Kelompok Kegiatan	2.383
13	Meningkatnya pengetahuan keluarga yang memiliki Bidan Terpapar 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	46	Keluarga yang Memiliki Bidan Terpapar 1000 HPK	21.299
14	Meningkatnya pengetahuan Remaja Putri sebagai calon ibu tentang edukasi Kespro dan Gizi melalui peran Pusat Informasi Konseling (PIK) Remaja dan Bina Ketahanan Remaja (BKR)	47	Penguatan Peran PIK Remaja dan BKR dalam Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu	1.607
D INDIKATOR STRATEGIS DI LUAR RENSTRA				
15	Terlaksananya penelapan BMN berdasarkan status penggunaannya	48	Persentase BMN yang telah ditetapkan status penggunaannya	100,00
16	Meningkatnya akuntabilitas kinerja program dan anggaran	49	Level maturitas penilaian mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3,0 (Level 1-3)
17	Meningkatnya pengelolaan Kampung KB melalui Kelompok Kerja (POKJA) Kampung KB	50	Persentase Kampung KB yang telah memiliki Kelompok Kerja (POKJA) Kampung KB	65,00
18	Terbentuknya Kampung KB Percontohan Tingkat Kabupaten dan Kota	51	Jumlah Kampung KB Percontohan Tingkat Kabupaten dan Kota	24
19	Terlaksananya Pembinaan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Komprehensif di Kecamatan di Kabupaten dan Kota	52	Persentase Kabupaten dan Kota yang melaksanakan Pembinaan PPKS secara Komprehensif di Kecamatan	50,00
20	Terdatanya Kepala Keluarga (KK) dalam Pendataan Keluarga	53	Persentase Kepala Keluarga (KK) terdata dalam Pendataan Keluarga	100,00
21	Meningkatnya cakupan potensi Fasilitas dan Poktan yang teregistrasi dalam database SIGA	54	Persentase cakupan potensi Fasilitas dan Poktan yang teregistrasi dalam database SIGA	50,00
22	Meningkatnya kualitas SDM Aparatur sesuai dengan kompetensinya	55	Persentase peta kompetensi PNS	60,00
		56	Tingkat internalisasi budaya kerja CETAK TEGAS yang dimiliki oleh PNS di BKKBN Provinsi	3,0 (Skala 1-5)

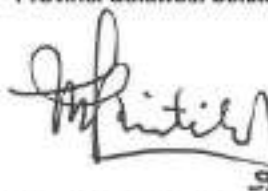
NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN/BIDANG/OUTPUT	ANGGARAN (Rp)
1	Pengelolaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga Provinsi Sulawesi Selatan	1 Pengendalian Penduduk Provinsi	1.655.986.000
		2 Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Provinsi	3.361.777.000
		3 Ketahanan Keluarga dan Pemberdayaan Keluarga Provinsi	4.069.740.000
		4 Advokasi, Penggerakan dan Informasi Provinsi	12.473.164.000
		5 Dukungan Kegiatan Manajemen/Sekretariat Provinsi	175.333.546.000
		6 Pengawasan Provinsi	90.000.000
		7 Pelatihan Pengembangan Provinsi	2.565.434.000
		8 Penelitian dan Pengembangan Provinsi	1.670.932.000
2	Proyek Prioritas Nasional	9 Pemenuhan Ketersediaan Alokasi di Fasilitas	14.309.386.000
		10 Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi melalui Kelompok Kegiatan	162.500.000
		11 Keluarga yang Memiliki Bidan Terpapar 1000 HPK	1.440.000.000
		12 Penguatan Peran PIK Remaja dan BKR dalam Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu	2.311.794.000
		TOTAL ANGGARAN	220.443.298.000

Kepala Badan Kependudukan
Dan Keluarga Berencana Nasional,



Hasto Wardoyo

Surabaya, 16 September 2019
Kepala Perwakilan BKKBN
Provinsi Sulawesi Selatan,



Hj. Rini Riatika Djohari



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi Ritamariani
Jabatan : Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Barat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Hasto Wardoyo
Jabatan : Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Surabaya, 16 September 2019

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Hasto Wardoyo

Andi Ritamariani



PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SULAWESI BARAT

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019
A INDIKATOR SASARAN STRATEGIS				
1	Menurunnya angka kelahiran total (TFR)	1	Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) per WUS (15-49 tahun)	2,57
2	Meningkatnya prevalensi kontrasepsi modern (mCPR)	2	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (modern contraceptive prevalence rate/mCPR)	53,25
3	Menurunnya tingkat putus pakai kontrasepsi	3	Persentase penurunan angka ketidakberlangsungan pemakaian (tingkat putus pakai) kontrasepsi	24,00
4	Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmetneed)	4	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	11,67
5	Meningkatnya peserta KB Aktif yang menggunakan MKJP	5	Persentase Peserta KB Aktif MKJP	22,88
6	Meningkatnya peserta KB Aktif tambahan	6	Jumlah Peserta KB Aktif tambahan (Additional User)	1.834
B INDIKATOR KINERJA RENSTRA				
Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga				
7	Terlaksananya Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga diseluruh tingkatan wilayah			
Pengendalian Penduduk Provinsi				
	7	Jumlah cakupan sinkronisasi (penyerasian) kebijakan pembangunan daerah dengan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk diseluruh tingkatan wilayah	100% (6 Kab/Kota)	
	8	Persentase Kab/Kota yang mengimplementasikan kebijakan dan strategi pengendalian penduduk (Grand Design, Profil/parameter dan Proyeksi Penduduk)	100,00	
	9	Jumlah Kabupaten/Kota yang memanfaatkan Analisis Dampak Kependudukan sebagai pendukung kebijakan Pembangunan berwawasan kependudukan	36	
	10	Jumlah pembinaan implementasi pendidikan kependudukan di Tk. Provinsi dan Kabupaten/Kota (formal, non formal, informal)	3 Model (terdiri dari 1 formal, 1 non formal, 1 informal)	
	11	Jumlah Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi Bidang Pengendalian Penduduk	1	
Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Provinsi				
	12	Cakupan pembinaan kesetaraan ber-KB dan peningkatan kualitas pelayanan KB yang sesuai dengan standarisasi pelayanan KB diseluruh tingkatan wilayah	100,00	
	13	Jumlah penggerakan pelayanan KB MKJP	1.431	
	14	Jumlah penggerakan pelayanan KB dan KR di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan terluar (DTPK), wilayah miskin perkotaan dan sasaran khusus	3 fak/th/kab	
	15	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	85,00	
	16	Persentase Faskes yang melakukan promosi dan konseling Kesehatan dan hak-hak Reproduksi di Provinsi dan Kab/Kota	85,00	
	17	Jumlah Pembinaan, Monitoring, evaluasi dan Fasilitasi kegiatan Bidang KBKR di Kabupaten dan Kota	1	
Ketahanan Keluarga dan Pemberdayaan Keluarga Provinsi				
	18	Pembinaan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga diseluruh tingkatan wilayah	1 Provinsi dan 6 Kab/Kota	
	19	Jumlah pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi kebijakan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (Pembangunan Keluarga) diseluruh tingkatan wilayah	1 Provinsi dan 6 Kab/Kota	
	20	Persentase Kabupaten/Kota yang mengembangkan kegiatan BKB Holistic Integrative	100,00	

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019
		21	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pembinaan Genre (PIK-RM dan BKR)	100,00
		22	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan pembinaan BKL	100,00
		23	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan pembinaan PEK dan pembentukan kelompok UPPKS	100,00
		24	Jumlah Pembinaan, Monitoring, evaluasi dan Fasilitasi kegiatan Bidang KSPK	1
Advokasi, Penggerakan dan Informasi Provinsi				
		25	Persentase Stakeholders/mitra kerja dan masyarakat diseluruh tingkatan wilayah yang mencapai Pembinaan Advokasi dan KIE program KKBPK	80,00
		26	Jumlah Pembinaan dan sosialisasi kebijakan, strategi dan materi advokasi dan KIE pembangunan KKBPK	1
		27	Jumlah Penayangan informasi KKBPK melalui berbagai media cetak dan elektronik, media luar ruang dan seni dan budaya/tradisional	5 Media
		28	Jumlah Pembinaan mekanisme operasional dalam pengujian pelayanan dasar masyarakat	6
		29	Jumlah wilayah yang mendapatkan dukungan pendampingan kemitraan dalam pembangunan KKB diseluruh tingkatan wilayah	1 Provinsi dan 6 Kab/Kota
		30	Persentase kesertaan stakeholder dan mitra kerja dalam implementasi program KKBPK	100,00
		31	Pengelolaan Data dan informasi program KKBPK di Provinsi	2
		32	Jumlah pengelolaan data dan informasi program KKBPK di provinsi	1
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya				
8	Terselenggaranya Dukungan Manajemen dalam pengelolaan Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Provinsi			
Dukungan Kegiatan Manajemen/Sekretariat Provinsi				
		33	Dukungan Manajemen di Provinsi (termasuk gaji/001 dan pemeliharaan rutin/002)	13 bulan 1 Provinsi
		34	Persentase ketepatan Pembayaran Gaji dan uang makan Pegawai (Perwakilan BKKBN Provinsi)	100,00
		35	Jumlah penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran	12
		36	Jumlah penyelenggaraan Manajemen di Provinsi (Keuangan dan BMN, Perencanaan, Kepegawaian, Umum, dan Ortala)	12
		37	Persentase pengadaan sarana prasarana sesuai Standar Berang dan Standar Kebutuhan (SBSK)	100,00
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur				
9	Terwujudnya akuntabilitas pelaksanaan pengawasan lainnya di provinsi			
V Pengawasan Provinsi				
		38	Jumlah pelaksanaan pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparat di provinsi	1
		39	Jumlah peningkatan pelaksanaan pengawasan lainnya dan penerapan ZI WBK	1
Program Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan serta Kerjasama Internasional				
10	Terselenggaranya kegiatan pelatihan, penelitian dan pengembangan di Provinsi			
VI Pelatihan Pengembangan Provinsi				
		40	Jumlah SDM provinsi (SDM Aparatur dan tenaga Fungsional, termasuk Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana -PLKB/PKB) yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan kapasitas	92
		41	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan SDM (SDM Aparatur dan tenaga Fungsional)	1
VII Penelitian dan Pengembangan Provinsi				
		42	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan program KKBPK di Provinsi yang dimanfaatkan	3 Dokumen penelitian (KKBPK dan RPJMN)/Prov
		43	Jumlah hasil-hasil penelitian dan pengembangan program KKBPK (KKB) yang dimanfaatkan	3

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019
C PROYEK PRIORITAS NASIONAL (PRO PN)				
11	Tersedianya Alokasi di Fasilitas Kesehatan	44	Pemenuhan Ketersediaan Alokasi di Fasilitas	128
12	Terlaksanannya promosi dan konseling kesehatan reproduksi melalui Kelompok Kegiatan	45	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi melalui Kelompok Kegiatan	227
13	Meningkatnya pengetahuan keluarga yang memiliki Baduta tentang 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	46	Keluarga yang Memiliki Baduta Terpapar 1000 HPK	37.432
14	Meningkatnya pengetahuan Remaja Putri sebagai calon ibu tentang edukasi Kespro dan Gizi melalui peran Pusat Informasi Konseling (PIK) Remaja dan Bina Ketahanan Remaja (BKR)	47	Penguatan Peran PIK Remaja dan BKR dalam Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu	161
D INDIKATOR STRATEGIS DI LUAR RENSTRA				
15	Terlaksanannya penetapan BMN berdasarkan status penggunaannya	48	Persentase BMN yang telah ditetapkan status penggunaannya	100,00
16	Meningkatnya akuntabilitas kinerja program dan anggaran	49	Level maturitas penilaian mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3.0 (Level 1-5)
17	Meningkatnya pengelolaan Kampung KB melalui Kelompok Kerja (POKJA) Kampung KB	50	Persentase Kampung KB yang telah memiliki Kelompok Kerja (POKJA) Kampung KB	65,00
18	Terbentuknya Kampung KB Percontohan Tingkat Kabupaten dan Kota	51	Jumlah Kampung KB Percontohan Tingkat Kabupaten dan Kota	6
19	Terlaksanannya Pembinaan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Komprehensif di Kecamatan oleh Kabupaten dan Kota	52	Persentase Kabupaten dan Kota yang melaksanakan Pembinaan PPKS secara Komprehensif di Kecamatan	50,00
20	Terdapatnya Kepala Keluarga (KK) dalam Pendataan Keluarga	53	Persentase Kepala Keluarga (KK) terdapat dalam Pendataan Keluarga	100,00
21	Meningkatnya cakupan potensi Fasilitas dan Poktan yang terregistrasi dalam database SIGA	54	Persentase cakupan potensi Fasilitas dan Poktan yang terregistrasi dalam database SIGA	50,00
22	Meningkatnya kualitas SDM Aparatur sesuai dengan kompetensinya	55	Persentase peta kompetensi PNS	60,00
		56	Tingkat internalisasi budaya kerja GETAK TEGAS yang dimiliki oleh PNS di BKKBN Provinsi	3.0 (Skala 1-5)

NO	KEGIATAN	SUB-KEGIATAN/BIODANG/OUTPUT	ANGGARAN (Rp)
1	Pengelolaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga Provinsi Sulawesi Barat	1. Pengendalian Penduduk Provinsi	762.540.000
		2. Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Provinsi	909.102.000
		3. Ketahanan Keluarga dan Pemberdayaan Keluarga Provinsi	1.183.240.000
		4. Advokasi, Penggerakan dan Informasi Provinsi	3.487.269.000
		5. Dukungan Kegiatan Manajemen/Sekretariat Provinsi	31.035.962.000
		6. Pengawasan Provinsi	50.000.000
		7. Pelatihan Pengembangan Provinsi	788.135.000
		8. Penelitian dan Pengembangan Provinsi	607.234.000
2	Proyek Prioritas Nasional	9. Pemenuhan Ketersediaan Alokasi di Fasilitas	2.415.430.000
		10. Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi melalui Kelompok Kegiatan	105.500.000
		11. Keluarga yang Memiliki Baduta Terpapar 1000 HPK	480.000.000
		12. Penguatan Peran PIK Remaja dan BKR dalam Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu	1.287.704.000
		TOTAL ANGGARAN	43.393.146.000

Kepala Badan Kependudukan
Dan Keluarga Berencana Nasional,

Surabaya, 16 September 2019
Kepala Perwakilan BKKBN
Provinsi Sulawesi Barat,



Hasto Wardoyo



Andi Ritamawati



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Edi Muin
Jabatan : Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Gorontalo

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Hasto Wardoyo
Jabatan : Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Hasto Wardoyo

Surabaya, 16 September 2019

Pihak Pertama,

Muhammad Edi Muin



PERWAKILAN BKKBN PROVINSI GORONTALO

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019
A INDIKATOR SASARAN STRATEGIS				
1	Menurunnya angka kelahiran total (TFR)	1	Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) per WUS (15-49 tahun)	2,38
2	Meningkatnya prevalensi kontrasepsi modern (mCPR)	2	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (modern contraceptive prevalence rate/mCPR)	64,05
3	Menurunnya tingkat putus pakai kontrasepsi	3	Persentase penurunan angka ketidakberlangsungan pemakaian (tingkat putus pakai) kontrasepsi	24,00
4	Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmetneed)	4	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	8,31
5	Meningkatnya peserta KB Aktif yang menggunakan MKJP	5	Persentase Peserta KB Aktif MKJP	37,99
6	Meningkatnya peserta KB Aktif tambahan	6	Jumlah Peserta KB Aktif tambahan (Additional User)	1.635
B INDIKATOR KINERJA RENSTRA				
Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga				
7	Terlaksananya Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga diseluruh tingkatan wilayah			
Pengendalian Penduduk Provinsi				
		7	Jumlah cakupan sinkronisasi (penyerasian) kebijakan pembangunan daerah dengan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk diseluruh tingkatan wilayah	100% (6 Kab/Kota)
		8	Persentase Kab/Kota yang mengimplementasikan kebijakan dan strategi pengendalian penduduk (Grand Design, Profil/parameter dan Proyeksi Penduduk)	100,00
		9	Jumlah Kabupaten/Kota yang memanfaatkan Analisis Dampak Kependudukan sebagai pendukung kebijakan Pembangunan berwawasan kependudukan	33
		10	Jumlah pembinaan implementasi pendidikan kependudukan di Tk. Provinsi dan Kabupaten/Kota (formal, non formal, informal)	3 Model (terdiri dari 1 formal, 1 non formal, 1 informal)
		11	Jumlah Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi Bidang Pengendalian Penduduk	1
Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Provinsi				
		12	Cakupan pembinaan kesetaraan ber-KB dan peningkatan kualitas pelayanan KB yang sesuai dengan standarisasi pelayanan KB diseluruh tingkatan wilayah	100,00
		13	Jumlah penggerakan pelayanan KB MKJP	2.188
		14	Jumlah penggerakan pelayanan KB dan KR di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan terluar (DTPK), wilayah miskin perkotaan dan sasaran khusus	3 fak/thkab
		15	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	85,00
		16	Persentase Faskes yang melakukan promosi dan konseling Kesehatan dan hak-hak Reproduksi di Provinsi dan Kab/Kota	85,00
		17	Jumlah Pembinaan, Monitoring, evaluasi dan Fasilitasi kegiatan Bidang KBKR di Kabupaten dan Kota	1
Ketahanan Keluarga dan Pemberdayaan Keluarga Provinsi				
		18	Pembinaan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga diseluruh tingkatan wilayah	1 Provinsi dan 6 Kab/Kota
		19	Jumlah pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi kebijakan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (Pembangunan Keluarga) diseluruh tingkatan wilayah	1 Provinsi dan 6 Kab/Kota
		20	Persentase Kabupaten/Kota yang mengembangkan kegiatan BKB Holistic Integrative	100,00

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019
		21	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pembinaan Genre (PIK-R/M dan BKR)	100,00
		22	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan pembinaan BKL	100,00
		23	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan pembinaan PEK dan pembentukan kelompok UPPKS	100,00
		24	Jumlah Pembinaan, Monitoring, evaluasi dan Fasilitasi kegiatan Bidang KSPK	1
Advokasi, Penggerakan dan Informasi Provinsi				
		25	Persentase Stakeholders/mitra kerja dan masyarakat di seluruh tingkatan wilayah yang mendapat Pembinaan Advokasi dan KIE program KKBPK	60,00
		26	Jumlah Pembinaan dan sosialisasi kebijakan, strategi dan materi advokasi dan KIE pembangunan KKBPK	1
		27	Jumlah Penayangan informasi KKBPK melalui berbagai media cetak dan elektronik, media luar ruang dan seni dan budaya/tradisional	5 Media
		28	Jumlah Pembinaan mekanisme operasional dalam penguatan pelayanan dasar masyarakat	6
		29	Jumlah wilayah yang mendapatkan dukungan pendampingan kemitraan dalam pembangunan KKB di seluruh tingkatan wilayah	1 Provinsi dan 6 Kab/Kota
		30	Persentase kesertaan stakeholder dan mitra kerja dalam implementasi program KKBPK	100,00
		31	Pengelolaan Data dan Informasi program KKBPK di Provinsi	2
		32	Jumlah pengelolaan data dan informasi program KKBPK di provinsi	1
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya				
8	Terselenggaranya Dukungan Manajemen dalam pengelolaan Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Provinsi			
Dukungan Kegiatan Manajemen/Sekretariat Provinsi				
		33	Dukungan Manajemen di Provinsi (termasuk gaji/001 dan pemeliharaan rutin/002)	13 bulan 1 Provinsi
		34	Persentase ketepatan Pembayaran Gaji dan uang makan Pegawai (Perwakilan BKKBN Provinsi)	100,00
		35	Jumlah penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran	12
		36	Jumlah penyelenggaraan Manajemen di Provinsi (Keuangan dan BMN, Perencanaan, Kepegawaian, Umum, dan Ortala)	12
		37	Persentase pengadaan sarana prasarana sesuai Standar Baring dan Standar Kebutuhan (SBSK)	100,00
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur				
9	Terwujudnya akuntabilitas pelaksanaan pengawasan lainnya di provinsi			
V Pengawasan Provinsi				
		38	Jumlah pelaksanaan pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur di provinsi	1
		39	Jumlah peningkatan pelaksanaan pengawasan lainnya dan penerapan ZI WBK	1
Program Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan serta Kerjasama Internasional				
10	Terselenggaranya kegiatan pelatihan, penelitian dan pengembangan di Provinsi			
VI Pelatihan Pengembangan Provinsi				
		40	Jumlah SDM provinsi (SDM Aparatur dan tenaga Fungsional, termasuk Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana -PLKB/PKB) yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan kapasitas	83
		41	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan SDM (SDM Aparatur dan tenaga Fungsional)	1
VII Penelitian dan Pengembangan Provinsi				
		42	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan program KKBPK di Provinsi yang dimanfaatkan	3 Dokumen penelitian (KKBPK dan RPJMN) / Prov
		43	Jumlah hasil-hasil penelitian dan pengembangan program KKBPK (KKB) yang dimanfaatkan	3

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019
C PROYEK PRIORITAS NASIONAL (PRO PN)				
11	Tersedianya Alokasi di Fasilitas Kesehatan	44	Pemenuhan Ketersediaan Alokasi di Fasilitas	157
12	Terlaksananya promosi dan konseling kesehatan reproduksi melalui Kelompok Kegiatan	45	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi melalui Kelompok Kegiatan	368
13	Meningkatnya pengetahuan keluarga yang memiliki Baduta tentang 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	46	Keluarga yang Memiliki Baduta Terpapar 1000 HPK	20.615
14	Meningkatnya pengetahuan Remaja Putri sebagai calon ibu tentang edukasi Kespro dan Gizi melalui peran Pusat Informasi Konseling (PIK) Remaja dan Bina Ketahanan Remaja (BKR)	47	Penguatan Peran PIK Remaja dan BKR dalam Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu	307
D INDIKATOR STRATEGIS DI LUAR RENSTRA				
15	Terlaksananya penetapan BMN berdasarkan status penggunaannya	48	Persentase BMN yang telah ditetapkan status penggunaannya	100,00
16	Meningkatnya akuntabilitas kinerja program dan anggaran	49	Level maturitas penilaian mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3.0 (Level 1-5)
17	Meningkatnya pengelolaan Kampung KB melalui Kelompok Kerja (POKJA) Kampung KB	50	Persentase Kampung KB yang telah memiliki Kelompok Kerja (POKJA) Kampung KB	85,00
18	Terbentuknya Kampung KB Percontohan Tingkat Kabupaten dan Kota	51	Jumlah Kampung KB Percontohan Tingkat Kabupaten dan Kota	6
19	Terlaksananya Pembinaan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Komprehensif di Kecamatan oleh Kabupaten dan Kota	52	Persentase Kabupaten dan Kota yang melaksanakan Pembinaan PPKS secara Komprehensif di Kecamatan	50,00
20	Terdatanya Kepala Keluarga (KK) dalam Pendataan Keluarga	53	Persentase Kepala Keluarga (KK) terdata dalam Pendataan Keluarga	100,00
21	Meningkatnya cakupan potensi Faskes dan Poktan yang teregister dalam database SIGA	54	Persentase cakupan potensi Faskes dan Poktan yang teregister dalam database SIGA	50,00
22	Meningkatnya kualitas SDM Aparatur sesuai dengan kompetensinya	55	Persentase peta kompetensi PNS	60,00
		56	Tingkat internalisasi budaya kerja CETAK TEGAS yang dimiliki oleh PNS di BKKBN Provinsi	3.0 (Skala 1-6)

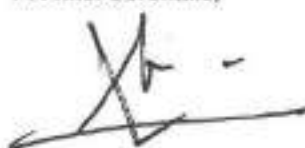
NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN/BIDANG/OUTPUT	ANGGARAN (Rp)
1	Pengelolaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga Provinsi Gorontalo	1 Pengendalian Penduduk Provinsi	778.656.000
		2 Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Provinsi	1.116.772.000
		3 Ketahanan Keluarga dan Pemberdayaan Keluarga Provinsi	1.178.240.000
		4 Advokasi, Penggerakan dan Informasi Provinsi	3.538.736.000
		5 Dukungan Kegiatan Manajemen/Sekretariat Provinsi	24.941.692.000
		6 Pengawasan Provinsi	55.000.000
		7 Pelatihan Pengembangan Provinsi	792.225.000
		8 Penelitian dan Pengembangan Provinsi	839.141.000
2	Proyek Prioritas Nasional	9 Pemenuhan Ketersediaan Alokasi di Fasilitas	4.165.723.000
		10 Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi melalui Kelompok Kegiatan	108.500.000
		11 Keluarga yang Memiliki Baduta Terpapar 1000 HPK	480.000.000
		12 Penguatan Peran PIK Remaja dan BKR dalam Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu	1.300.457.000
		TOTAL ANGGARAN	39.295.141.000

Kepala Badan Kependudukan
Dan Keluarga Berencana Nasional,



Hasto Wardoyo

Surabaya, 16 September 2019
Kepala Perwakilan BKKBN
Provinsi Gorontalo,



Muhammad Edi Muin



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tenny Calvenny Soriton
Jabatan : Plt. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Hasto Wardoyo
Jabatan : Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Hasto Wardoyo

Surabaya, 16 September 2019

Pihak Pertama,

Tenny Calvenny Soriton



PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SULAWESI TENGAH

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019
A INDIKATOR SASARAN STRATEGIS				
1	Menurunnya angka kelahiran total (TFR)	1	Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) per WUS (15-49 tahun)	2,57
2	Meningkatnya prevalensi kontrasepsi modern (mCPR)	2	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (modern contraceptive prevalence rate/mCPR)	63,85
3	Menurunnya tingkat putus pakai kontrasepsi	3	Persentase penurunan angka ketidakberlangsungan pemakaian (tingkat putus pakai) kontrasepsi	24,60
4	Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmetneed)	4	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	7,91
5	Meningkatnya peserta KB Aktif yang menggunakan MKJP	5	Persentase Peserta KB Aktif MKJP	24,01
6	Meningkatnya peserta KB Aktif tambahan	6	Jumlah Peserta KB Aktif tambahan (Additional User)	4.272
B INDIKATOR KINERJA RENSTRA				
Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga				
7	Terlaksananya Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga diseluruh tingkatan wilayah			
Pengendalian Penduduk Provinsi				
		7	Jumlah cakupan sinkronisasi (penyerasian) kebijakan pembangunan daerah dengan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk diseluruh tingkatan wilayah	100% (13 Kab/Kota)
		8	Persentase Kab/Kota yang mengimplementasikan kebijakan dan strategi pengendalian penduduk (Grand Design, Profil/parameter dan Proyeksi Penduduk)	100,00
		9	Jumlah Kabupaten/Kota yang memanfaatkan Analisis Dampak Kependudukan sebagai pendukung kebijakan Pembangunan berwawasan kependudukan	48
		10	Jumlah pembinaan implementasi pendidikan kependudukan di Tk. Provinsi dan Kabupaten/Kota (formal, non formal, informal)	3 Model (terdiri dari 1 formal, 1 non formal, 1 informal)
		11	Jumlah Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi Bidang Pengendalian Penduduk	1
Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Provinsi				
		12	Cakupan pembinaan kesetaraan ber-KB dan peningkatan kualitas pelayanan KB yang sesuai dengan standarisasi pelayanan KB diseluruh tingkatan wilayah	100,00
		13	Jumlah penggerakan pelayanan KB MKJP	4,048
		14	Jumlah penggerakan pelayanan KB dan KR di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan terluar (DTPK), wilayah miskin perkotaan dan sasaran khusus	3 frek/th/kab
		15	Persentase Faskes dan jejernya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	85,00
		16	Persentase Faskes yang melakukan promosi dan konseling Kesehatan dan hak-hak Reproduksi di Provinsi dan Kab/Kota	85,00
		17	Jumlah Pembinaan, Monitoring, evaluasi dan Fasilitasi kegiatan Bidang KBKR di Kabupaten dan Kota	1
Ketahanan Keluarga dan Pemberdayaan Keluarga Provinsi				
		18	Pembinaan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga diseluruh tingkatan wilayah	1 Provinsi dan 13 Kab/Kota
		19	Jumlah pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi kebijakan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (Pembangunan Keluarga) diseluruh tingkatan wilayah	1 Provinsi dan 13 Kab/Kota
		20	Persentase Kabupaten/Kota yang mengembangkan kegiatan BKB Holistic Integrative	100,00

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019
		21	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pembinaan Genre (PIK-R/M dan BKR)	100,00
		22	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan pembinaan BKL	100,00
		23	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan pembinaan PEK dan pembentukan kelompok UPPKS	100,00
		24	Jumlah Pembinaan, Monitoring, evaluasi dan Fasilitasi kegiatan Bidang KSPK	1
Advokasi, Penggerakan dan Informasi Provinsi				
		25	Persentase Stakeholders/mitra kerja dan masyarakat diseluruh tingkatan wilayah yang mendapat Pembinaan Advokasi dan KIE program KKBPK	80,00
		26	Jumlah Pembinaan dan sosialisasi kebijakan, strategi dan materi advokasi dan KIE pembangunan KKBPK	1
		27	Jumlah Penayangan informasi KKBPK melalui berbagai media cetak dan elektronik, media luar ruang dan seni dan budaya/tradisional	5 Media
		28	Jumlah Pembinaan mekanisme operasional dalam penguatan pelayanan dasar masyarakat	13
		29	Jumlah wilayah yang mendapatkan dukungan pendampingan kemitraan dalam pembangunan KKB diseluruh tingkatan wilayah	1 Provinsi dan 13 Kab/Kota
		30	Persentase kesertaan stakeholder dan mitra kerja dalam implementasi program KKBPK	100,00
		31	Pengelolaan Data dan informasi program KKBPK di Provinsi	2
		32	Jumlah pengelolaan data dan informasi program KKBPK di provinsi	1
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya				
8	Terselenggaranya Dukungan Manajemen dalam pengelolaan Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Provinsi			
Dukungan Kegiatan Manajemen/Sekretariat Provinsi				
		33	Dukungan Manajemen di Provinsi (termasuk gaji/001 dan pemeliharaan rutin/002)	13 bulan 1 Provinsi
		34	Persentase ketepatan Pembayaran Gaji dan uang makan Pegawai (Penyakit BKKBN Provinsi)	100,00
		35	Jumlah penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran	12
		36	Jumlah penyelenggaraan Manajemen di Provinsi (Keuangan dan BMN, Perencanaan, Kepegawaian, Umum, dan Ortala)	12
		37	Persentase pengadaan sarana prasarana sesuai Standar Baring dan Standar Kebutuhan (SBSK)	100,00
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur				
9	Terwujudnya akuntabilitas pelaksanaan pengawasan lainnya di provinsi			
V. Pengawasan Provinsi				
		38	Jumlah pelaksanaan pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur di provinsi	1
		39	Jumlah peningkatan pelaksanaan pengawasan lainnya dan penerapan ZI WBK	1
Program Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan serta Kerjasama Internasional				
10	Terselenggaranya kegiatan pelatihan, penelitian dan pengembangan di Provinsi			
VI. Pelatihan Pengembangan Provinsi				
		40	Jumlah SDM provinsi (SDM Aparatur dan tenaga Fungsional, termasuk Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana -PLKB/PKB) yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan kapasitas	178
		41	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan SDM (SDM Aparatur dan tenaga Fungsional)	1
VII. Penelitian dan Pengembangan Provinsi				
		42	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan program KKBPK di Provinsi yang dimanfaatkan	3 Dokumen penelitian (KKBPK dan RPJMN) / Prov
		43	Jumlah hasil-hasil penelitian dan pengembangan program KKBPK (KKB) yang dimanfaatkan	3

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019
C. PROYEK PRIORITAS NASIONAL (PRO PN)				
11	Tersedianya Akkon di Fasilitas Kesehatan	44	Pemenuhan Ketersediaan Alokasi di Fasilitas	255
12	Terlaksanannya promosi dan konseling kesehatan reproduksi melalui Kelompok Kegiatan	45	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi melalui Kelompok Kegiatan	723
13	Meningkatnya pengetahuan keluarga yang memiliki Baduta tentang 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	46	Keluarga yang Memiliki Baduta Terpapar 1000 HPK	27.927
14	Meningkatnya pengetahuan Remaja Putri sebagai calon ibu tentang edukasi Kespro dan Gizi melalui peran Pusat Informasi Konseling (PIK) Remaja dan Bina Ketahanan Remaja (BKR)	47	Penguatan Peran PIK Remaja dan BKR dalam Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu	368
D. INDIKATOR STRATEGIS DI LUAR RENSTRA				
15	Terlaksanannya penetapan BMN berdasarkan status penggunaannya	48	Persentase BMN yang telah ditetapkan status penggunaannya	100,00
16	Meningkatnya akuntabilitas kinerja program dan anggaran	49	Level maturitas penilaian mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3,0 (Level 1-5)
17	Meningkatnya pengelolaan Kampung KB melalui Kelompok Kerja (POKJA) Kampung KB	50	Persentase Kampung KB yang telah memiliki Kelompok Kerja (POKJA) Kampung KB	65,00
18	Terbentuknya Kampung KB Percontohan Tingkat Kabupaten dan Kota	51	Jumlah Kampung KB Percontohan Tingkat Kabupaten dan Kota	13
19	Terlaksanannya Pembinaan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Komprehensif di Kecamatan oleh Kabupaten dan Kota	52	Persentase Kabupaten dan Kota yang melaksanakan Pembinaan PPKS secara Komprehensif di Kecamatan	50,00
20	Terdaftar Kepala Keluarga (KK) dalam Pendataan Keluarga	53	Persentase Kepala Keluarga (KK) terdata dalam Pendataan Keluarga	100,00
21	Meningkatnya cakupan potensi Fasilitas dan Poktan yang teregister dalam database SIGA	54	Persentase cakupan potensi Fasilitas dan Poktan yang teregister dalam database SIGA	50,00
22	Meningkatnya kualitas SDM Aparatur sesuai dengan kompetensinya	55	Persentase peta kompetensi PNS	60,00
		56	Tingkat internalisasi budaya kerja CETAK TEGAS yang dimiliki PNS di BKKBN Provinsi	3,0 (Skala 1-5)

NO	KEGIATAN	SUB-KEGIATAN/BIDANG/OUTPUT	ANGGARAN (Rp)
1	Pengelolaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga Provinsi Sulawesi Tengah	1. Pengendalian Penduduk Provinsi	1.301.311.000
		2. Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Provinsi	1.983.782.000
		3. Ketahanan Keluarga dan Pemberdayaan Keluarga Provinsi	2.132.460.000
		4. Advokasi, Penggerakan dan Informasi Provinsi	6.582.380.000
		5. Dukungan Kegiatan Manajemen/Sekretariat Provinsi	52.673.544.000
		6. Pengawasan Provinsi	85.418.000
		7. Pelatihan Pengembangan Provinsi	1.154.850.000
		8. Penelitian dan Pengembangan Provinsi	1.067.459.000
2	Proyek Prioritas Nasional	9. Pemenuhan Ketersediaan Alokasi di Fasilitas	3.439.467.000
		10. Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi melalui Kelompok Kegiatan	112.000.000
		11. Keluarga yang Memiliki Baduta Terpapar 1000 HPK	910.000.000
		12. Penguatan Peran PIK Remaja dan BKR dalam Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu	1.599.296.000
		TOTAL ANGGARAN	73.042.626.000

Kepala Badan Kependudukan
Dan Keluarga Berencana Nasional,



Hasto Wardoyo

Surabaya, 16 September 2019
Plt. Kepala Perwakilan BKKBN
Provinsi Sulawesi Tengah,



Tenny Calvenny Sorjon



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Renta Rego
Jabatan : Plt. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Hasto Wardoyo
Jabatan : Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Hasto Wardoyo

Surabaya, 16 September 2019

Pihak Pertama,

Renta Rego



PERWAKILAN BKKBN PROVINSI MALUKU

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019
A. INDIKATOR SASARAN STRATEGIS				
1	Menurunnya angka kelahiran total (TFR)	1	Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) per WUS (15-49 tahun)	2,15
2	Meningkatnya prevalensi kontrasepsi modern (mCPR)	2	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (modern contraceptive prevalence rate/mCPR)	43,28
3	Menurunnya tingkat putus pakai kontrasepsi	3	Persentase penurunan angka ketidakberlangsungan pemakaian (tingkat putus pakai) kontrasepsi	24,60
4	Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet need)	4	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	16,30
5	Meningkatnya peserta KB Aktif yang menggunakan MKJP	5	Persentase Peserta KB Aktif MKJP	23,53
6	Meningkatnya peserta KB Aktif tambahan	6	Jumlah Peserta KB Aktif tambahan (Additional User)	1.816
B. INDIKATOR KINERJA RENSTRA				
Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga				
7	Tertaksananya Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga diseluruh tingkatan wilayah			
Pengendalian Penduduk Provinsi				
		7	Jumlah cakupan sinkronisasi (penyerasian) kebijakan pembangunan daerah dengan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk diseluruh tingkatan wilayah	100% (11 Kab/Kota)
		8	Persentase Kab/Kota yang mengimplementasikan kebijakan dan strategi pengendalian penduduk (Grand Design, Profil/parameter dan Proyeksi Penduduk)	100,00
		9	Jumlah Kabupaten/Kota yang memanfaatkan Analisis Dampak Kependudukan sebagai pendukung kebijakan Pembangunan berwawasan kependudukan	48
		10	Jumlah pembinaan implementasi pendidikan kependudukan di Tk. Provinsi dan Kabupaten/Kota (formal, non formal, informal)	3 Model (terdiri dari 1 formal, 1 non formal, 1 informal)
		11	Jumlah Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi Bidang Pengendalian Penduduk	1
Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Provinsi				
		12	Cakupan pembinaan kesetaraan ber-KB dan peningkatan kualitas pelayanan KB yang sesuai dengan standarisasi pelayanan KB diseluruh tingkatan wilayah	100,00
		13	Jumlah penggerakan pelayanan KB MKJP	2.559
		14	Jumlah penggerakan pelayanan KB dan KR di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan terluar (DTPK), wilayah miskin perkotaan dan sasaran khusus	3 frekuensi/kab
		15	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	85,00
		16	Persentase Faskes yang melakukan promosi dan konseling Kesehatan dan hak-hak Reproduksi di Provinsi dan Kab/Kota	85,00
		17	Jumlah Pembinaan, Monitoring, evaluasi dan Fasilitasi kegiatan Bidang KBKR di Kabupaten dan Kota	1
Ketahanan Keluarga dan Pemberdayaan Keluarga Provinsi				
		18	Pembinaan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga diseluruh tingkatan wilayah	1 Provinsi dan 11 Kab/Kota
		19	Jumlah pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi kebijakan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (Pembangunan Keluarga) diseluruh tingkatan wilayah	1 Provinsi dan 11 Kab/Kota
		20	Persentase Kabupaten/Kota yang mengembangkan kegiatan BKB Holistic Integrative	100,00

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019
		21	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pembinaan Genre (PIK-RM dan BKR)	100,00
		22	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan pembinaan BKL	100,00
		23	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan pembinaan PEK dan pembentukan kelompok UPPKS	100,00
		24	Jumlah Pembinaan, Monitoring, evaluasi dan Fasilitasi kegiatan Bidang KSPK	1
Advokasi, Penggerakan dan Informasi Provinsi				
		25	Persentase Stakeholders/mitra kerja dan masyarakat diseluruh tingkatan wilayah yang mendapat Pembinaan Advokasi dan KIE program KKBPK	80,00
		26	Jumlah Pembinaan dan sosialisasi kebijakan, strategi dan materi advokasi dan KIE pembangunan KKBPK	1
		27	Jumlah Penayangan informasi KKBPK melalui berbagai media cetak dan elektronik, media luar ruang dan seni dan budaya/tradisional	5 Media
		28	Jumlah Pembinaan mekanisme operasional dalam penguatan pelayanan dasar masyarakat	11
		29	Jumlah wilayah yang mendapatkan dukungan pendampingan kemitraan dalam pembangunan KKB diseluruh tingkatan wilayah	1 Provinsi dan 11 Kab/Kota
		30	Persentase kesetiaan stakeholder dan mitra kerja dalam implementasi program KKBPK	100,00
		31	Pengelolaan Data dan informasi program KKBPK di Provinsi	2
		32	Jumlah pengelolaan data dan informasi program KKBPK di provinsi	1
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya				
8	Terselenggaranya Dukungan Manajemen dalam pengelolaan Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Provinsi			
Dukungan Kegiatan Manajemen/Sekretariat Provinsi				
		33	Dukungan Manajemen di Provinsi (termasuk gaji/001 dan pemeliharaan rutin/002)	13 bulan 1 Provinsi
		34	Persentase ketepatan Pembayaran Gaji dan uang makan Pegawai (Perwakilan BKKBN Provinsi)	100,00
		35	Jumlah penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran	12
		36	Jumlah penyelenggaraan Manajemen di Provinsi (Keuangan dan BMN, Perencanaan, Kepegawaian, Umum, dan Ortala)	12
		37	Persentase pengadaan sarana prasarana sesuai Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK)	100,00
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur				
9	Tereujudnya akuntabilitas pelaksanaan pengawasan lainnya di provinsi			
V Pengawasan Provinsi				
		38	Jumlah pelaksanaan pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparat di provinsi	1
		39	Jumlah peningkatan pelaksanaan pengawasan lainnya dan penerapan 2i WBK	1
Program Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan serta Kerjasama Internasional				
10	Terselenggaranya kegiatan pelatihan, penelitian dan pengembangan di Provinsi			
VI Pelatihan Pengembangan Provinsi				
		40	Jumlah SDM provinsi (SDM Aparatur dan tenaga Fungsional, termasuk Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana -PLKB/PKB) yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan kapasitas	105
		41	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan SDM (SDM Aparatur dan tenaga Fungsional)	1
VII Penelitian dan Pengembangan Provinsi				
		42	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan program KKBPK di Provinsi yang dimanfaatkan	3 Dokumen penelitian (KKBPK dan RPJMN) / Prov
		43	Jumlah hasil-hasil penelitian dan pengembangan program KKBPK (KKB) yang dimanfaatkan	3

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019
C. PROYEK PRIORITAS NASIONAL (PRO PN)				
11	Tersedianya Alokasi di Fasilitas Kesehatan	44	Pemenuhan Ketersediaan Alokasi di Fasilitas	253
12	Tersedianya promosi dan konseling kesehatan reproduksi melalui Kelompok Kegiatan	45	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi melalui Kelompok Kegiatan	550
13	Meningkatnya pengetahuan keluarga yang memiliki Baduta tentang 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	46	Keluarga yang Memiliki Baduta Tanpa Papar 1000 HPK	25.530
14	Meningkatnya pengetahuan Remaja Putri sebagai calon ibu tentang edukasi Kespro dan Gizi melalui peran Pusat Informasi Konseling (PIK) Remaja dan Bina Ketahanan Remaja (BKR)	47	Penguatan Peran PIK Remaja dan BKR dalam Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu	349
D. INDIKATOR STRATEGIS DI LUAR RENSTRA				
15	Tersedianya penyalangan BMN berdasarkan status penggunaannya	48	Persentase BMN yang telah ditetapkan status penggunaannya	100,00
16	Meningkatnya akuntabilitas kinerja program dan anggaran	49	Level maturitas penilaian mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3,0 (Level 1-5)
17	Meningkatnya pengelolaan Kampung KB melalui Kelompok Kerja (POKJA) Kampung KB	50	Persentase Kampung KB yang telah memiliki Kelompok Kerja (POKJA) Kampung KB	65,00
18	Terbentuknya Kampung KB Percontohan Tingkat Kabupaten dan Kota	51	Jumlah Kampung KB Percontohan Tingkat Kabupaten dan Kota	11
19	Tersedianya Pembinaan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Komprehensif di Kecamatan oleh Kabupaten dan Kota	52	Persentase Kabupaten dan Kota yang melaksanakan Pembinaan PPKS secara Komprehensif di Kecamatan	50,00
20	Tersedianya Kepala Keluarga (KK) dalam Pendataan Keluarga	53	Persentase Kepala Keluarga (KK) terdapat dalam Pendataan Keluarga	100,00
21	Meningkatnya cakupan potensi Fasilitas dan Poktan yang terregistrasi dalam database SIGA	54	Persentase cakupan potensi Fasilitas dan Poktan yang terregistrasi dalam database SIGA	50,00
22	Meningkatnya kualitas SDM Aparatur sesuai dengan kompetensinya	55	Persentase peta kompetensi PNS	60,00
		56	Tingkat internalisasi budaya kerja CETAK TEGAS yang dimiliki oleh PNS di BKKBN Provinsi	3,0 (Skala 1-5)

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN/BIDANG/OUTPUT	ANGGARAN (Rp)
1	Pengelolaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga Provinsi Maluku	1. Pengendalian Penduduk Provinsi	961.425.000
		2. Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Provinsi	1.518.262.000
		3. Ketahanan Keluarga dan Pemberdayaan Keluarga Provinsi	1.307.540.000
		4. Advokasi, Penggerakan dan Informasi Provinsi	4.891.179.000
		5. Dukungan Kegiatan Manajemen/Sekretariat Provinsi	24.604.646.000
		6. Pengawasan Provinsi	98.842.000
		7. Pelatihan Pengembangan Provinsi	971.703.000
		8. Penelitian dan Pengembangan Provinsi	966.154.000
2	Proyek Prioritas Nasional	9. Pemenuhan Ketersediaan Alokasi di Fasilitas	184.559.000
		10. Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi melalui Kelompok Kegiatan	116.000.000
		11. Keluarga yang Memiliki Baduta Tanpa Papar 1000 HPK	880.000.000
		12. Penguatan Peran PIK Remaja dan BKR dalam Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu	1.574.290.000
		TOTAL ANGGARAN	38.066.629.000

Kepala Badan Kependudukan
Dan Keluarga Berencana Nasional,



Hasto Wardoyo

Surabaya, 16 September 2019
Plt. Kepala Perwakilan BKKBN
Provinsi Maluku,



Renta Rego



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putut Riyatno
Jabatan : Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Utara

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Hasto Wardoyo
Jabatan : Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Surabaya, 16 September 2019

Pihak Pertama,

Hasto Wardoyo

Putut Riyatno



PERWAKILAN BKKBN PROVINSI MALUKU UTARA

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019
A. INDIKATOR SASARAN STRATEGIS				
1	Menurunnya angka kelahiran total (TFR)	1	Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) per WUS (15-49 tahun)	2,76
2	Meningkatnya prevalensi kontrasepsi modern (mCPR)	2	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (modern contraceptive prevalence rate/mCPR)	54,78
3	Menurunnya tingkat putus pakai kontrasepsi	3	Persentase penurunan angka ketidakberlangsungan pemakaian (tingkat putus pakai) kontrasepsi	24,00
4	Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmetneed)	4	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	11,35
5	Meningkatnya peserta KB Aktif yang menggunakan MKJP	5	Persentase Peserta KB Aktif MKJP	28,37
6	Meningkatnya peserta KB Aktif tambahan	6	Jumlah Peserta KB Aktif tambahan (Additional User)	1.690
B. INDIKATOR KINERJA RENSTRA				
Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga				
7	Terlaksananya Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga diseluruh tingkatan wilayah			
Pengendalian Penduduk Provinsi				
		7	Jumlah cakupan sinkronisasi (penyerasian) kebijakan pembangunan daerah dengan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk diseluruh tingkatan wilayah	100% (10 Kab/Kota)
		8	Persentase Kab/Kota yang mengimplementasikan kebijakan dan strategi pengendalian penduduk (Grand Design, Profil/parameter dan Proyeksi Penduduk)	100,00
		9	Jumlah Kabupaten/Kota yang memanfaatkan Analisis Dampak Kependudukan sebagai pendukung kebijakan Pembangunan berwawasan kependudukan	33
		10	Jumlah pembinaan implementasi pendidikan kependudukan di Tk. Provinsi dan Kabupaten/Kota (formal, non formal, informal)	3 Model (terdiri dari 1 formal, 1 non formal, 1 informal)
		11	Jumlah Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi Bidang Pengendalian Penduduk	1
Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Provinsi				
		12	Cakupan pembinaan kesetaraan ber-KB dan peningkatan kualitas pelayanan KB yang sesuai dengan standarisasi pelayanan KB diseluruh tingkatan wilayah	100,00
		13	Jumlah pergerakan pelayanan KB MKJP	2,522
		14	Jumlah pergerakan pelayanan KB dan KR di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan Terluar (DTPK), wilayah miskin perkotaan dan sasaran khusus	3 frek/th/kab
		15	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	85,00
		16	Persentase Faskes yang melakukan promosi dan konseling Kesehatan dan hak-hak Reproduksi di Provinsi dan Kab/Kota	85,00
		17	Jumlah Pembinaan, Monitoring, evaluasi dan Fasilitasi kegiatan Bidang KBKR di Kabupaten dan Kota	1
Ketahanan Keluarga dan Pemberdayaan Keluarga Provinsi				
		18	Pembinaan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga diseluruh tingkatan wilayah	1 Provinsi dan 10 Kab/Kota
		19	Jumlah pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi kebijakan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (Pembangunan Keluarga) diseluruh tingkatan wilayah	1 Provinsi dan 10 Kab/Kota
		20	Persentase Kabupaten/Kota yang mengembangkan kegiatan BKB Holistic Integrative	100,00

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019
		21	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pembinaan Genre (PK-R/M dan BKR)	100,00
		22	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan pembinaan BKL	100,00
		23	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan pembinaan PEK dan pembentukan kelompok UPPKS	100,00
		24	Jumlah Pembinaan, Monitoring, evaluasi dan Fasilitasi kegiatan Bidang KSPK	1
Advokasi, Penggerakan dan Informasi Provinsi				
		25	Persentase Stakeholders/mitra kerja dan masyarakat di seluruh tingkat wilayah yang mendapat Pembinaan Advokasi dan KIE program KKBPK	80,00
		26	Jumlah Pembinaan dan sosialisasi kebijakan, strategi dan materi advokasi dan KIE pembangunan KKBPK	1
		27	Jumlah Penayangan Informasi KKBPK melalui berbagai media cetak dan elektronik, media luar ruang dan seni dan budaya/tradisional	5 Media
		28	Jumlah Pembinaan mekanisme operasional dalam penguatan pelayanan dasar masyarakat	10
		29	Jumlah wilayah yang mendapatkan dukungan pendampingan kemitraan dalam pembangunan KKB di seluruh tingkat wilayah	1 Provinsi dan 10 Kab/Kota
		30	Persentase kesertaan stakeholder dan mitra kerja dalam implementasi program KKBPK	100,00
		31	Pengelolaan Data dan informasi program KKBPK di Provinsi	2
		32	Jumlah pengelolaan data dan informasi program KKBPK di provinsi	1
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya				
8	Terselenggaranya Dukungan Manajemen dalam pengelolaan Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Provinsi			
Dukungan Kegiatan Manajemen/Sekretariat Provinsi				
		33	Dukungan Manajemen di Provinsi (termasuk gaji/001 dan pemeliharaan rutin/002)	13 bulan 1 Provinsi
		34	Persentase ketepatan Pembayaran Gaji dan uang makan Pegawai (Perwakilan BKKBN Provinsi)	100,00
		35	Jumlah penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran	12
		36	Jumlah penyelenggaraan Manajemen di Provinsi (Keuangan dan BMN, Perencanaan, Kepegawaian, Umum, dan Orala)	12
		37	Persentase pengadaan sarana prasarana sesuai Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK)	100,00
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur				
9	Terwujudnya akuntabilitas pelaksanaan pengawasan lainnya di provinsi			
V Pengawasan Provinsi				
		38	Jumlah pelaksanaan pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur di provinsi	1
		39	Jumlah peningkatan pelaksanaan pengawasan lainnya dan penerapan ZI WBK	1
Program Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan serta Kerjasama Internasional				
10	Terselenggaranya kegiatan pelatihan, penelitian dan pengembangan di Provinsi			
VI Pelatihan Pengembangan Provinsi				
		40	Jumlah SDM provinsi (SDM Aparatur dan tenaga Fungsional, termasuk Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana -PLKB/PKB) yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan kapasitas	109
		41	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan SDM (SDM Aparatur dan tenaga Fungsional)	1
VII Penelitian dan Pengembangan Provinsi				
		42	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan program KKBPK di Provinsi yang dimanfaatkan	3 Dokumen penelitian (KKBPK dan RPJMN) / Prov
		43	Jumlah hasil-hasil penelitian dan pengembangan program KKBPK (KKB) yang dimanfaatkan	3

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019
C PROYEK PRIORITAS NASIONAL (PRO PN)				
11	Tersedianya Alokasi di Fasilitas Kesehatan	44	Pemenuhan Ketersediaan Alokasi di Fasilitas	224
12	Terlaksananya promosi dan konseling kesehatan reproduksi melalui Kelompok Kegiatan	45	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi melalui Kelompok Kegiatan	367
13	Meningkatnya pengetahuan keluarga yang memiliki Baduta tentang 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	46	Keluarga yang Memiliki Baduta Terpapar 1000 HPK	10.175
14	Meningkatnya pengetahuan Remaja Putri sebagai calon ibu tentang edukasi Kespro dan Gizi melalui peran Pusat Informasi Konseling (PIK) Remaja dan Bina Ketahanan Remaja (BKR)	47	Penguatan Peran PIK Remaja dan BKR dalam Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu	213
D INDIKATOR STRATEGIS DI LUAR RENSTRA				
15	Terlaksananya penetapan BMN berdasarkan status penggunaannya	48	Persentase BMN yang telah ditetapkan status penggunaannya	100,00
16	Meningkatnya akuntabilitas kinerja program dan anggaran	49	Level maturitas penilaian mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3.0 (Level 1-5)
17	Meningkatnya pengelolaan Kampung KB melalui Kelompok Kerja (POKJA) Kampung KB	50	Persentase Kampung KB yang telah memiliki Kelompok Kerja (POKJA) Kampung KB	65,00
18	Terbentuknya Kampung KB Percontohan Tingkat Kabupaten dan Kota	51	Jumlah Kampung KB Percontohan Tingkat Kabupaten dan Kota	10
19	Terlaksananya Pembinaan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Komprehensif di Kecamatan oleh Kabupaten dan Kota	52	Persentase Kabupaten dan Kota yang melaksanakan Pembinaan PPKS secara Komprehensif di Kecamatan	50,00
20	Terdapatnya Kepala Keluarga (KK) dalam Pendataan Keluarga	53	Persentase Kepala Keluarga (KK) terdata dalam Pendataan Keluarga	90,00
21	Meningkatnya cakupan potensi Fasilitas dan Poktan yang teregister dalam database SIGA	54	Persentase cakupan potensi Fasilitas dan Poktan yang teregister dalam database SIGA	50,00
22	Meningkatnya kualitas SDM Aparatur sesuai dengan kompetensinya	55	Persentase peta kompetensi PNS	60,00
		56	Tingkat internalisasi budaya kerja CETAK TEGAS yang dimiliki oleh PNS di BKKBN Provinsi	3.0 (Skala 1-5)

NO	KEGIATAN	SUB-KEGIATAN/BIDANG/OUTPUT	ANGGARAN (Rp)
1	Pengelolaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga Provinsi Maluku Utara	1. Pengendalian Penduduk Provinsi	863.455.000
		2. Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Provinsi	1.359.442.000
		3. Ketahanan Keluarga dan Pemberdayaan Keluarga Provinsi	1.264.740.000
		4. Advokasi, Penggerakan dan Informasi Provinsi	4.197.825.000
		5. Dukungan Kegiatan Manajemen/Sekretariat Provinsi	30.327.077.000
		6. Pengawasan Provinsi	65.000.000
		7. Pelatihan Pengembangan Provinsi	1.056.366.000
		8. Penelitian dan Pengembangan Provinsi	1.160.914.000
2	Proyek Prioritas Nasional	9. Pemenuhan Ketersediaan Alokasi di Fasilitas	3.963.067.000
		10. Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi melalui Kelompok Kegiatan	116.500.000
		11. Keluarga yang Memiliki Baduta Terpapar 1000 HPK	800.000.000
		12. Penguatan Peran PIK Remaja dan BKR dalam Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu	1.433.670.000
		TOTAL ANGGARAN	46.606.056.000

Kepala Badan Kependudukan
Dan Keluarga Berencana Nasional,

Surabaya, 16 September 2019
Kepala Perwakilan BKKBN
Provinsi Maluku Utara,



Hasto Wardoyo



Putut Riyatno



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Benyamin Lado
Jabatan : Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Barat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Hasto Wardoyo
Jabatan : Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Hasto Wardoyo

Surabaya, 16 September 2019

Pihak Pertama,

Benyamin Lado



PERWAKILAN BKKBN PROVINSI PAPUA BARAT

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019
A. INDIKATOR SASARAN STRATEGIS				
1	Menurunnya angka kelahiran total (TFR)	1	Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) per WUS (15-49 tahun)	3,06
2	Meningkatnya prevalensi kontrasepsi modern (mCPR)	2	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (modern contraceptive prevalence rate/mCPR)	40,56
3	Menurunnya tingkat putus pakai kontrasepsi	3	Persentase penurunan angka ketidakterlaksanaan pemakaian (tingkat putus pakai) kontrasepsi	24,60
4	Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmetneed)	4	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	15,10
5	Meningkatnya peserta KB Aktif yang menggunakan MKJP	5	Persentase Peserta KB Aktif MKJP	24,28
6	Meningkatnya peserta KB Aktif tambahan	6	Jumlah Peserta KB Aktif tambahan (Additional User)	1.135
B. INDIKATOR KINERJA RENSTRA				
Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga				
7	Terlaksananya Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga diseluruh tingkatan wilayah			
Pengendalian Penduduk Provinsi				
	7	Jumlah cakupan sinkronisasi (penyerasian) kebijakan pembangunan daerah dengan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk diseluruh tingkatan wilayah	100% (13 Kab/Kota)	
	8	Persentase Kab/Kota yang mengimplementasikan kebijakan dan strategi pengendalian penduduk (Grand Design, Profil/parameter dan Proyeksi Penduduk)	100,00	
	9	Jumlah Kabupaten/Kota yang memanfaatkan Analisis Dampak Kependudukan sebagai pendukung kebijakan Pembangunan berwawasan kependudukan	9	
	10	Jumlah pembinaan implementasi pendidikan kependudukan di Tk. Provinsi dan Kabupaten/Kota (formal, non formal, informal)	3 Model (terdiri dari 1 formal, 1 non formal, 1 informal)	
	11	Jumlah Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi Bidang Pengendalian Penduduk	1	
Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Provinsi				
	12	Cakupan pembinaan kesetaraan ber-KB dan peningkatan kualitas pelayanan KB yang sesuai dengan standarisasi pelayanan KB diseluruh tingkatan wilayah	100,00	
	13	Jumlah pengerakan pelayanan KB MKJP	713	
	14	Jumlah pengerakan pelayanan KB dan KR di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan terluar (DTPK), wilayah miskin perkotaan dan sasaran khusus	3 frek/th/kab	
	15	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	85,00	
	16	Persentase Faskes yang melakukan promosi dan konseling Kesehatan dan hak-hak Reproduksi di Provinsi dan Kab/Kota	85,00	
	17	Jumlah Pembinaan, Monitoring, evaluasi dan Fasilitasi kegiatan Bidang KBKR di Kabupaten dan Kota	1	
Ketahanan Keluarga dan Pemberdayaan Keluarga Provinsi				
	18	Pembinaan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga diseluruh tingkatan wilayah	1 Provinsi dan 13 Kab/Kota	
	19	Jumlah pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi kebijakan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (Pembangunan Keluarga) diseluruh tingkatan wilayah	1 Provinsi dan 13 Kab/Kota	
	20	Persentase Kabupaten/Kota yang mengembangkan kegiatan BKB Holistic Integrative	100,00	

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019
		21	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pembinaan Genre (PIK-RM dan BKR)	100,00
		22	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan pembinaan BKL	100,00
		23	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan pembinaan PEK dan pembentukan kelompok UPPKS	100,00
		24	Jumlah Pembinaan, Monitoring, evaluasi dan Fasilitasi kegiatan Bidang KSPK	1
Advokasi, Penggerakan dan Informasi Provinsi				
		25	Persentase Stakeholders/mitra kerja dan masyarakat diseluruh lingkaran wilayah yang mendapat Pembinaan Advokasi dan KIE program KKBPK	80,00
		26	Jumlah Pembinaan dan sosialisasi kebijakan, strategi dan materi advokasi dan KIE pembangunan KKBPK	1
		27	Jumlah Penayangan informasi KKBPK melalui berbagai media cetak dan elektronik, media luar ruang dan seni dan budaya/tradisional	5 Media
		28	Jumlah Pembinaan mekanisme operasional dalam penguatan pelayanan dasar masyarakat	13
		29	Jumlah wilayah yang mendapatkan dukungan pendampingan kemitraan dalam pembangunan KKB diseluruh lingkaran wilayah	1 Provinsi dan 13 Kab/Kota
		30	Persentase kesetiaan stakeholder dan mitra kerja dalam implementasi program KKBPK	100,00
		31	Pengelolaan Data dan informasi program KKBPK di Provinsi	2
		32	Jumlah pengelolaan data dan informasi program KKBPK di provinsi	1
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya				
8	Terselenggaranya Dukungan Manajemen dalam pengelolaan Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Provinsi			
Dukungan Kegiatan Manajemen/Sekretariat Provinsi				
		33	Dukungan Manajemen di Provinsi (termasuk gaji/001 dan pemeliharaan rutin/002)	13 bulan 1 Provinsi
		34	Persentase ketepatan Pembayaran Gaji dan uang makan Pegawai (Perwakilan BKKBN Provinsi)	100,00
		35	Jumlah penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran	12
		36	Jumlah penyelenggaraan Manajemen di Provinsi (Keuangan dan BMN, Perencanaan, Kepegawalan, Umum, dan Orjala)	12
		37	Persentase pengadaan sarana prasarana sesuai Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK)	100,00
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur				
9	Terwujudnya akuntabilitas pelaksanaan pengawasan lainnya di provinsi			
V Pengawasan Provinsi				
		38	Jumlah pelaksanaan pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur di provinsi	1
		39	Jumlah peningkatan pelaksanaan pengawasan lainnya dan penerapan ZI WRK	1
Program Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan serta Kerjasama Internasional				
10	Terselenggaranya kegiatan pelatihan, penelitian dan pengembangan di Provinsi			
VI Pelatihan Pengembangan Provinsi				
		40	Jumlah SDM provinsi (SDM Aparatur dan tenaga Fungsional termasuk Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana -PLKB/PKB) yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan kapasitas	118
		41	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan SDM (SDM Aparatur dan tenaga Fungsional)	1
VII Penelitian dan Pengembangan Provinsi				
		42	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan program KKBPK di Provinsi yang dimanfaatkan	3 Dokumen penelitian (KKBPK dan RPJMN) / Prov
		43	Jumlah hasil-hasil penelitian dan pengembangan program KKBPK (KKB) yang dimanfaatkan	3

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019
C PROYEK PRIORITAS NASIONAL (PRO PN)				
11	Tersedianya Alokasi di Fasilitas Kesehatan	44	Pemenuhan Ketersediaan Alokasi di Fasilitas	222
12	Tertaksananya promosi dan konseling kesehatan reproduksi melalui Kelompok Kegiatan	45	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi melalui Kelompok Kegiatan	239
13	Meningkatnya pengetahuan keluarga yang memiliki Baduta tentang 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	46	Keluarga yang Memiliki Baduta Terpapar 1000 HPK	8.558
14	Meningkatnya pengetahuan Remaja Putri sebagai calon ibu tentang edukasi Kespro dan Gizi melalui peran Pusat Informasi Konseling (PIK) Remaja dan Bina Ketahanan Remaja (BKR)	47	Penguatan Peran PIK Remaja dan BKR dalam Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu	225
D INDIKATOR STRATEGIS DI LUAR RENSTRA				
15	Tertaksananya penetapan BMN berdasarkan status penggunaannya	48	Persentase BMN yang telah ditetapkan status penggunaannya	100,00
16	Meningkatnya akuntabilitas kinerja program dan anggaran	49	Level maturitas penilaian mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3,0 (Level 1-5)
17	Meningkatnya pengelolaan Kampung KB melalui Kelompok Kerja (POKJA) Kampung KB	50	Persentase Kampung KB yang telah memiliki Kelompok Kerja (POKJA) Kampung KB	85,00
18	Terbentuknya Kampung KB Percontohan Tingkat Kabupaten dan Kota	51	Jumlah Kampung KB Percontohan Tingkat Kabupaten dan Kota	13
19	Tertaksananya Pembinaan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Komprehensif di Kecamatan oleh Kabupaten dan Kota	52	Persentase Kabupaten dan Kota yang melaksanakan Pembinaan PPKS secara Komprehensif di Kecamatan	50,00
20	Terdapatnya Kepala Keluarga (KK) dalam Pendataan Keluarga	53	Persentase Kepala Keluarga (KK) terdapat dalam Pendataan Keluarga	83,00
21	Meningkatnya cakupan potensi Fasilitas dan Poktan yang terregistrasi dalam database SIGA	54	Persentase cakupan potensi Fasilitas dan Poktan yang terregistrasi dalam database SIGA	50,00
22	Meningkatnya kualitas SDM Aparatur sesuai dengan kompetensinya	55	Persentase peta kompetensi PNS	60,00
		56	Tingkat internalisasi budaya kerja CETAK TEGAS yang dimiliki oleh PNS di BKKBN Provinsi	3,0 (Skala 1-5)

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN/BIDANG/OUTPUT	ANGGARAN (Rp)
1.	Pengelolaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga Provinsi Papua Barat	1. Pengendalian Penduduk Provinsi	1.016.087.000
		2. Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Provinsi	1.189.282.000
		3. Ketahanan Keluarga dan Pemberdayaan Keluarga Provinsi	1.443.140.000
		4. Advokasi, Penggerakan dan Informasi Provinsi	4.726.404.000
		5. Dukungan Kegiatan Manajemen/Sekretariat Provinsi	11.721.754.000
		6. Pengawasan Provinsi	80.000.000
		7. Pelatihan Pengembangan Provinsi	992.702.000
		8. Penelitian dan Pengembangan Provinsi	680.329.000
2.	Proyek Prioritas Nasional	9. Pemenuhan Ketersediaan Alokasi di Fasilitas	3.974.237.000
		10. Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi melalui Kelompok Kegiatan	112.000.000
		11. Keluarga yang Memiliki Baduta Terpapar 1000 HPK	1.040.000.000
		12. Penguatan Peran PIK Remaja dan BKR dalam Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu	1.688.190.000
		TOTAL ANGGARAN	28.874.125.000

Kepala Badan Kependudukan
Dan Keluarga Berencana Nasional,



Hasto Wardoyo

Surabaya, 16 September 2019
Kepala Perwakilan BKKBN
Provinsi Papua Barat,



Benjamin Lado



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sarles Brabar
Jabatan : Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Hasto Wardoyo
Jabatan : Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Hasto Wardoyo

Surabaya, 16 September 2019
Pihak Pertama,

Sarles Brabar



PERWAKILAN BKKBN PROVINSI PAPUA

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019
A INDIKATOR SASARAN STRATEGIS				
1	Menurunnya angka kelahiran total (TFR)	1	Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) per WUS (15-49 tahun)	3,15
2	Meningkatnya prevalensi kontrasepsi modern (mCPR)	2	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (modern contraceptive prevalence rate/mCPR)	40,28
3	Menurunnya tingkat putus pakai kontrasepsi	3	Persentase penurunan angka ketidakberlangsungan pemakaian (tingkat putus pakai) kontrasepsi	24,60
4	Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmetneed)	4	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	11,67
5	Meningkatnya peserta KB Aktif yang menggunakan MKJP	5	Persentase Peserta KB Aktif MKJP	26,23
6	Meningkatnya peserta KB Aktif tambahan	6	Jumlah Peserta KB Aktif tambahan (Additional User)	3.763
B INDIKATOR KINERJA RENSTRA				
Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga				
7	Terlaksananya Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga diseluruh tingkatan wilayah			
Pengendalian Penduduk Provinsi				
		7	Jumlah cakupan sinkronisasi (penyerasian) kebijakan pembangunan daerah dengan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk diseluruh tingkatan wilayah	100% (29 Kab/Kota)
		8	Persentase Kab/Kota yang mengimplementasikan kebijakan dan strategi pengendalian penduduk (Grand Design, Profil/parameter dan Proyeksi Penduduk)	100,00
		9	Jumlah Kabupaten/Kota yang memanfaatkan Analisis Dampak Kependudukan sebagai pendukung kebijakan Pembangunan berwawasan kependudukan	66
		10	Jumlah pembinaan implementasi pendidikan kependudukan di Tk. Provinsi dan Kabupaten/Kota (formal, non formal, informal)	3 Model (berdiri dari 1 formal, 1 non formal, 1 informal)
		11	Jumlah Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi Bidang Pengendalian Penduduk	1
Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Provinsi				
		12	Cakupan pembinaan konsorsium ber-KB dan peningkatan kualitas pelayanan KB yang sesuai dengan standarisasi pelayanan KB diseluruh tingkatan wilayah	100,00
		13	Jumlah penggerakan pelayanan KB MKJP	2.496
		14	Jumlah penggerakan pelayanan KB dan KR di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan terluar (DTPK), wilayah miskin perkotaan dan sasaran khusus	3 frek/th/kab
		15	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	85,00
		16	Persentase Faskes yang melakukan promosi dan konseling Kesehatan dan hak-hak Reproduksi di Provinsi dan Kab/Kota	85,00
		17	Jumlah Pembinaan, Monitoring, evaluasi dan Fasilitasi kegiatan Bidang KBKR di Kabupaten dan Kota	1
Ketahanan Keluarga dan Pemberdayaan Keluarga Provinsi				
		18	Pembinaan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga diseluruh tingkatan wilayah	1 Provinsi dan 29 Kab/Kota
		19	Jumlah pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi kebijakan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (Pembangunan Keluarga) diseluruh tingkatan wilayah	1 Provinsi dan 29 Kab/Kota
		20	Persentase Kabupaten/Kota yang mengembangkan kegiatan BKB Holistic Integrative	100,00

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019
		21	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pembinaan Genre (PIK-RUM dan BKR)	100,00
		22	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan pembinaan BKL	100,00
		23	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan pembinaan PEK dan pembentukan kelompok UPPKS	100,00
		24	Jumlah Pembinaan, Monitoring, evaluasi dan Fasilitasi kegiatan Bidang KSPK	1
Advokasi, Penggerakan dan Informasi Provinsi				
		25	Persentase Stakeholders/mitra kerja dan masyarakat diseluruh lingkaran wilayah yang mendapat Pembinaan Advokasi dan KIE program KKBPK	80,00
		26	Jumlah Pembinaan dan sosialisasi kebijakan, strategi dan materi advokasi dan KIE pembangunan KKBPK	1
		27	Jumlah Penayangan informasi KKBPK melalui berbagai media cetak dan elektronik, media luar ruang dan seni dan budaya/tradisional	5 Media
		28	Jumlah Pembinaan mekanisme operasional dalam penguatan pelayanan dasar masyarakat	29
		29	Jumlah wilayah yang mendapatkan dukungan pendampingan kemitraan dalam pembangunan KKB di seluruh lingkaran wilayah	1 Provinsi dan 29 Kab/Kota
		30	Persentase kesertaan stakeholder dan mitra kerja dalam implementasi program KKBPK	100,00
		31	Pengelolaan Data dan Informasi program KKBPK di Provinsi	2
		32	Jumlah pengelolaan data dan informasi program KKBPK di provinsi	1
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya				
8	Terselenggaranya Dukungan Manajemen dalam pengelolaan Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Provinsi			
Dukungan Kegiatan Manajemen/Sekretariat Provinsi				
		33	Dukungan Manajemen di Provinsi (termasuk gaji/001 dan pemeliharaan rutin/002)	13 bulan 1 Provinsi
		34	Persentase ketepatan Pembayaran Gaji dan uang makan Pegawai (Perwakilan BKKBN Provinsi)	100,00
		35	Jumlah penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran	12
		36	Jumlah penyelenggaraan Manajemen di Provinsi (Keuangan dan BMN, Perencanaan, Kepegawaian, Umum, dan Ortala)	12
		37	Persentase pengadaan sarana prasarana sesuai Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK)	100,00
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur				
9	Terwujudnya akuntabilitas pelaksanaan pengawasan lainnya di provinsi			
V Pengawasan Provinsi				
		38	Jumlah pelaksanaan pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparaturnya di provinsi	1
		39	Jumlah peningkatan pelaksanaan pengawasan lainnya dan penerapan ZI WBK	1
Program Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan serta Kerjasama Internasional				
10	Terselenggaranya kegiatan pelatihan, penelitian dan pengembangan di Provinsi			
VI Pelatihan Pengembangan Provinsi				
		40	Jumlah SDM provinsi (SDM Aparatur dan tenaga Fungsional, termasuk Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana -PLKB/PPK) yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan kapasitas	223
		41	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan SDM (SDM Aparatur dan tenaga Fungsional)	1
VII Penelitian dan Pengembangan Provinsi				
		42	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan program KKBPK di Provinsi yang dimanfaatkan	3 Dokumen penelitian (KKBPK dan RPJMN) / Prov
		43	Jumlah hasil-hasil penelitian dan pengembangan program KKBPK (KKB) yang dimanfaatkan	3

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019
C PROYEK PRIORITAS NASIONAL (PRO PN)				
11	Tersedianya Alokasi di Fasilitas Kesehatan	44	Pemenuhan Ketersediaan Alokasi di Fasilitas	371
12	Tersedianya promosi dan konseling kesehatan reproduksi melalui Kelompok Kegiatan	45	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi melalui Kelompok Kegiatan	382
13	Meningkatnya pengetahuan keluarga yang memiliki Baduta tentang 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	46	Keluarga yang Memiliki Baduta Terpapar 1000 HPK	11.846
14	Meningkatnya pengetahuan Remaja Putri sebagai calon ibu tentang edukasi Kespro dan Gizi melalui peran Pusat Informasi Konseling (PIK) Remaja dan Bina Ketahanan Remaja (BKR)	47	Penguatan Peran PIK Remaja dan BKR dalam Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu	482
D INDIKATOR STRATEGIS DI LUAR RENSTRA				
15	Tersedianya penetapan BMN berdasarkan status penggunaannya	48	Persentase BMN yang telah ditetapkan status penggunaannya	100,00
16	Meningkatnya akuntabilitas kinerja program dan anggaran	49	Level maturitas penilaian mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3,0 (Level 1-5)
17	Meningkatnya pengelolaan Kampung KB melalui Kelompok Kerja (POKJA) Kampung KB	50	Persentase Kampung KB yang telah memiliki Kelompok Kerja (POKJA) Kampung KB	85,00
18	Terbentuknya Kampung KB Percontohan Tingkat Kabupaten dan Kota	51	Jumlah Kampung KB Percontohan Tingkat Kabupaten dan Kota	29
19	Tersedianya Pembinaan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Komprehensif di Kecamatan oleh Kabupaten dan Kota	52	Persentase Kabupaten dan Kota yang melaksanakan Pembinaan PPKS secara Komprehensif di Kecamatan	50,00
20	Tersedianya Kepala Keluarga (KK) dalam Pendataan Keluarga	53	Persentase Kepala Keluarga (KK) terdapat dalam Pendataan Keluarga	32,00
21	Meningkatnya cakupan potensi Fasilitas dan Poktan yang terregistrasi dalam database SIGA	54	Persentase cakupan potensi Fasilitas dan Poktan yang terregistrasi dalam database SIGA	50,00
22	Meningkatnya kualitas SDM Aparatur sesuai dengan kompetensinya	55	Persentase peta kompetensi PNS	60,00
		56	Tingkat internalisasi budaya kerja CETAK TEGAS yang dimiliki oleh PNS di BKKBN Provinsi	3,0 (Skala 1-5)

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN/BIDANG/OUTPUT	ANGGARAN (Rp)
1	Pengelolaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga Provinsi Papua	1 Pengendalian Penduduk Provinsi	1.687.195.000
		2 Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Provinsi	2.035.552.000
		3 Ketahanan Keluarga dan Pemberdayaan Keluarga Provinsi	1.559.440.000
		4 Advokasi, Penggerakan dan Informasi Provinsi	6.171.059.000
		5 Dukungan Kegiatan Manajemen/Sekretariat Provinsi	10.138.307.000
		6 Pengawasan Provinsi	90.000.000
		7 Pelatihan Pengembangan Provinsi	1.313.921.000
		8 Penelitian dan Pengembangan Provinsi	1.925.894.000
2	Proyek Prioritas Nasional	9 Pemenuhan Ketersediaan Alokasi di Fasilitas	1.112.159.000
		10 Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi melalui Kelompok Kegiatan	169.000.000
		11 Keluarga yang Memiliki Baduta Terpapar 1000 HPK	1.305.000.000
		12 Penguatan Peran PIK Remaja dan BKR dalam Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu	2.454.484.000
		TOTAL ANGGARAN	38.952.882.000

Kepala Badan Kependudukan
Dan Keluarga Berencana Nasional,

Surabaya, 16 September 2019
Kepala Perwakilan BKKBN
Provinsi Papua,


Hasto Wardoyo


Charles Brabar